

## BAB II

### Pelaksanaan PKL



#### 2.1 Aktifitas Kerja

Selama melaksanakan praktek kerja lapangan penulis melakukan pekerjaan rutin seperti membuat kliping yang diambil dari berbagai harian umum, membantu pengetikan naskah majalah bulanan, mendata surat yang keluar dan surat yang masuk, apel pagi, olah raga dan membantu pengetikan surat balasan serta melakukan kegiatan isidentil (tidak Rutin) seperti menulis rublik aspirasi dan wawancara.

##### 2.1.1. Jadwal Kegiatan PKL

Aktifitas kerja yang dilaksanakan selama Praktek Kerja Lapangan di Polda Jabar dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Jadwal Kegiatan Selama PKL

No.	Hari/ Tanggal	Kegiatan
1.	Senin/ 4 Agustus 2003	Pada hari ini mendapat pembagian kerja dan penulis ditempatkan dibagian Subbid Dokliput Humas Polda Jabar



2.	Selasa/ 5 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan apel pagi</li> <li>- Olah raga bersama</li> <li>- Mencatat semua surat yang masuk dan keluar kedalam arsip</li> </ul>
3.	Rabu/ 6 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat kliping</li> <li>- Membantu pengetikan naskah majalah Gawisa</li> </ul>
4.	Kamis/ 7 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apel pagi</li> <li>- Membantu pengetikan naskah majalah bulanan yang akan diterbitkan.</li> </ul>
5.	Jum'at/ 8 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apel pagi kemudian olah raga</li> <li>- Membuat kliping harian yang diambil dari berbagai media cetak</li> </ul>



9.	Kamis/ 14 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengklipping Koran, menganalisis dan mengarsipkannya</li> <li>- Mendata surat yang masuk</li> <li>- Membantu pengetikan surat balasan</li> </ul>
10.	Jum'at/ 15 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Olah raga bersama</li> <li>- Mengklipping Koran</li> <li>- Mendata surat</li> </ul>
	Sabtu-minggu/ 16-17 Agustus 2003	Libur
11.	Senin/ 18 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengklipping Koran</li> <li>- Membantu pengetikan artikel untuk majalah bulanan Gawisa</li> </ul>
12.	Selasa/ 19 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendata surat yang keluar dan masuk</li> <li>- Mengklipping koran</li> </ul>



13.	Rabu/ 20 Agustus 2003	Mengikuti kegiatan Penataran Terpadu Fungsi Humas Polda Jabar yang diikuti oleh seluruh anggota Polri se Jawa Barat di aula Herman Sudjanadiwiryia Pukul 08.00-17.00 WIB.
14.	Kamis/ 21 Agustus 2003	Mengadakan wawancara dengan kepala Karo Bina Mitra diruangan Karo Bina Mitra untuk dimuat di majalah bulanan (Gawisa) Polda Jabar
15.	Jum'at/ 22 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti senam pagi dilapangan Mapolda Jabar</li> <li>- Mengkliping Koran, menganalisi dan mengarsipkannya.</li> </ul>
	<b>Sabtu-Minggu/ 23-24 Agustus 2003</b>	<b>Libur</b>



16.	Senin/ 25 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkliping Koran, menganalisi dan mengarsipkannya</li> <li>- Mendata surat yang masuk dan surat yang keluar</li> <li>- Membantu pengetikan surat balasan</li> <li>- Membantu pengetikan naskah majalah Ganda Wibawa Sakti yang akan diterbitkan.</li> </ul>
17.	Selasa-Rabu/ 26-27 Agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkliping Koran, menganalisi, dan mengarsipkannya</li> <li>- Mendata surat yang keluar dan surat yang masuk</li> <li>- Membantu pengetikan surat yang akan dikirim</li> </ul>
18.	Kamis/ 28 agustus 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkliping Koran</li> <li>- Mendata surat yang masuk dan</li> </ul>



21.	Selasa/ 2 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti senam pagi dilapangan Mapolda Jabar</li> <li>- Mengkliping Koran, menganalisis dan mengarsipkannya</li> <li>- Membantu pengetikan surat yang akan dikirim.</li> </ul>
22.	Rabu/ 3 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkliping Koran</li> <li>- Mendata surat yang masuk dan surat yang keluar yang disimpan sebagai arsip</li> </ul>
23.	Kamis/ 4 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkliping Koran</li> <li>- Membuat artikel untuk majalah Gawisa</li> </ul>
24.	Jum'at/ 5 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pengetikan artikel untuk majalah bulanan Gawisa</li> </ul>



27.	Sabtu-Minggu/ 6-7 Agustus 2003	Libur
25.	Senin/ 8 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkliping Koran, menganalisis dan mengarsipkannya</li> </ul>
25.	Kamis/ 11 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendata surat yang masuk dan surat yang keluar</li> <li>- Membantu pengetikan surat yang akan dikirim</li> <li>- Membantu pengetikan surat balasan</li> </ul>
29.	Jumat/ 12 September 2003	Membuat menganalisis dan
26.	Selasa/ 9 september 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti senam pagi dilapangan Mapolda Jabar</li> <li>- Mengkliping Koran</li> <li>- Membantu pengetikan surat balasaan</li> <li>- Membantu pengetikan naskah majalah bulanan Gawisa</li> </ul>



surat yang masuk dari sub bidang lain untuk dimasukkan kedalam data kemudian diarsipkan.



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
SEKRETARIAT UMUM

Klasifikasi : Biasa/Rahasia  
Derajat : Biasa/Kilat

LIMBAR DISPOSISI

Agenda : ND/3618/VIII/03/54

Ditejima Tel. : 25/8 Pukul :

CATATAN SETUJAI		ISI DISPOSISI						
<p>1. <u>KapolDa</u></p> <p>rat dari : <u>Bia humas</u>            nomor : <u>6/ND-275/VIII/03/humas</u>            tanggal : <u>25-8-03</u>            perihal : <u>Penerimaan Klipping koran</u></p>	<p><i>(Handwritten signature: Mubid humas)</i></p> <p><i>(Handwritten signature: Mubid humas)</i></p> <p><i>(Handwritten signature: Mubid humas)</i></p>							
<p>Diketahui</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kemada</th> <th>Tanggal</th> <th>Paraf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Mubid humas</u></td> <td><u>27/8-03</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kemada	Tanggal	Paraf	<u>Mubid humas</u>	<u>27/8-03</u>	
Kemada	Tanggal	Paraf						
<u>Mubid humas</u>	<u>27/8-03</u>							

mpiran/ Tanpa Lampiran

atan : ND/1587 ✓



IAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH JAWA BARAT  
 DINAS PENYERAN

KLASIFIKASI : Biasa / Rahasia

DIRAJAT : Kilat / Segera

LEMBAR DISPOSISI

NDA: 25/1240/12103

DITERIMA TANGGAL: 15/9-03

CATATAN DISPOSISI		ISI DISPOSISI
2809	Uluwatu	<p>Penun!</p> <p>- Irusab le Reskr</p> <p>dan lantab.</p> <p>15/9 03</p>
ARI	Kapolda Jember	
	100/38721/12103	
L	11-9-03	
DITERUSKAN		
A	TGL.	PARAF

N:



#### 2.1.2.2 Mengetik Naskah Majalah Gawisa dan Surat

Pada kegiatan ini penulis mengetik naskah majalah Gawisa yang telah diedit terlebih dahulu oleh bagian humas itu sendiri dan penulis juga mengetik surat yang akan dikirim ke luar/ antara bidang yang lainnya.



### HUBUNGAN HUMAS DENGAN WARTAWAN DALAM MEMBENTUK CITRA YANG BAIK

Sebagai seorang mahasiswi Jurusan Humas, kami menyadari betapa pentingnya arti keterkaitan. Begitu juga sama halnya keterkaitan antara Humas dengan Wartawan di tempat kami melaksanakan Kerja Praktek pada waktu baru-baru ini, yaitu di Bidang Humas Polda Jabar.

Pada dasarnya hubungan Humas dengan Wartawan (cetak dan elektronik) dilandasi oleh proses komunikasi yang efektif, sehingga menghasilkan feed back yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keterkaitan Humas dengan Wartawan ibarat Simbiosis mutualisme, dimana masing-masing pihak saling membutuhkan serta saling melengkapi satu sama lain dalam bekerja sama guna mencapai tujuan. Humas membutuhkan Wartawan dalam mempublikasikan berita-berita atau informasi yang akan disebarluaskan kepada lingkungan, baik itu internal maupun eksternal dan sebaliknya. Sebagai bukti Humas Polda Jabar telah menyelenggarakan suatu kegiatan Eksternal misalnya Penataran Terpadu Fungsi Humas yang mengikut sertakan para Wartawan diberbagai media cetak dan elektronik, yang menghubungkan antara cara kerja Wartawan dengan Humas yang saling melengkapi agar terciptanya citra Humas yang positif. Sedangkan Internalnya adalah dengan mengadakan jumpa pers secara rutin, agar terbinanya hubungan baik antara Wartawan dengan Humas. Humas mempunyai kedudukan yang sangat besar tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas, karena Humas merupakan paling pertama dan utama dalam suatu instansi atau lembaga..

Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Kepala dan Staf Bidang Humas Polda Jabar, yang telah banyak memberikan pengetahuan, dan akan kami jadikan bekal yang sangat berarti dalam menyelesaikan kuliah ataupun pada lingkungan dimana kami bekerja nanti.

Akhir kata semoga seluruh Staf Bidang Humas Polda Jabar selalu menjaga hubungan yang harmonis dalam bekerja sama dengan wartawan maupun dengan pihak lain yang terkait, untuk membentuk citra yang baik.

Wassalam.....

(Endah, Nelly, Susanti)  
Mhs UNIKOM Bandung

NOTA DINAS

No. Pol. : B/ND- 775/VIII/2003/Humas

Kepada : Yth. Kapolda Jabar  
Dari : Kabid Humas Polda Jabar  
Perihal : Penyampaian Kliping Koran.

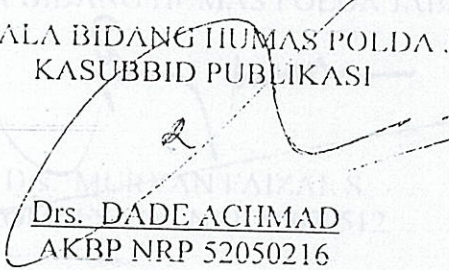
Dasar : Pemberitaan Surat Kabar Harian pusat maupun daerah yang terbit pada tanggal 25 Agustus 2003 di wilayah Polda Jawa Barat.

Dengan ini disampaikan 7 (tujuh) lembar kliping koran bidang sosial, bidang ketertiban, bidang hukum, bidang kriminalitas dan bidang laka lantas.

Demikian untuk menjadi periksa.

Bandung, 25 Agustus 2003

A.n. KEPALA BIDANG HUMAS POLDA JABAR  
KASUBBID PUBLIKASI

  
Drs. DADE ACHMAD  
AKBP NRP 52050216

embusan :  
Kadiv Humas Polri.



### 2.1.2.3 Membuat, menganalisa dan mengarsipkan kliping

Pada kegiatan ini penulis membuat kliping Koran yang diambil dari berbagai media cetak ( Koran ) yaitu pikiran Rakyat, Galamedia, setelah itu penulis menganalisa berita tersebut dan mengarsipkannya yang sewaktu-waktu dapat digunakan kembali.



KORPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

SUMBER : PIKIRAN RAKYAT  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2003 HAL. 2 KOL. 7  
BIDANG : KRIMINALITAS

## "Tagihan" Rp 28 M Dikirim ke Polda

BANDUNG, (PR).-

Polda Jabar diharapkan menangani kasus tagihan dari pihak ketiga (perusahaan rekanan) ke Bagian Umum (Bagum) Pemerintah Kota Bandung yang disebut-sebut merupakan skandal keuangan terbesar karena menyangkut dana sekira Rp 28 miliar. Masyarakat sudah lama menunggu kejelasan atas kasus yang mencuat ke permukaan Oktober 2002 itu.

Hal itu dikemukakan pengurus Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Hilman kepada "PR", Kamis (31/7). Harapan itu disampaikan karena KPM akan mengirimkan data-data soal kasus tersebut ke Polda Jabar. "Setelah KPM mendiskusikan dan mengevaluasi kasus itu, Ketua Syam Taufiq Maulana akhirnya memutuskan untuk menyampaikan data-data itu ke Polda Jabar," ujarnya.

Menurut Hilman, data-data yang rencananya diserahkan ke Polda Jabar itu, sebagian merupakan data yang pernah diangkat media massa, namun sebagian lagi temuan KPM. Data-data dan materinya akan diusahakan selengkap mungkin.

Menurut data yang diterima "PR" dari KPM, kasus itu muncul akibat perbuatan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) antara perusahaan

rekanan dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bandung. Diduga melibatkan enam pejabat dari tingkat sekretaris kota hingga beberapa kepala bagian.

"Kasus itu merupakan gejala buruk bagi pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diharapkan sekali pihak berwajib sesegera mungkin turun tangan guna memeriksa, menyelidiki, dan menyidik kasusnya berdasarkan hukum yang berlaku," tulis KPM seraya mengutip beberapa kejanggalan yang dilihatnya.

Kejanggalan-kejanggalan itu antara lain terlihat dari nilai tagihan yang berkurang. Diketahui, nilai tagihan proyek itu berkurang hingga Rp 8,6 miliar dari yang semula diajukan pihak eksekutif (pejabat) Rp 28 miliar, menjadi Rp 19,4 miliar. Pengurangan terjadi setelah DPRD mengklarifikasi soal itu. Semua itu mengindikasikan adanya kolusi dan persengkokolan untuk me-mark up tagihan secara besar-besaran.

Disebutkan pula, analisis atas dokumen rekapitulasi tagihan ke bagian umum menunjukkan banyaknya proyek dengan satu jenis pekerjaan yang nilainya di atas Rp 50 juta yang dipecah menjadi beberapa SPK (surat perintah kerja) dengan tanggal yang sama dan di-

kerjakan oleh hanya satu perusahaan rekanan.

Siap

Contohnya, proyek pembuatan rak dan lemari multiguna dengan nilai keseluruhan Rp 293,4 juta dipecah menjadi 20 SPK yang dikeluarkan dalam jangka satu hari dan dikerjakan oleh satu perusahaan rekanan sehingga nilai rata-rata per-SPK sebesar Rp 14,8 juta. Diperkirakan, ada sekira 37 jenis proyek yang berkarakteristik seperti itu, dengan tujuan menghindari lelang proyek (tender).

"Dari total tagihan, ternyata Rp 2,17 miliar atau 11,3% dibelanjakan untuk keperluan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Bandung Rp 930 juta atau 4,84% dibelanjakan untuk keperluan bagian umum dan Rp 790 juta atau 4,11% untuk keperluan ruang ketua DPRD," tulis KPM.

Di tempat terpisah, penyidik pol-da di Kesatuan Operasional IV Pol-da Jabar yang mendapat tugas menangani kasus dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, menyatakan siap menangani kasus itu. "Pekerjaan kita sekarang memang banyak, namun kita siap jika pimpinan meminta melakukan penyidikan," ujar seorang penyidik kepada "PR". (A-112)\*\*\*

Dr. Serse

-Sejans (Mama)  
Keanan

11/8



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

MBER : GACANAFOM, METRO BDK.  
HUGAL : 1 AGUSTUS 2003 1190. 1 POC. C.  
JANG : KRIMINALITAS

## Penyiar Radio Jadi Bandar Ekstasi

MAPOLDA, (GM).-

Direktorat Narkoba Polda Jabar meringkus 2 orang pengedar dan pemakai ekstasi yang salah satunya seorang *disc jockey* (DJ) sekaligus sebagai penyiar radio. Kedua tersangka adalah Son (25), warga Jln. Aquarius Turangga, Bandung dan Nop (24), seorang karyawan SE, warga Jln. Talagabodas Bandung.

Ketua Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Dns. Muryan Faizal didampingi Kasat Ops II Dit Narkoba, Kompol Kunto Prasetyo, S.H., Kamis (31/7) mengungkapkan, Son merupakan bandar sekaligus pemakai.

Dari keduanya ditemukan 5 butir ekstasi yang diduga sisa dari penjualan. Kedua tersangka diringkus Dit Narkoba Polda Jabar, Rabu (30/7) malam sekira pukul 21.00 WIB di tempat parkir sebuah diskotek di Jln. Cihampelas Bandung.

Mereka saat digerebek petugas sedang bertransaksi "barang haram" tersebut. "Dari kelima butir ekstasi itu, hanya sisa dari penjualan, sangat mungkin sekitar 50 butir ekstasi atau lebih pada mulanya ada di tangan Son. Menu-  
rup pengakuannya, ia sudah 1,5

tahun menekuni bisnis barang haram itu," ungkap Muryan.

Ditambahkannya, setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan, Son membeli "barang setan" itu seharga Rp 90 ribu dari "Stadium" di Jakarta dan dijual lagi di Bandung sebesar Rp 125.000. "Modus tersangka memang agak ditopang dengan masalah ekonomi. Dari hasil gaji dia sebagai karyawan, mana cukup untuk membiayai hidupnya, apalagi untuk membiayai keluarganya?" tutur Muryan.

Muryan menyatakan, pernyataan Son yang mengaku membeli barang haram itu di Jakarta, hanyalah modus belaka. "Ini justru akal liciknya untuk mengelabui petugas supaya petugas tidak lagi melakukan pengembangan dan penyelidikan karena memang ini sangat menyulitkan," ujarnya.

Namun, lanjutnya, kendati demikian pihaknya akan terus melakukan pengembangan meski yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) petugas berada di Jakarta. "Sebenarnya, masalah ini merupakan hal yang sangat unik dan jarang. Pasalnya, selama ini jarang ada seorang DJ yang melakukan bisnis haram itu," katanya. (B.96)\*\*



SUMBER : *Cap. 1, 16, 17, 18*  
TANGGAL : *1. April 1999* *Hal. 2, kol. 3*  
BIDANG : *Kepolisian*

## Kapolri, "Gangguan, Ancaman Meningkat"

### MAPOLDA, (GM).-

Saat ini, kondisi Negara Indonesia masih diwarnai dengan gangguan, ancaman, dan tantangan. Dari waktu ke waktu cenderung semakin meningkat dan sangat kompleks. Dampak reformasi dan proses demokrasi justru memperkeruh situasi dan meresahkan masyarakat karena arti reformasi dan demokratisasi sudah kebablasan dan tidak terkontrol lagi.

Demikian diungkapkan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Da'i Bachtiar, S.H. dalam sambutannya yang dibacakan Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. H. Dadang Garnida, S.H., M.B.A. pada acara pembukaan pendidikan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2003 di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Cisarua Bandung, Senin (4/8).

"Di samping itu juga, Polri masih dihadapkan dengan semakin meningkatnya kejahatan transnasio-

nal, seperti peledakan bom, penyalahgunaan senjata api, dll. Di sinilah Polri dituntut untuk mampu menjawab berbagai tantangan tadi. Salah satunya dengan mengedepankan sikap dan perilaku simpatik, juga tindakan tegas," kata kapolri.

Selain itu, lanjutnya, Polri juga dituntut untuk memberikan rasa aman, tertib, dan nyaman kepada masyarakat, sesuai dengan paradigma baru Polri, yakni pelayanan, perlindungan, dan pengayom masyarakat.

"Yang selalu dekat dan menyatu dengan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang profesional, terampil, dan proporsional, senantiasa menjunjung tinggi HAM (hak asasi manusia) dan rasa keadilan," ujarnya.

Karena itu, masih menurut Kapolri, proses pendidikan untuk membentuk Bintara Polri, memi-

liki peran yang sangat menentukan dalam mempersiapkan kekuatan personel pada institusi Polri dan jajarannya. Bahkan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas Polri di masyarakat akan banyak diwarnai oleh para bintanga lulusan pendidikan pembentukan Bintara Polri karena jumlahnya lebih banyak.

"Dengan kurikulum pendidikan pembentukan Bintara Polri yang baru, yakni dilakukan secara terpusat, diharapkan Bintara Polri benar-benar siap pakai, terampil, dan mampu beradaptasi serta menyatu dengan masyarakat," terangnya.

Kapolri menambahkan, pendidikan yang dilaksanakan secara rutin selama 5 bulan sekali merupakan salah satu upaya Polri dalam memenuhi kebutuhan organisasi di bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk itulah, diharapkan Polri mampu meng-

hasilkan personel di lapangan yang secara kuantitas mendekati rasio 1:750 dibandingkan jumlah penduduk.

Pendidikan Pembentukan Bintara Polri tersebut diikuti oleh 1.125 orang. Sebelum upacara, dilakukan peletakan batu pertama oleh kapolda untuk pembangunan Masjid Nuru! Falah di lingkungan SPN Cisarua. Masjid tersebut akan dibangun di atas lahan 418 meter persegi dan diharapkan dapat menampung 1.500 jemaah.

Dalam sambutannya, Dadang menjelaskan, di samping masjid sebagai sarana untuk beribadah, diharapkan juga sebagai sentra umat dan sebagai pusat kebudayaan dan pembinaan umat.

Selain dihadiri para pejabat Kota Bandung, acara tersebut juga dihadiri para kapolwil, kapolres, dan unsur pimpinan Polda Jabar. (B.96)\*\*



TEMPER : METRO BANDUNG  
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2003, HAL. 2, KOL. 2  
DANG : KRIMINALITAS

## Polisi Razia VCD Bajakan Para Penjual Belum Berniat Tutup Dagangan

Bandung, Metro

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Hak Cipta, apa-apa kepolisian Bandung Timur mulai menggelar razia VCD bajakan, akhir pekan kemarin. dikitnya, belasan ribu keping VCD bajakan --beberapa di antaranya VCD film porno-- berhasil disita jajaran Reskrim Polresta Bandung Timur dari beberapa VCD rental di kawasan Anjani, Margacinta, dan Gebage.

"Penindakan ini kami lakukan hadap mereka yang terlibat

dalam penggandaan, penjualan, serta pengedaran. Pokoknya, setelah pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta itu secara maraton kita akan terus menumpas peredaran VCD bajakan," tegas Kapolresta Bandung Timur, AKBP Nandang didampingi Kasatreskrim Polresta Bandung Timur AKP Jogi Nainggolan SH, Sabtu lalu.

Saat ini, pihak Polresta Bandung Timur tengah memeriksa para pemilik rental di antaranya Agus, Iin Solihin, Elbi Iman W, serta Kurdiana. Dari keempat

pemilik rental tersebut pihak Polresta Bandung Timur akan terus mengembangkan proses peredaran termasuk memburu para pengganda VCD bajakan.

Namun di sisi lain, razia VCD di wilayah Bandung Timur tidak terlalu berpengaruh bagi para pedagang VCD di sepanjang Jalan Ahmad Yani Cicadas, Jalan Ibrahim Adjie (Kiaracandong) dan Jalan Dalem Kaum. Dari pantauan Metro, Sabtu (2/8) hingga pukul 18.00, para penjual VCD ini justru semakin ramai

dikunjungi orang.

"Yah saya memang sudah dengar bakal adanya razia VCD bajakan, tapi gimana lagi, ini satu-satunya mata pencaharian saya," kata Asep, seorang pedagang VCD di Jalan Kiaracandong.

Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa pedagang VCD di sepanjang Jalan Dalem Kaum. Menurut Aan, para pedagang VCD di sekitar alun-alun sudah mendengar akan adanya razia beberapa hari lalu, tetapi mereka belum berniat menutup dagangannya. (hen/ee)



BER : *Grada Media*  
JAL : *4 Agustus 2003, Hal. I, kol. 1.*  
NG : *Keterlibatan*

## Termasuk 4 Pria Hidung Belang

### STASIUN SELATAN, (GM).-

Sebanyak 34 penjaja seks komersial (PSK) dan lelaki hidung belang digaruk petugas Polsekta Andir di Jln. Stasiun Selatan dan Terminal Stasiun KA Bandung, Sabtu (2/8) malam sekira pukul 21.30 WIB. Para PSK dan lelaki hidung belang tersebut, saat ditangkap tengah melakukan transaksi. Bahkan, ada pula yang telah selesai melakukan kencan.

Menurut Kapolresta Bandung Barat, AKBP Eddy Mulyono melalui Kapolsekta Andir, AKP Dicky Budiman, razia terhadap PSK di Jln. Stasiun Selatan dan Stasiun Hall sudah sering dilakukan. Namun, lanjutnya, baru kali ini petugas berhasil menangkap sebanyak 30 PSK dan 4 lelaki hidung belang. "Biasanya kami hanya bisa menangkap paling banyak 15 atau 20 PSK. Itu pun penangkapannya dirasakan sulit sekali," ungkap Dicky.

Ditambahkannya, para penjaja seks tersebut merupakan pemain lama dan sering digaruk petugas. Namun, kebanyakan dari mereka tidak merasa jera. Padahal, setelah ditangkap dan dilakukan tindak pidana ringan (tipiring), terkadang para PSK dikirim ke pusat rehabilitasi PSK di Palimanan, Cirebon.

Dicky juga menambahkan, selama melakukan razia PSK, pihaknya sering mendapat kesulitan, terutama dari penduduk yang tinggal di sekitar Stasiun Bandung. "Seperti pada razia kali ini, banyak PSK yang lari menyelamatkan diri ke rumah-rumah penduduk," tutur Dicky.

Bahkan, ujar Dicky pula, para PSK pun menyewa tempat di rumah-rumah penduduk untuk melakukan kencan selain menyewa kamar di hotel yang ada di wilayah Stasiun KA Bandung. Sedangkan tempat mangkal para PSK tersebut, ungkap Dicky, selain di warung remang-remang, mereka sering juga terlihat mangkal di pinggir jalan dan di depan rumah-rumah penduduk.

"Banyak dari mereka yang sengaja mangkal di depan rumah penduduk, agar disangka bukan PSK, me-

dasnya.

Menurut rencana, ungkap kapolsek, ke-30 PSK yang terjaring tersebut akan dikirim ke Palimanan, Cirebon untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Namun sebelumnya, Polsek Andir akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Jabar, apakah para PSK tersebut bisa ditampung atau tidak.

"Kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinsos Jabar, apakah para PSK tersebut bisa ditampung atau tidak," tegas Dicky seraya menambahkan, sambil menunggu keputusan dari Dinsos Jabar, para PSK tersebut akan ditahan terlebih dahulu selama dua hari.

Menurut petugas yang melakukan pendataan, para PSK yang terkena razia malam kemarin, merupakan para pemain lama dan rata-rata berusia 18-40 tahun. Bahkan, tambahannya, ada pula seorang PSK yang telah berusia 42 tahun dan telah memiliki 7 anak serta 4 cucu.

"Dia sudah 13 tahun hidup di jalanan sebagai PSK dengan berkedok sebagai tukang *kiridit* barang dan ada pula yang sebagai pedagang mi rebus," katanya.

Seperti Ima (42), nama samaran, ima mengaku berasal dari Kabupaten Bandung dan telah melakukan profesi sebagai PSK selama lebih kurang 13 tahun dengan berkedok tukang kredit. "Saya terpaksa melakukan pekerjaan ini, hanya untuk membiayai ketujuh anak dan empat cucu saya. Walaupun mereka hanya mengetahui saya bekerja sebagai tukang kredit," paparnya.

Ima pun mengaku segera akan berhenti. "Saya ingin berhenti dan bertobat, tapi saya tidak mau dikirim ke Palimanan," ujarnya.

Rasa takut dikirim ke pusat rehabilitasi PSK di Palimanan, Cirebon, dirasakan pula oleh para PSK lainnya. Umumnya, mereka tidak mau tinggal di pusat rehabilitasi tersebut terlalu lama. "Kasihlah anak kami perlu makan," ungkap mereka (B.81/B.90/B.80)\*\*



SUMBER : *Gratia Media*  
TANGGAL : 6 Agustus 2003. Hal. 5. Kol. 3.  
BIDANG : Hukum

### Berkaitan Kasus KKN

# Polda akan Panggil Anggota DPRD Bogor

#### MAPOLDA, (GM).-

Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar akan memanggil 42 anggota DPRD Kabupaten Bogor, berkaitan dengan kasus korupsi sebesar Rp 1,2 miliar. Uang tersebut diduga diselewengkan untuk menyuap anggota DPRD Kab Bogor, dalam laporan pertanggungjawaban bupati pada 2001-2002.

Namun, sampai saat ini Dit Reskrim Polda Jabar merasa kesulitan memanggil ke-42 anggota dewan tersebut karena surat yang dilayangkan kepada Gubernur Jabar Danny Setiawan belum mendapat respons.

"Padahal, surat persetujuan tertulis guna pemeriksaan anggota DPRD Kab. Bogor periode 1999-2004 sudah dilayangkan kepada gubernur pada 15 Juli lalu," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Drs. Muryan Faizal di-

dampingi Kasat Ops. IV Dit Reskrim AKBP Ahmad Nurdin kepada wartawan di Mapolda Jabar, Selasa (5/8).

Menurut Muryan, dana sebanyak Rp 1,2 miliar tersebut berasal dari kas anggaran pemerintah belanja daerah (APBD) Kab. Bogor dan telah dibagi-bagikan kepada anggota DPRD untuk meloloskan atau menyetujui laporan pertanggungjawaban Bupati Kab. Bogor, Agus Utama. Namun, dalam pembagian uang itu ada beberapa anggota dewan yang menolak.

"Meski sangat sulit memanggil ke-42 orang anggota dewan itu, namun kami berhasil memeriksa sekitar 7 orang staf DPRD Kab. Bogor," jelas Muryan.

Lebih lanjut ia menegaskan, ketujuh orang staf tersebut adalah sekretaris dewan, kabag keuangan dewan, kasubag keuangan dewan,

bendahara DPRD, kasub bid kas daerah, bendaharawan pemda dan atasan langsung bendahara.

"Untuk masalah KKN ini, Polda Jabar akan selalu serius menangannya. Selain itu, akan konsisten dan konsekuen memeriksanya sesuai undang-undang yang berlaku dengan salah satu janji Kapolda Jabar, beberapa waktu lalu untuk memberantas kasus KKN dengan serius," terangnya.

Saat ditanya tentang kesulitan memanggil ke-42 orang anggota DPRD karena belum direspons Gubernur Jabar, Muryan menjelaskan, sebenarnya hal tersebut bukan sebuah kendala dalam menangani kasus ini.

"Tah, semuanya sudah mempunyai dan mengerti terhadap prosedur masing-masing. Begitu juga dengan gubernur, mungkin tinggal menunggu waktu yang tepat saja," ujarnya. (B.96)\*\*

*Check Log*



IMBER : *Pikiran Rakyat*  
ANGGAL : *6 Agustus 2003 Hal. 2, Kol 7*  
DANG : *Keterbukan*

## Konvoi Kendaraan PT DI ke Jakarta tak Terbukti

BANDUNG, (PR).-

Arus lalu lintas di kawasan Padalarang yang diperkirakan akan mengalami kemacetan akibat tersiarinya isu para karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan melakukan aksi konvoi kendaraan menuju Jakarta ternyata tidak terbukti. Bahkan, situasi lalu lintas di sejumlah ruas berjalan normal dan lancar.

Sebagaimana pantauan "PR" di lapangan, Selasa (5/8), arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan menuju tol Padaleunyi maupun Jalan Raya Padalarang dan Purwakarta (Tagogapure-red.) terlihat normal. "Situasi arus lalu lintas untuk hari ini masih aman dan terkendali tidak ada lonjakan volume kendaraan," ujar Kapolres Bandung AKBP Drs. Edward Syah Pernong, S.H., didampingi Kasat Lantas, AKP Sadiman, saat ditemui di Pos Pantau Padalarang.

Dikatakan Kapolres dengan munculnya isu akan adanya konvoi kendaraan yang dilakukan karyawan PT DI menuju Jakarta, pihaknya tidak melakukan pengamanan khusus. Alasannya, sejak pekan lalu menjelang Asian Afrika Sub-Regional Organizing Conference (AASROC) 2003 di Gedung Merdeka Bandung dan Sidang Tahunan (ST) MPR/DPR 2003 di Jakarta, telah digelar Operasi Mantap Brata XI.

"Pengamanan yang dilakukan saat ini masih merupakan rangkaian pengamanan Operasi Mantap Brata XI yang akan digelar selama 15 hari. Jadi dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan pengamanan untuk me-

ngantisipasi kemungkinan konvoi karyawan PT DI," tegasnya.

Lebih jauh dikatakan kapolres, operasi yang dilakukan jajaran Polres Bandung melibatkan seluruh personel dari Dalmas, unit intel, serse, Tim Khusus Antibandit (Tekab), dan lalu lintas. Selain itu, operasi juga melibatkan unsur TNI dan masyarakat.

Khusus di wilayah hukum Polres Bandung, Kapolres menegaskan, selama Operasi Mantap Brata XI berlangsung, sejumlah obyek vital akan menjadi sasaran, termasuk di dalamnya rumah-rumah pejabat dewan, tokoh partai politik, dan sejumlah tempat rawan. Sementara itu, khusus penanganan lalu lintas, pihaknya menetapkan beberapa titik rawan, di antaranya jalur Padalarang, Lembang, Nagreg, Cilunyi, dan Cimahi.

Mengenai rencana ribuan karyawan PT DI yang akan melakukan konvoi, baik Kapolres maupun Kasat Lantas menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap pelaku pelanggaran. "Bila mereka melanggar dan mengganggu ketertiban umum, kami akan bersikap tegas," ujarnya.

Dikatakan Kapolres, bahwa untuk maksud para karyawan PT DI yang akan melakukan konvoi kendaraan ke Jakarta pihaknya tidak akan menghalang-halangi. Namun, pihaknya tidak akan tinggal diam bila dalam pelaksanaannya para peserta mengganggu ketenangan dan ketertiban umum.

Terhadap rencana para karyawan PT DI tersebut, kapolres meng-

atakan dan meminta agar para pihak mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Hal tersebut di ingatkan kapolres dengan pertimbangan situasi saat ini yang kurang kondusif.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bandung, AKP Sadiman mengatakan sejak dirinya dipercaya menjabat Kasat Lantas berbagai upaya pengamanan dan penertiban telah dilakukan. "Bahkan, hal tersebut sudah mulai dirasakan oleh para pengguna jalan, di mana ruas jalan Padalarang yang dulu terkenal padat kendaraan kini lancar bahkan setiap Sabtu dan Minggu atau hari libur meskipun padat, tapi lancar dan terkendali," ujarnya.

Dikatakan Sadiman, upaya yang dilakukannya dalam mengatasi masalah lalu lintas, khususnya di Padalarang, pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh pihak pengguna jalan seperti Korut delman, angkutan umum, maupun pedagang. Bahkan, untuk kelancaran telah di sepakati aturan jam bagi pengguna jalan seperti delman, angkutan dan aktivitas pedagang di pinggir jalan.

Sementara itu, untuk jadwal operasi kendaraan peti kemas masih berlaku ketentuan, yaitu kendaraan baru boleh jalan terhitung pukul 21.00 WIB hingga 5.00 WIB dan hari Sabtu, Minggu, serta libur nasional dilarang beroperasi total. "Hasilnya, jalan Padalarang lancar. Kalaupun arus kendaraan padat, tapi masih berjalan, itu pun pada pagi hari saja saat aktivitas pasar," ujarnya. (A-87)\*\*\*



SUMBER : *Graha Media*  
ANGGAL : *7 Agustus 2003. Hal. 1, Kol. 7*  
IDANG : *Keterlibatan*

## Pola Kerja Teroris Seperti Setan **Warga Jabar Waspada**

### GEDUNG SATE, (GM).-

Masyarakat Jawa Barat diminta waspada dan menjaga keamanan lingkungan sekitar masing-masing, sehubungan dengan terjadinya peledakan bom di depan Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (5/8).

Demikian pernyataan bersama Gubernur Jawa Barat Drs. H. Danny Setiawan, M.Si., Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. H. Dadang Garnida, dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Iwan R. Sulandjana kepada wartawan se usai rapat kerja muspida di Aula Basement Gedung Sate Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (6/8).

Menurut kapolda, masyarakat diminta waspada terutama saat berada di tempat-tempat keramaian karena pola kerja teroris sangat pandai memanfaatkan situasi. Sebab, pola kerja teroris seperti setan yang selalu muncul tiba-tiba di mana pun dan mengagetkan masyarakat. "Peristiwa ini bukan keco-longan, namun karena pola kerja teroris itu seperti setan dan muncul sewaktu-waktu di mana pun," kata Dadang.

Menurut Dadang, pihaknya sudah menyatakan siaga I untuk daerah hukum Provinsi Jawa Barat sejak sehari sebelum diselenggarakannya

Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 di Jakarta. "Dalam rangka ST MPR tersebut kita menyatakan Jawa Barat dalam keadaan siaga I," kata Dadang Garnida.

Dadang menyatakan, pihaknya sudah mengetahui anatomi kerja terorisme namun untuk mengantisipasi tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat. Tapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana anatomi pola kerja terorisme itu. Masyarakat hanya diminta kewaspadaannya dan tindakan preventif dalam mengantisipasi masalah teror bom itu.

Ditambahkan Dadang, masalah terorisme dengan teror bom di mana-mana menjadi keresahan bagi dirinya selain masalah lainnya. Khusus di Jawa Barat, masalah yang paling meresahkan stabilitas keamanan adalah ulah geng motor, perampokan nasabah bank, dan aksi-aksi teror bom melalui bahan peledak.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Drs. Danny Setiawan menyatakan, rapat kerja muspida ini tidak dilaksanakan secara khusus untuk mengantisipasi bom namun merupakan agenda rutin yang biasa dilakukan. "Memang tadi sempat dibahas dampak peledakan bom di Jakarta," kata Danny.

### Pengusaha hotel

Sementara itu, Wakapolda Jabar, Brigjen Polisi Drs. Darmadji S.W., mengimbau kepada para pengusaha hotel dan pengusaha lainnya untuk segera membeli *metallic detector*. Hal itu sebagai antisipasi pengamanan lingkungan, berkaitan dengan ledakan bom di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (5/8).

"Dengan adanya *metallic detector*, setidaknya ada hal mencurigakan akan segera terdeteksi. Hal ini sekaligus menjaga atau memperkuat keamanan lingkungan masing-masing. Sebab, dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak diinginkan, seperti ledakan bom di Jakarta itu," kata Darmadji saat ditemui "GM" di ruangannya Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (6/8).

Menurut Darmadji, alat tersebut, selain mampu mendeteksi bahan-bahan berupa logam atau bahan peledak lainnya, juga mampu melihat wajah/muka orang mencurigakan. Maka dari itu, jika pengusaha atau di setiap hotel, perusahaan dan tempat-tempat vital memiliki alat ini, setidaknya akan menimbulkan rasa aman.

Ditegaskannya, kendati *metallic detector* harganya cukup mahal, namun kemahalan itu tidak akan sebanding dengan harga keselamatan. Maka untuk menjaga keselamatan itulah, para pengusaha hotel atau pengusaha lainnya, alangkah baiknya membeli alat pengamanan yang harganya mencapai Rp 7,5 juta tersebut.

Dalam pembelian *metallic detector*, Darmadji mengimbau, jangan sampai terkecoh dan membeli barang tak bermutu. "Pilihlah barang yang berkualitas dan bagus agar mencapai hasil maksimal," imbuhnya.

Di samping mengimbau kepada pengusaha untuk membeli *metallic detector*, menurut Darmadji, pihak jajaran Polda Jabar akan terus meningkatkan dan memperkuat keamanan di sejumlah tempat-tempat vital. Di samping itu, pihaknya akan selalu mengerahkan patroli, baik siang maupun malam hari. "Mengetahui pengamanan sudah barang tentu pihak kami akan mengerahkan dengan berbagai upaya untuk mewaspadainya, termasuk menambah personel," terang Darmadji. (B.83/B.96)\*\*



R : Pikiran Rakyat  
AL : 7 Agustus 2003, Hal 1, Kol 3.  
G : Ketertarikan

## Polda Jabar Akan Ambil Alih Pengendalian Keamanan PT DI

G. (PR).-

Bar secara bertahap akan alih pengendalian lingkungan PT Dirgantara (PT DI) dari tangan Direksi PT DI juga separikan izin kepada ribuan yang diumumkan untuk ambil barang-barang penting tertinggal di ruang lingkungan PT DI. Sudah meminta agar pihak ikut membantu karena AU di PT DI akan jadi, di sana nanti kita di depan sebagai pelapangan," kata Kapolden Pol. Drs. Dadang dalam keterangannya keusai pertemuan DPRD in Direksi PT DI, di rumah dewan, Rabu (6/8), mengaku lingkungan PT kan wilayah VVIP TNI arena itu, ada ketentuan bagaimana mengalah-daerah seperti itu, u memang asetnya TNI ungkin ada kekhawatiran. Tetapi, saya akan kan membantu karena ah meminta pihak keuk itu," katanya.

terangan pers yang di DPRD Jabar Eka San-jumlah anggota dewan r Operasi dan Niaga PT uraskito menegaskan anan aset, PT DI sebe-pilih-pilih. "Mau Polri U, yang penting ada pi-nan. Kalaupun saat ini n di sana diambil TNI PT DI memang berada ig 3 wilayah TNI AU,"

Budi, yang kehadiran D Jabar mewakili Dirut win Soedarmo yang ada di Jakarta untuk egosiasi pendanaan de-Mandiri dan persiapan n RUPS PT DI, pihak akan berupaya mem-hak karyawan selama n. Termasuk hak as barang-barang pribat-tinggal di perusahaan. nya kami sudah mene-sedur pengambilan ng milik karyawan itu. u akan kami sosialisasikan, tetapi situasinya mpkinkan. Kami akan

sanakan, paling lambat Senin de-pan, para karyawan secara bertahap sudah dapat mengambil barang-barangnya kembali," kata Budi.

Budi mengatakan keputusan merumahkan karyawan PT DI pada dasarnya sudah didukung melalui KKS (komite kebijakan sektor keuangan) lima menteri dan sudah dikonsultasikan dengan presiden. Soal apakah keputusan merumahkan karyawan itu menyalahi undang-undang atau tidak, kata Budi, pihak direksi dan karyawan sepakat untuk menyerahkan kepada keputusan PTUN.

Dia juga mengatakan kunci penyelesaian kemelut PT DI bergantung pada hasil rapat umum pemegang saham. "Jadi, kuncinya memang ada di RUPS, dan kita semua menunggu RUPS itu. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan secepatnya. Pihak Kementerian BUMN sendiri sudah mengindikasikan bahwa RUPS PT DI bisa dilaksanakan minggu ini, atau paling lambat awal minggu depan," ujarnya.

Dibahas muspida kemelut di tubuh PT DI se-belumnya juga sempat dibahas dalam rapat Muspida Jabar di Gedung Sate, Rabu (6/8). Rapat yang dipimpin Gubernur Jabar Danny Setiawan dihadiri Pangdam III Siliwangi, kapolda, kajari, ketua pengadilan tinggi, dan Ketua DPRD Jabar.

Seusai pertemuan, kepada pers, gubernur mengharapkan kepada karyawan PT DI agar tidak melakukan unjuk rasa melibatkan massa dalam jumlah besar. "Untuk menyampaikan aspirasi, tentunya tidak harus dipersonifikasikan melalui unjuk rasa besar-besaran seperti itu karena cost sosialnya cukup tinggi. Saya pikir lewat perwakilan sepuluh sampai dua puluh karyawan akan lebih efektif dan efisien, di samping tidak mengganggu ketertiban umum," katanya.

Gubernur mengakui pemprov memang tidak punya kompetensi untuk memasuki inti permasalahan yang terjadi di PT DI. Tetapi, Danny merasa yakin pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin agar PT DI bisa bangkit kembali. "Jadi, kita sebaiknya sabar dan ini pasti akan diatasi," katanya.

Danny juga mengaku sudah menyampaikan saran kepada presiden agar pemda, terutama pemprov di Indonesia dilibatkan dalam upaya memperkuat permodalan PT DI melalui kepemilikan saham. "Saya menyarankan selain membentuk konsorsium beberapa negara ASEAN, pemda terutama pemerintah provinsi di Indonesia, juga bisa dilibatkan menjadi stakeholder PT DI. Saya pikir, kalau memang menguntungkan, kenapa tidak," lanjut gubernur.

Tuntaskan segera Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Eka Santosa menyampaikan keprihatinan mendalam para anggota dewan atas kemelut yang terjadi di PT DI. Oleh karena itu, dewan mendesak pemerintah pusat agar segera mengambil langkah-langkah dan solusi terbaik sehingga kemelut di PT DI bisa segera diselesaikan. "Sebagai salah satu aset kebanggaan Jabar, kami ingin agar PT DI bisa kembali berjaya," katanya.

Rapim yang dihadiri Direksi PT DI dan Kapolda Jabar, kata Eka, juga sepakat bahwa institusi yang paling bertanggung jawab dan terdepan dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai kemungkinan yang menyangkut keamanan di PT DI adalah pihak Polri.

Menurut Eka, rapim sepakat seluruh karyawan PT DI harus mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku terhadap karyawan dalam status dirumahkan. "Termasuk hak atas barang-barang pribadi milik karyawan yang tertinggal di PT DI," katanya.

Ketika pertemuan membahas kemelut PT DI di Gedung Sate dan gedung dewan berlangsung, seribu lebih karyawan PT DI menggclar unjuk rasa di luar halaman depan kompleks Gedung Sate. Para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT DI tersebut yang datang mengendarai ratusan sepeda motor ituberharap bisa berdialog langsung dengan Direksi PT DI yang datang ke Gedung DPRD Jabar memenuhi undangan dewan.

Ketika pertemuan Direksi PT DI dengan pimpinan DPRD berlangsung di ruang kerja ketua dewan, sejumlah karyawan PT DI terlihat bergerombol di luar ruangan. Sebagian di antara mereka pun terlihat dalam jumpa pers yang dilaksanakan di ruang panmus sesuai pertemuan.

Setelah pertemuan dengan wartawan berakhir, mereka mengerubungi dan meminta kesediaan Direktur Operasi dan Niaga PT DI Budi Wuraskito untuk berdialog dengan para karyawan PT DI yang saat itu sedang berunjuk rasa di halaman luar DPRD Jabar, di Jln. Diponegoro.

Setelah lama dibujuk, bahkan diberikan jaminan tidak ada tindakan anarkis dari pengunjuk rasa, Budi pun terlihat bersedia memenuhi keinginan para karyawan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika para karyawan PT DI beranjak meninggalkan ruang panmus melalui pintu belakang, Budi tidak mengikuti mereka. Dikawal sejumlah petugas kepolisian, Budi malah meninggalkan mereka melalui pintu depan dan langsung menuju kendaraan yang meninggalkan gedung DPRD. (A-42)\*\*\*



SUMBER : *Dikirim Rakyat*  
TANGGAL : *7 Agustus 2003, Hal. 2, Kol. 7*  
BIDANG : *Sosial*

Kapolwiltabes Menyambut Gembira

## Mahasiswa ITB "Bedah" Kinerja Kepolisian

BANDUNG, (PR).-

Sedikitnya 500 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dari berbagai jurusan "menyerbu" Polwiltabes Bandung, Rabu (6/8). Selanjutnya, mereka "membedah" kinerja institusi pengaman dan penertib bangsa itu.

Terbagi ke dalam 5 kelompok kerja, sebelumnya mereka melakukan studi ke lapangan guna "menanyai" sejumlah responden. Mulai dari masalah kemacetan lalu lintas yang tak kunjung usai, kinerja satuan reserse, pengamanan wilayah, hingga pro dan kontra soal tayangan kriminalitas di layar televisi. *Walhasil*, kemarin, polisi benar-benar "dibedah".

"Ya, sengaja kita memberikan tugas itu kepada anak-anak agar mereka memahami apa sebenarnya persoalan yang kini dihadapi masyarakat. Terutama, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang bersinggungan dengan wewenang kepolisian," ungkap Chairil, salah seorang dosen ITB.

Sementara itu, ditemui "PR" di sela-sela "pembedahan" terhadap institusinya itu, Kepala Polwiltabes

Bandung Kombes Pol. Drs. Hendra Sukmana menyatakan dirinya menyambut gembira kehadiran ratusan mahasiswa itu. "Pertemuan ini merupakan sarana kita untuk menjelaskan bagaimana *sih* sebenarnya kinerja kepolisian itu. Dengan demikian, mereka tidak lagi berapriori terhadap para petugas di lapangan," ujarnya seraya menambahkan bahwa pertemuan itu merupakan kali ketiga dilaksanakan Polwiltabes dan ITB.

Ia menegaskan bahwa polisi memerlukan upaya-upaya untuk menyosialkan tugas-tugas kepolisian kepada masyarakat. Meskipun demikian, dirinya menolak jika institusinya "ditelanjangi" sedemikian rupa. "Saya pikir institusi kita memerlukan penyosialan kepada masyarakat soal tugas-tugas, tetapi tidak secara mendetail. Pasalnya, tidak semua kinerja petugas mesti diketahui oleh khalayak, terutama berkaitan dengan kinerja intel. Kalau hal itu juga kita "keluarkan", tentu kita akan terus kecolongan," selorohnya.

5 masalah pokok  
Setidaknya dalam "pembedahan"

itu -- terdapat 5 masalah yang diusung para mahasiswa untuk dikonfirmasi kepada petugas. Dari kelima masalah itu terdapat 3 masalah yang berkaitan dengan lalu lintas, sedangkan yang lainnya masalah pengamanan dan tayangan kriminal di layar televisi.

Ketiga masalah yang berkaitan dengan lalu lintas, Polwiltabes mendaftarkan Kasatlantas AKBP Drs. M. Ikhsan untuk menjawab. "Soal kemacetan, mereka mengambil sampel penelitian di Jalan Pasirkaliki. Bagus sekali, saya salut dengan kejelian mereka menangkap persoalan di jalan raya," komentar Ikhsan yang saat itu didampingi Kanit Kece-lakaan Lalu Lintas AKP Haswendi.

Untuk menjawab masalah-masalah berkenaan dengan pengamanan dan kinerja reserse, Polwiltabes mendaftarkan "pakar senjata" dari Satuan Brimob Polda Jabar AKP A. Saefuddin dan Kabag Reskrim Polwiltabes AKBP Drs. Masguntur Laope, S.H. Sementara itu, untuk menjawab soal tayangan kriminalitas di layar televisi, Polwiltabes mendaftarkan koresponden RCTI di Bandung, Hilmi Hatta. (A-125)\*\*\*



SUMBER : *Pikiran Rakyat*  
TANGGAL : *7 Agustus 2003, Hal. 2, Kol. 7*  
BIDANG : *Sosial*

Kapolwiltabes Menyambut Gembira

## Mahasiswa ITB "Bedah" Kinerja Kepolisian

BANDUNG, (PR).-

Sedikitnya 500 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dari berbagai jurusan "menyerbu" Polwiltabes Bandung, Rabu (6/8). Selanjutnya, mereka "membedah" kinerja institusi pengaman dan penertib bangsa itu.

Terbagi ke dalam 5 kelompok kerja, sebelumnya mereka melakukan studi ke lapangan guna "menanyai" sejumlah responden. Mulai dari masalah kemacetan lalu lintas yang tak kunjung usai, kinerja satuan reserse, pengamanan wilayah, hingga pro dan kontra soal tayangan kriminalitas di layar televisi. *Walhasil*, kemarin, polisi benar-benar "dibedah".

"Ya, sengaja kita memberikan tugas itu kepada anak-anak agar mereka memahami apa sebenarnya persoalan yang kini dihadapi masyarakat. Terutama, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang bersinggungan dengan wewenang kepolisian," ungkap Chairil, salah seorang dosen ITB.

Sementara itu, ditemui "PR" di sela-sela "pembedahan" terhadap institusinya itu, Kepala Polwiltabes

Bandung Kombes Pol. Drs. Hendra Sukmana menyatakan dirinya menyambut gembira kehadiran ratusan mahasiswa itu. "Pertemuan ini merupakan sarana kita untuk menjelaskan bagaimana *sih* sebenarnya kinerja kepolisian itu. Dengan demikian, mereka tidak lagi berapriori terhadap para petugas di lapangan," ujarnya seraya menambahkan bahwa pertemuan itu merupakan kali ketiga dilaksanakan Polwiltabes dan ITB.

Ia menegaskan bahwa polisi memerlukan upaya-upaya untuk menyosialkan tugas-tugas kepolisian kepada masyarakat. Meskipun demikian, dirinya menolak jika institusinya "ditelanjangi" sedemikian rupa. "Saya pikir institusi kita memerlukan penyosialan kepada masyarakat soal tugas-tugas, tetapi tidak secara mendetail. Pasalnya, tidak semua kinerja petugas mesti diketahui oleh khalayak, terutama berkaitan dengan kinerja intel. Kalau hal itu juga kita "keluarkan", tentu kita akan terus kecolongan," selorohnya.

5 masalah pokok  
Setidaknya- dalam "pembedahan"

itu -- terdapat 5 masalah yang diusung para mahasiswa untuk dikonfirmasi kepada petugas. Dari kelima masalah itu terdapat 3 masalah yang berkaitan dengan lalu lintas, sedangkan yang lainnya masalah pengamanan dan tayangan kriminal di layar televisi.

Ketiga masalah yang berkaitan dengan lalu lintas, Polwiltabes mendaftarkan Kasatlantas AKBP Drs. M. Ikhsan untuk menjawab. "Soal kemacetan, mereka mengambil sampel penelitian di Jalan Pasirkaliki. Bagus sekali, saya salut dengan kejelian mereka menangkap persoalan di jalan raya," komentar Ikhsan yang saat itu didampingi Kanit Kece-lakaan Lalu Lintas AKP Haswendi.

Untuk menjawab masalah-masalah berkenaan dengan pengamanan dan kinerja reserse, Polwiltabes mendaftarkan "pakar senjata" dari Satuan Brimob Polda Jabar AKP A. Saefuddin dan Kabag Rekrut Polwiltabes AKBP Drs. Masguntur Laope, S.H. Sementara itu, untuk menjawab soal tayangan kriminalitas di layar televisi, Polwiltabes mendaftarkan koresponden RCTI di Bandung, Hilmi Hatta. (A-125)\*\*\*



IMBIEP  
NGGAL  
DANG

Peterson Pakyul

15 Agustus 2003, Hal. 2, Kol. 7  
Keterlibatan

Mengingat Situasi Makin Memanas

## Polwiltabes Hentikan Bandung Festival 2003

BANDUNG, (PR).-

Setelah sempat mengalami ketegangan antara massa umat Islam dengan panitia Bandung Festival 2003 di dekat Lapangan Gelora Saparua, Kamis (14/8), akhirnya Mabes Polri memerintahkan Mapolwiltabes Bandung untuk menghentikan acara Bandung Festival 2003.

Delegasi Tim Anti Pemurtadan (TAP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung yang terdiri dari H.M. Rizal Fadillah, S.H., Dr. K.H. Miftah Faridl, Drs. K.H. Djadja Djahari, ustaz Abu Syaqui, Lc., Drs. K.H. Agus Syihabuddin, M.Ag., ustadz Saeful Islam Mubaraq, Lc., K.H. Nana Sutisna, Ahmad Rozi, S.H., dll, berusaha menanyakan kembali sikap panitia yang semula menyetujui penghentian acara pada pkl. 19.00 WIB.

Penyelenggaraan "Bandung Festival 2003" itu, dihentikan pihak kepolisian, menyusul terbitnya Surat Keputusan Kapolwiltabes Bandung -- atas nama Kapolri -- Nomor B-393/VIII/2003/Intelpam, Kamis (14/8) pukul 19.00 WIB.

Terbitnya surat keputusan itu merujuk kepada laporan Kepala Bagian (Kabag) Intelkam Polwiltabes Bandung ihwal situasi yang semakin memanas. Hal itu terjadi menyusul demonstrasi yang dilakukan sejumlah ormas Islam. "Dengan rujukan telepon Kabag Intelkam, maka kami minta kepada Ketua Panitia Bandung Festival 2003 untuk menghentikan kegiatan tersebut terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2003 pukul 19.00 WIB," tulis Kapolwiltabes Bandung, Kombes Pol. Drs. Hendra Sukmana dalam surat keputusan itu.

H.M. Rizal Fadillah mengemukakan bahwa MUI Kota Bandung

tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap Panitia Bandung Festival 2003 dan Peter Youngren yang kegiatannya dihentikan pihak berwajib. Selain itu, ungkap Rizal, MUI Kota Bandung akan mengadakan tablig akbar, Jumat ini (15/8) pkl. 14.00 WIB di Masjid Pusdai Jabar bertema "Menentang Gerakan Pemurtadan". Dalam kesempatan itu, pimpinan ormas Islam se Jabar akan menjadi pembicara dan diharapkan kehadiran seluruh umat Islam.

K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) berharap semua pihak bisa mengerti kenapa umat Islam keberatan terhadap penyelenggaraan Bandung Festival 2003. "Saat ini kaum Muslimin dalam keadaan sensitif dan tidak ingin selalu dipojokkan oleh berbagai isu. Kepada seluruh kaum Muslimin, kamiimbau mari rapatkan ukhuwah Islamiyah, tingkatkan ilmu dan amal," katanya.

Salat magrib

Berdasarkan pemantauan "PR" di lokasi penyelenggaraan, Lapangan Saparua Bandung, ribuan umat Islam mulai beringsut memadati jalan di utara lapangan sejak pukul 17.00 WIB. Mereka langsung melakukan orasi yang intinya menolak pemurtadan. Aksi sempat dihentikan sejenak, menyusul tibanya waktu salat magrib. Setelah melakukan salat magrib ala *Khauf*, mereka kembali melanjutkan demonstrasi.

Guna mendinginkan suasana, sekitar pukul 18.30 WIB, Kapolresta Bandung Tengah AKBP Drs. Irwanto mengambil inisiatif untuk mempertemukan kedua "kubu". Pihak panitia diwakili oleh Ketua Panitia John Simon Timorasen, sedangkan kubu demonstran diwakili oleh Ustadz Abu Syaqui (MUI Kota Ban-

dung), Rizal Fadillah, Supriatna, K.H. Nana Sutisna (Persa), dan sejumlah pentolan ormas Islam lainnya. Mengambil tempat di lapangan bola basket, dalam pertemuan tersebut kemudian kedua kubu menyepakati, penyelenggaraan Bandung Festival dibatasi hingga pukul 19.05 WIB. Pasalnya, Ketua Panitia, John Simon Timorasen memohon kesempatan untuk melakukan doa bersama selama 35 menit.

Tak dinyana, ternyata sang pendeta asal Kanada, Peter Youngren, mangkir. Dia menolak menghentikan ceramahnya selama pihak kepolisian tidak menerbitkan surat keputusan sebagai legitimasi. Tak ayal, sikap *keukeuh* Peter membuat suasana semakin memanas.

Di saat saat genting itu, Kapolresta Irwanto sempat menelepon Kapolri Jenderal Pol. Da'i Bachtiar guna meminta "petunjuk". Dan, Da'i pun kemudian mendelegasikan kepada Kapolwiltabes Bandung untuk segera membuat surat keputusan penghentian kegiatan. Setengah jam menunggu, akhirnya surat keputusan itu pun kemudian tiba di lokasi penyelenggaraan kegiatan sekira pukul 20.00 WIB. Begitu mendapat surat keputusan itu, akhirnya acara Bandung Festival lantas dihentikan.

Sementara itu, Forum Ulama Umat Indonesia (FUU) akan mengadakan Tablig Akbar pada Jumat (15/8) pkl. 13.00 WIB di Masjid Istiqomah Jln. Citarum Bandung. Pembicaranya antara lain K.H. Athian Ali M. Da'i, M.A., Drs. Deddy Rahman, dan Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. Acaranya bertema "Penyikapian terhadap Tindakan Brutal dalam Proses Pemurtadan." (A-44/A-125)\*\*\*

*Dr. Rizal*



BER: *Pikiran Rakyat*  
GGAI: *15 Agustus 2003, Hal 6, Kol 1*  
ALH: *Sekeloa*

Seharusnya Melalui Pendekatan Komprehensif

## SPP Dukun "Wanalaga" Sayangkan Penangkapan

GARUT, (PR).-

Operasi pengamanan wilayah hutan di Kab. Garut mulai digelar pada Selasa (12/8), namun ribuan petani yang selama ini menggarp hutan-hutan di sekitar kawah Darajat resah karena mereka akan terusir dan tidak bisa lagi mencari penghidupan di lahan milik Perhutani. Sekjen Serikat Petani Pasundan, Agustiana menyayangkan pendekatan yang dilakukan aparat dalam operasi itu.

Menurut Agustiana, bila melihat tujuan operasi ini dalam melindungi dan mengembalikan fungsi hutan, pihak SPP mendukung penuh Operasi Wanalaga itu. Namun, yang disayangkan Agustiana, pada kenyataannya dalam operasi dilakukan penangkapan kepada para petani sementara para pencuri kayu tidak ditangkap.

Agustiana mengatakan petugas dalam melakukan penangkapan tidak memiliki klasifikasi yang jelas, mana petani perambah dan mana petani yang hanya memanfaatkan lahan yang sudah habis dijarah. "Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan petani. SPP sangat mendukung digelar operasi ini, namun pendekatan hukum yang dilakukan aparat telah menimbulkan kegelisahan. Pemeliharaan dan perlindungan kawasan hutan tidak bisa hanya melalui pendekatan hukum, tetapi harus melalui pendekatan yang lebih

komprehensif," jelasnya.

Ia melanjutkan dalam penangkapan tersebut, terjadi hal yang ironis karena mereka yang ditangkap bukan penchang pohon, tetapi petani. Ia menyayangkan pihak aparat yang tidak menyosialkan operasi ini sebelumnya langsung kepada petani. Petani sendiri, menurut pengamatan SPP, banyak yang tidak mengetahui batasan kawasan lindung, konservasi atau produksi. Mereka tidak bisa disalahkan bila menanam hingga memasuki kawasan yang dilarang. "Dengan penangkapan dan pelanggaran seperti ini, bayangkan mahalnya ongkos ekonomi dan sosial yang harus ditanggung masyarakat," tegasnya.

Dijelaskan Agustiana, dalam memelihara dan melindungi kawasan hutan harus dilakukan secara partisipatif. Artinya, sebelum melangkah pada operasi penertiban, harus diidentifikasi dahulu masalah masyarakat di dekat kawasan hutan beserta status tanahnya. "Mapping sosial, ekonomis, ekologis, dan kuasa tanah harus dilakukan agar programnya tepat sasaran," ujar Agustiana.

### Melindungi hutan

Menurut Kasatgasda Operasi Wanalaga yang juga menjabat Dir. Samapta Polda Jabar, Kombes H.C. Tukimin, operasi ini bertujuan melindungi kawasan hutan di Kab. Garut. Dalam operasi yang

akan berjalan selama 30 hari ini akan dilakukan pengamanan dan penangkapan para penjarah dan pencuri kayu. Bila mereka yang ditangkap terbukti bersalah, proses hukum akan dijalankan.

Selama dua hari operasi pengamanan, pihak aparat telah mengamankan puluhan orang dari berbagai wilayah di Kab. Garut. Namun, baru 8 orang yang sudah diperiksa dan terbukti sebagai tersangka penjarah. Mereka saat ini para tersangka ditahan di Mapolres Garut.

Dari pemantauan "PR" di Kec. Pasirwangi, warga banyak mengeluhkan bagaimana kehidupan mereka nanti bila bertani saja dilarang pemerintah. Sementara itu, hampir seluruh warga dari empat desa di Kec. Pasirwangi hanya mengandalkan penghasilan dari bertani di kawasan yang berada di dalam lingkungan PT Amoseas tersebut. "Nanti di kawasan ini akan tercipta ribuan pengangguran karena bertani tidak diperbolehkan lagi," ujar seorang warga.

Dalam sosialisasi yang dilakukan aparat di hadapan sekitar 1.000 warga Desa Karyamekar, Padaawas, Sarimukti, dan Mekarjaya, diberitahukan bahwa warga diberi kesempatan hingga masa panen tanaman pertanian yang sudah ditanamnya. Namun, setelah panen warga secara tegas dilarang menggarap lahan di kawasan terlarang. (A-132)\*\*\*



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

IMBER : Gada Media  
NGGAL : 15 Agustus 2003. Hal. 2, Kol. 7.  
DANG : Ketertarikan

## Pedagang Pasar Antri Resah Menyusul Isu Penyerangan

CIMAHI, (GM).-

Pedagang Pasar Antri resah dengan adanya isu penyerangan dan perusakan yang akan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga melancarkan organisasi kepemudaan (OKP), Kamis (14/8). Sejak pagi, pedagang berjaga-jaga menghadapi kemungkinan isu tersebut terjadi.

Pengurus Koperasi Mitra Antri Jaya telah melaporkan ancaman dan teror itu kepada Polres Bandung serta meminta pengamanan dari aparat kepolisian dan sejak tiga hari lalu tutup. Mengenai adanya isu penyerangan, diakui Ketua Ikatan Pedagang Pasar Antri dan Pasar Inpres Cimahi, Alfi Deni yang ditemui "GM" di pasar, Kamis (14/8).

"Tadi pagi kita mendengar kalau mereka akan menyerang pasar. Jika benar, kita tidak akan melawannya. Tapi, kita akan lihat dulu apa yang akan mereka lakukan," ujar Deni didampingi pedagang.

Menyikapi isu tersebut, Deni meminta kepada para pedagang untuk bersabar dan berhati-hati. Mere-

ka diminta supaya tidak terpancing dengan adanya ancaman seperti itu karena dikhawatirkan isu tersebut hanya untuk memancing kemarahan pedagang.

Sementara itu, malam kemarin Ketua IP'PAPI, Alfi Deni dan beberapa orang pedagang, di antaranya Alit menghubungi Redaksi "GM". Mereka mengaku keberatan dengan pernyataan Kapolres Bandung, AKBP Edward Syah Per-nong, S.H. di salah satu siaran televisi. Mereka memprotes jika aparat menyalahkan pedagang pasar sebagai penyebab terjadinya kemacetan dan kekumuhan di sekitar Jln. Gandawijaya dan Sriwijaya. Karena kemacetan terjadi akibat adanya PKL (pedagang kaki lima).

"Tapi, kenapa pedagang pasar yang disalahkan dan kena imbasnya. Seharusnya yang dipindahkan itu PKL, bukan kita," akunya.

Bahkan, Deni dan kawan-kawannya pun memprotes keras pernyataan salah satu LSM yang mengatakan, penataan kawasan Pasar Antri tersebut tidak akan menye-

ngsarakan dan merugikan rakyat kecil. "Padahal kan jelas, kami ini sangat dirugikan," katanya.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya menuduh bahwa LSM tersebut dinilai tidak tahu-menahu soal kondisi di dalam pasar. "Jika seluruh instansi terkait termasuk pemkot ingin mengetahui kondisi sebenarnya tentang pedagang, sebaiknya mereka turun langsung ke pasar. Jangan hanya menelan informasi dari salah satu LSM," ujar Alit.

Sementara itu Ketua LSM SIDE, Drs. Usman Rachman kepada "GM" mengatakan, pembangunan dan penataan pasar hendaknya dilihat secara komprehensif untuk kepentingan seluruh komponen masyarakat. Jangan hanya dilihat untuk kepentingan pedagang. Karena itu, dalam prosesnya perlu dilakukan komunikasi yang berempati positif dari semua elemen.

Aspirasi masyarakat pedagang perlu didengar. Kalau berbeda soal harga, bukan berarti penataannya tidak dijalankan. Namun, dicarikan solusi terbaik. (B.45)\*\*



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

BER : *Pikiran Rakyat*  
JGAL : *20 Agustus 2003 Hal. 2, kcd. 7*  
NG : *Sosial*

## Polda Gelar Penataran Terpadu Bagi Wartawan

**BANDUNG, (PR).-**

Polda Jabar akan menggelar "Penataran Terpadu Kabag Binamitra Polres/Polresta dengan Jajaran Wartawan Media Cetak dan Elektronik" se-Jabar, Rabu (20/8). Penataran yang direncanakan berlangsung sehari penuh tersebut akan dibuka Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Dadang Garnida, S.H., M.B.A. Menurut Kepala Bidang Humas Komisaris Besar Drs. H.M. Faizal Saladin kepada wartawan, Selasa (19/8), sejumlah pembicara akan hadir dalam acara tersebut. Di antaranya, Kepala Biro Operasional Komisaris Besar Drs. T. Rachmat Sudarto, Direktur Reserse Kriminal Komisaris Besar Drs. Dikdik M. Arief Mansoer, Ketua PWI Jabar H. Us Tiarsa R., Direktur Stikom Drs. Deddy Djamaludin Malik, dan Pemimpin Redaksi HU *Pikiran Rakyat* Drs. H. Yoyo S. Adiredja.

"Saya harapkan penataran terpadu yang baru pertama dilaksanakan di Polda Jabar itu besar manfaatnya bagi kepolisian dan wartawan sendiri," ujarnya.

Satu hal yang ingin dicapai dari acara tersebut, katanya, antara lain dipahaminya fungsi kehumasan di

tubuh Polri oleh kalangan jurnalis, baik media cetak maupun elektronik, termasuk fungsi kepala bagian mitra di tiap polres dan polresta.

Acara akan dibuka oleh Kapolda Irjen Pol. Drs. Dadang Garnida sekira pukul 8.00 WIB dan ditutup juga oleh Kapolda Dadang sekira pukul 16.00 WIB. "Mudah-mudahan para undangan yang diundang hadir tepat pada waktunya," kata Faizal.

### Dikdik ke Beijing

Dalam kesempatan sama, Faizal juga mengatakan bahwa seorang pejabat utama Polda Jabar Komisaris Besar Drs. Dikdik M. Arief Mansoer, S.H., direncanakan berangkat ke Beijing Cina guna menghadiri *workshop* hukum selama empat hari (24-30 Agustus).

Diperoleh keterangan, penugasan Dikdik itu atas telegram Kapolri Jendral Drs. Da'i Bachtiar, 13 Agustus 2003 lalu. Dikdik diberangkatkan guna mendukung kelancaran Program Kerja Sama Pendidikan di dalam dan luar negeri. Di Beijing, Dikdik lengkapnya akan menghadiri *ASEAN-China Workshop On Law Enforcement Against Transnational Crime*. (A-112)\*\*\*



BER : Gatra Media  
GGAL : 28 Agustus 2003. Hal. 5, kol 1.  
ANG : Kriminalitas

## Berkas 8 Tersangka Judi Togel Dilimpahkan ke Kejati

MAPOLDA, (GM).-

Delapan orang tersangka judi togel gelap (togel) yang dibekuk petugas Direktorat Reserse Kriminalitas (Dit Reskrim) Polda Jabar di daerah Cianjur bulan lalu, berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan tinggi (kejati). Kamis (21/8).

Kedelapan orang tersangka tersebut, Li Tjua alias Aju (33), warga Kp. Sukamaju, Kec. Pacet, Cianjur; Ling Ming Fu alias Jaki (28), Kp. Cipendawa, Kec. Pacet, Cianjur; Alwi (30) dan Johan (28), keduanya warga Kp. Sukamaju, Kec. Pacet, Cianjur; Alek Chandra (33), Kp. Cipendawa, Cianjur; Tak Cin alias Acin (36); Wilson (31); dan Yadi (30), keduanya warga Kp. Sukamaju, Kec. Pacet, Cianjur.

Dari para tersangka, petugas menyita barang bukti berupa kupon-kupon judi togel Singapura, kode-kode buntut, peralatan tulis menulis, dan uang tunai senilai Rp 2 juta.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Drs. Muryan Faizal didampingi Kanit III Bulik, Kopol

Suhirman, Selasa (19/8) menjelaskan, penangkapan kedelapan orang tersangka ini berawal dari sebuah informasi yang disampaikan masyarakat yang menyebutkan di daerah Cianjur marak perjudian togel.

Tindakan mereka, menurut sumber tersebut, sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar dan banyak warga yang risi dengan kehadiran bandar dan agen togel itu.

Berbekal informasi tersebut, lanjutnya, petugas Unit Ops III Dit Reskrim Polda Jabar melakukan penyelidikan ke lokasi sasaran operasi seperti yang disampaikan sumber informasi. Dari penyelidikan selama satu hari, diperoleh data-data yang cukup akurat.

"Kemudian anggota polisi menggerebek beberapa tempat judi togel yang dikelola oleh para tersangka. Tak ada perlawanan yang berarti ketika penggerebekan dilakukan. Sehingga, petugas dengan leluasa menggeledah dan menyita barang bukti berupa kupon, alat tulis, dan uang tunai," terang Muryan. (B.96)\*\*



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

MBER : *Pikiran Rakyat*  
NGGAL : 20 Agustus 2003. Hal. 5, Kol. 5.  
JANG : *Keterlibatan*

Dilakukan tidak Simpatik dan Merugikan

## Pemuda, Mahasiswa, SPP Protes Operasi Wanalaga

**GARUT, (PR).-**

Komite pemuda, mahasiswa, dan organisasi tani se-Kabupaten Garut memprotes keras pendekatan yang dilakukan aparat dalam Operasi Wanalaga. Mereka mempertanyakan tindakan penangkapan dan penahanan para petani dari berbagai wilayah di Garut serta aksi pembakaran 49 rumah di wilayah Sangcang. Protes tersebut disampaikan dalam *hearing* dengan DPRD Garut, kepolisian, Pemkab Garut, Perum Perhutani, serta BKSDA, Selasa (19/8).

Secara umum, komite ini memprotes cara-cara operasi yang tidak simpatik dan merugikan masyarakat. Seperti disampaikan juru bicara komite, Agustiana dari Serikat Petani Pasundan (SPP), Operasi Wanalaga telah mengakibatkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat petani. Keresahan masyarakat tersebut dipicu aksi penangkapan dan penahanan terhadap petani yang dituduh merambah hutan. Bahkan, Desa Sagara di wilayah hutan Sangcang Garut terjadi pembakaran terhadap 49 rumah petani.

Agustiana melanjutkan, para petani ini sebelum Operasi Wanalaga digelar tidak diberi informasi maupun sosialisasi dari pihak berwenang. Padahal, menurut Agustiana, sebelum Operasi Wanalaga

digelar, para petani di wilayah hutan lindung dan konservasi sebenarnya sudah siap meninggalkan tanahnya. "Pada saat mereka menunggu alternatif solusi dari pemerintah, malah digelar Operasi Wanalaga yang dilakukan dengan cara-cara tidak simpatik," ujar Agustiana.

Dalam *hearing* tersebut juga didengar kesaksian Ny. Kokom, warga Sagara yang suaminya ditahan polisi dan rumahnya habis dibakar. "*Abdi bade tumaros ka aparat di dieu, ka DPRD, Bani abdi diimuk, tangkal cau dihabud, barang barang dialungkeun kaluar, pun lumecuk ditahan di Polres. Naha tos kedahna aparat berbuat kitu ka masyarakat? Naha bapa-bapa senang ningal kaayaan masyarakat nu sapertos kitu?*" ujar Ny. Kokom terbata-bata.

Begitu pula kesaksian Ny. Susi Susilawati yang suaminya ditahan di Polres Garut. Menurut Ny. Susi, suaminya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Karena tidak memiliki tanah, ia dan suaminya menggarap lahan hutan yang sudah gundul. Pada Operasi Wanalaga yang dilakukan beberapa hari lalu, suaminya ditangkap dan ditahan di Polres Garut. "Saya minta kepada Bapak-bapak, tolong bebaskan suami-suami kami karena mereka tulang

punggung keluarga kami. Kami tidak memiliki tanah, tetapi tidak pernah menebang dan mencuri kayu. Kami hanya memanfaatkan lahan yang kosong. Apakah salah bagi kami menggarap lahan yang tidak dipergunakan? Kami hanya menanam palawija Pak. kami bertani hanya untuk makan sehari-hari, bukan untuk mengumpulkan kekayaan," ujarnya.

Agustiana berani menjamin para petani di Sangcang tidak pernah ada yang menebang kayu sehingga mereka tidak berhal ditangkap. Ia juga meminta agar aparat bertindak lebih simpatik dan menjauhi aksi kekerasan. "Saya setuju dengan operasi pemulihan fungsi hutan, tetapi prosesnya harus simpatik. Tolong posisikan manusia sebagai manusia, tegasnya.

Menanggapi protes para petani tersebut, Wakapolres Garut Kumpul Rudy Marfianto menjawab pihaknya akan memberikan masukan dari masyarakat ini kepada unit yang lebih atas. Dijelaskan Rudy Marfianto, Operasi Wanalaga ini berada di bawah polda, sementara pihak Polres Garut hanya membantu pelaksanaan di lapangan. "Sebagai pelaksana di bawah, kita tidak bisa mengambil keputusan. Namun, masukan ini akan saya berikan kepada atasan," ujarnya. (A-132)\*\*\*

*Diri Intel*

*Monitor*



MBER : *Garda Media*  
NGGAL : *20 Agustus 2003. Hal. 2, Kol. 5.*  
DANG : *Sesial*

## Lagi, Kapolres Bandung Menerima Penghargaan

CIMAHI, (GM).-

Untuk yang ketiga kalinya, Kapolres Bandung AKBP Drs. Edward Syah Pernong, S.H. menerima penghargaan atas keberhasilan prestasi kerjanya. Sebelumnya, Edward menerima penghargaan dari Walikota dan DPRD Kota Cimahi. Kini giliran Paguyuban Pasundan Kota Cimahi menyerahkan penghargaan tersebut, Selasa (19/8).

Penghargaan berupa plakat dan kujang tersebut diserahkan oleh Ketua Pangapi Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. Ir. H. Ginanjar Kartasasmita yang juga Wakil Ketua MPR RI di Gedung Local Education Centre (LEC), Jln. Permana Cimahi, kemarin.

Hadir saat itu Walikota Ir. H.M. Itoc Tochija, M.M., Ketua DPRD Rd. Sutardja, B.A., Ketua Paguyuban Pasundan H. Syaefi, B.A., Ketua Paguyuban Pasundan Cimahi Drs. Endang Junaedi, para kapolsek se-Kab. Bandung dan Cimahi, pejabat pemkot, jajaran DPRD Kota Cimahi, Kodim 0609, para komandan pusat pendidikan (pusdik) di Kota Cimahi, LSM, OKP, dan tokoh masyarakat.

Menurut Ginanjar, penghargaan diberikan kepada kapolres sebagai simbol keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, ia berharap prestasi tersebut tetap dijaga dan ditingkatkan sekalipun terjadi pergantian kapolres.

Hal senada disampaikan Ketua Paguyuban Pasundan, H. Syaefi,



Edward Syah Pernong

B.A. Menurutnya, penghargaan diberikan kepada kapolres karena ia dan jajarannya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik bagi masyarakat Kab. Bandung dan Cimahi. *"Ieu teh lain tuturut munding, lain latah. Tapi, ieu teh tina hasil pertimbangan-pertimbangan anu mateng,"* akunya.

Karena, katanya, mereka menilai jajaran Polres Bandung di bawah pimpinan Edward telah mampu memperlihatkan prestasi yang menonjol dibandingkan polres-polres lainnya. Keberhasilan Edward tersebut telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Paguyuban Pasundan, *nyunda, nyantri,* dan moralitas tinggi. Untuk itu, ia berharap jika Kapolres Bandung diganti, penggantinya setidaknya sama baiknya dengan Edward.

Menyikapi hal itu, Kapolres

Bandung Edward Syah Pernong mengatakan, sangat bangga dan terharu atas penghargaan tersebut. Apalagi, penghargaan diberikan oleh komunitas masyarakat yang representatif di Jawa Barat. Penghargaan itu pun merupakan tanda keberhasilan atas kinerja seluruh anggotanya dan jajaran Polres Bandung.

"Kebetulan yang menerimanya itu saya sebagai kapolres. Tapi, ini semua atas hasil kerja anggota saya di jajaran Polres Bandung yang berkaitan dengan Kota Cimahi," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemicu bagi anggotanya untuk dapat berbuat lebih baik dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Pada kesempatan yang sama pula, kapolres memberikan cenderamata terhadap Ginanjar dan Ketua Paguyuban Pasundan, Syaefi.

Sementara itu Walikota Cimahi, Itoc mengakui kinerja jajaran Polres Bandung sangat mendukung dalam penciptaan suasana kondusif, salah satunya penyitaan dan penghancuran minuman keras yang beredar di masyarakat. Wajar jika Paguyuban Pasundan Kota Cimahi memberikan penghargaan kepada Kapolres Bandung atas kinerjanya.

*"Cacakan nyandung jeung Kab. Bandung, tapi ku Polres Bandung mah masih kabananan,"* ujarnya. (B.45)\*\*



BER : *Gradia Media*  
JAL : *21 Agustus 2003, Hal. 1, Kol. 6.*  
NG : *Sa.Sad*

## Masyarakat Diminta Waspada Teror Bom

MAPOLDA, (GM).-

Meledaknya bom di beberapa tempat di Tanah Air dan maraknya aksi teror bom akhir-akhir ini, tidak menutup kemungkinan peristiwa serupa akan terjadi di daerah Jawa Barat. Untuk itu, baik kepada anggota Polri maupun masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap ancaman tersebut.

Hal itu diungkapkan Kapolda Jawa Barat, Ijen Pol. Drs. H. Dadang Garnida, S.H., M.B.A. melalui Irwasda Polda, Kombes Pol. M. Zaini dalam sambutannya pada penutupan "Penataran Terpadu Fungsi Humas Polda Jabar bagi Para Kabag Bina Mitra Polres/Polresta, Wartawan Cetak dan Elektronik yang Meliputi Kegiatan Jajaran Polda Jabar" di Mapolda Jabar, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (20/8).

"Kepada anggota Polri diminta untuk tetap waspada, memasang mata dan telinga terhadap ancaman dan aksi teror bom. Begitu juga kepada wartawan, baik cetak maupun elektronik untuk tetap konsisten dalam pemberitaan. Terciptanya kerja sama antara Polri dan wartawan,

diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif, memberikan rasa aman dan tertib di tengah-tengah masyarakat," kata Dadang.

Menurutnya, dalam penataran bidang kehumasan ini, Kapolri telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam surat telegram Kapolri No. Pol.:ST/256/III/2003 Maret lalu tentang larangan penayangan kegiatan Polri secara vulgar. Dalam menyikapi surat telegram Kapolri tersebut, ada kesan pimpingan Polri membatasi pers dalam mencari berita sehingga menimbulkan interpretasi yang salah.

"Surat telegram Kapolri tersebut bukan dimaksudkan untuk memba-

tasi wartawan dalam mencari berita. Tetapi untuk mengingatkan kepada anggota Polri di lapangan, agar dalam melaksanakan tugas tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM, melanggar prosedur dan hukum, melanggar etika kepolisian maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat," jelas Dadang.

Dijelaskannya, jika kepolisian melakukan tindakan di lapangan dan diliput oleh media massa, agar ditunjukkan prosedur yang benar, tidak direkayasa, apalagi mencari popularitas secara pribadi. Di samping itu, agar dapat membatasi untuk tidak dipublikasikan, antara lain adegan vulgar dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyidikan.

"Untuk itu, para pengembalian fungsi humas Polri dituntut untuk

memahami mekanisme tugas humas dalam memberikan keterangan pers, melaksanakan konferensi pers, membuat *pers release* serta mengetahui tentang seluk-beluk pers dalam pemberitaan," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Drs. Muryan Faizal. Menurutnya, dengan adanya penataran ini, diharapkan para kabag bina mitra di jajaran Polda Jabar dapat menjalankan tugasnya mendampingi wartawan dalam pemberitaan. "Insya Allah dan saya yakin dengan adanya penataran ini, para kabag bina mitra di jajaran Polda Jabar dapat melaksanakan tugas ini sesuai prosedur yang telah ditetapkan," tutur Muryan. (B.96/B.47/B.100)\*\*



10 media  
Agustus 2003, Hal 1, Kol. 3  
mencetak

## Kepergok Memperdayai Korban di Cileunyi **laku Hipnotis Dihajar Massa**

BEUNYING KALER, (GM).-

BT (30), salah seorang anggota sindikat pelaku hipnotis babak belur dihajar massa, sesaat setelah kepergok melakukan aksi kejahatannya di kawasan Cileunyi, bu lalu. Sedangkan seorang pelaku lainnya lolos dari gapan dan kini dalam pengejaran polisi.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun "GM", terduga BT yang mengaku berasal dari Lubuk Linggau, Rabu siang beraksi di kawasan Cileunyi. Aksi aksinya keburu tercium massa. Tanpa ampun, ia ditangkap. BT langsung dihajar massa.

Bersamaan dengan itu, petugas patroli Polsek Cileunyi lewat di lokasi kejadian. Dengan cepat, petugas mengamankan BT yang tinggal di Liosari, Ciparay, Kab.

Bandung itu dari amukan massa. Namun karena terduga banyak melakukan aksinya di Jln. Pahlawan Cibeunying Kaler, kasusnya dilimpahkan ke Polsekta Cibeunying Kaler.

Terduga BT yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan Ciparay-Tegallega ini, mengaku melakukan aksi penipuan dengan cara menghipnotis puluhan kali. Bahkan, emas hasil kejahatannya mencapai puluhan gram. Barang hasil kejahatannya itu telah dijual kepada penadah di daerah Kab. Bandung. Salah seorang petugas mengatakan, modus operandi yang dilakukan tersangka BT dengan Is adalah berpura-

pura menanyakan alamat seseorang kepada calon korbannya. Setelah terjadi perbincangan, tersangka Is muncul dan pura-pura mengetahui alamat yang dituju BT.

Saat itulah, tersangka BT dan Is menghipnotis korbannya. Setelah itu, tanpa disadari, pelaku menyam bil barang-barang berharga milik korbannya itu.

"Rata-rata yang jadi sasaran pelaku perhiasan emas berlian. Tersangka BT sudah puluhan kali menjual perhiasan emas di kawasan Kab. Bandung," jelas seorang petugas.

Bahkan, 4 tersangka lainnya yang diduga komplotan BT sudah ditangkap. Mereka ditangkap di Jln. Moch. Toha. Kelompok yang ditangkap ini sasarannya berbeda. Penipuan kelompok ini dilakukan terhadap korban yang memakai kendaraan bermotor dan lainnya. Para tersangka yang mendekam di tahanan Mapolsekta Cibeunying Kaler kebanyakan tinggal di Ciparay, Majalaya, dan Subang.

Kapolsekta Cibeunying Kaler, AKP Evi Helzah saat dihubungi "GM" lewat telepon selulernya mengatakan, pihaknya sudah menangkap 4 tersangka lainnya dan kini masih dirahasiakan identitasnya. "Kita masih melakukan pengembangan penyelidikan. Jadi, tidak bisa dikatakan siapa saja tersangka yang sudah tertangkap. Dari 4 tersangka ada penadah hasil kejahatan pelaku," katanya. (B.90)\*\*



ER *Pikiran Rakyat*  
GAL *25 Agustus 2003, Hal. 2, Kol. 6*  
JG *Sosial*

Kapolda, "Jika Dihentikan, Bangsa Akan Rugi"

## Walau Diprotes, Operasi Wanalaga Dilanjutkan

BANDUNG, (PR).-

Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Dadang Garnida, S.H., M.B.A., menyatakan bahwa dirinya tetap memerintahkan aparatnya melaksanakan "Operasi Wanalaga Lodaya 2003" di kawasan hutan Garut, walau diprotes oleh sejumlah anggota masyarakat. Ia tidak akan menghentikan operasi karena pelaksanaannya dipandang tidak keluar dari rambu-rambu pelaksanaan operasi.

"Jika dihentikan karena protes sejumlah masyarakat, bangsa akan rugi nanti. Hutan akan rusak," ujarnya menjawab pertanyaan "PR" di lapangan tenis Polda, Jumat (22/8), didampingi Kepala Bidang Humas, Komisaris Besar Drs. H.M. Faizal Saladin.

Menurut kapolda, boleh-boleh saja masyarakat melayangkan protes, termasuk menyampaikannya ke DPRD Jabar. Namun, pihaknya tidak terpengaruh oleh protes tersebut. Apalagi, karena operasi tersebut merupakan operasi terpadu yang telah melalui mekanisme pembicaraan yang panjang, pihaknya, katanya, tidak akan berhenti gara-gara komplain tersebut.

Sekali lagi, ujarnya, silakan saja masyarakat menyampaikan aspirasi

ke dewan. "Namun, kita tetap jalan. Kalau anak buah saya di lapangan ngawur, baru dihentikan," tegasnya.

Seperti diketahui, Polda Jabar sejak awal Agustus 2003 melaksanakan operasi Wanalaga Lodaya 2003 untuk membersihkan perambahan dan penjarah hutan di kawasan hutan di Garut. Operasi melibatkan personel cukup banyak, termasuk para perwira Polda Jabar. Operasi juga dibantu PT Perhutani Unit III Jabar dan aparat lain karena termasuk operasi terpadu.

Diperoleh keterangan, saat operasi berjalan satu dua hari, masyarakat di kawasan hutan tidak memprotes keberadaan petugas. Mereka menjerit kehadiran petugas. Namun belakangan, muncul komplain dari masyarakat yang selama ini mendiami kawasan hutan dengan mendirikan rumah dan gubuk. Mereka komplain karena petugas dinilai bertindak semena-mena saat melaksanakan operasi.

Komplain dan protes mereka, selain disampaikan ke Pemda Garut, juga disampaikan ke DPRD Jabar. Protes yang dimotori Sekretaris Jenderal Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana itu intinya meminta Operasi Wanalaga Lodaya 2003 dihentikan karena aparat dinilai sudah bertindak keterlaluan di lapangan.

Dievaluasi

Kepada "PR", Dadang Garnida menyatakan sangat paham jika operasi Wanalaga 2003 itu menuai protes. Pasalnya, katanya, masyarakat yang selama ini ada di kawasan hutan dan diduga melakukan perusakan hutan seakan dibiarkan oleh aparat. "Mereka mungkin terancam oleh operasi terpadu yang kita lakukan," katanya.

Namun, ia meyakinkan bahwa aparatnya di lapangan tidak akan bertindak semena-mena atau keluar dari prosedur operasi. Pendekatan manusiawi tetap diterapkan aparatnya di lapangan. Bagaimana petugas di lapangan bertindak, katanya, selalu dievaluasi dan terus diarahkan agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan semua pihak.

Ditanya apakah perusakan hutan akan berhenti dengan operasi, Dadang mengatakan operasi tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan jika masing-masing pihak tidak berusaha membersihkan dulu dirinya dari kelakuan yang tidak baik. "Polisi, tentara, dan aparat pemerintah baiknya saling membersihkan dirinya dulu," katanya. (A-112)\*\*\*



ER : Media Indonesia  
GAL : 25 Agustus 2003. Hal. 17. Kol 1.  
JG : Kriminalitas

## Polisi Harus Tangani Serius Kasus Kejahatan Asuransi

CIANJUR (Media): Anggota DPR asal Cianjur, Dadang Rukmana Mulya, meminta aparat Kepolisian Resort (Polres) Cianjur, Jawa Barat, serius mengusut tuntas kasus kejahatan asuransi yang diduga melibatkan sekretaris daerah (sekda) serta pejabat terkait setempat lainnya.

"Saya selaku warga Cianjur merasa malu bila pejabat tersebut benar berkelakuan seperti itu. Untuk itu, saya minta dengan sangat polisi mengusut tuntas," kata Dadang, di Ciloto, Puncak, Sabtu (23/8).

Sementara itu, petugas Polres Cianjur sudah meminta keterangan dari pihak asuransi PT Astra Buana di Bogor. "Petugas dari Polres Cianjur, dua hari yang lalu, sudah datang ke kantor kami untuk meminta keterangan,"

kata kepala kantor asuransi Astra Buana, cabang Bogor, Anna, yang dihubungi Media melalui telepon. Jumat 22/8.

Menurut Anna, pihaknya telah membayar klaim asuransi yang diajukan Sekda Cianjur Subarna sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis. "Selama data-datanya lengkap dan layak bayar, kami pun mencairkan klaim yang diajukan," katanya.

Pada 2 Agustus 2003, polisi telah memeriksa petugas operator alat berat, Adang, dari bengkel Dinas PU Bina Marga, Cianjur, yang diperintahkan menghancurkan kendaraan Mitsubishi Galant Nopol B 1795 GE buatan 1994 milik Sekda.

Semula, kendaraan tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas di Kampung Tunggurungan, Ci-

ranjang, Cianjur, yang mengakibatkan kaca pecah dan badan mobil rusak ringan.

Sekda Kabupaten Cianjur, Subarna, membantah pihaknya memerintahkan menghancurkan mobilnya untuk memperoleh dana asuransi.

"Saya tidak pernah memerintahkan hal itu. Saya pun tidak pernah melihat kendaraan saya, kecelakaan maupun setelah dibawa ke bengkel. Silakan polisi mengusutnya," katanya.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap dua Wakil Ketua DPRD DIY, Totok Daryanto dan Nur Ahmad Affandi oleh Kejaksaan Tinggi DIY berkait dengan kasus dugaan korupsi dengan modus asuransi jiwa akan dilakukan setelah selesai memeriksa sejumlah saksi. (BK/AU/N-1)



UMBER : Metro  
ANGGAL : 26 Agustus 2003, Hal. 2, Kol. 1  
IDANG : Keterangan

## Kendaraan Pribadi Bisa Pakai Jalur Alternatif



"Kami minta kesadaran dari para pengelola angkot untuk saling mengerti"

**AKBP M Ikhsan**  
Kasatlantas Polwiltabes

### Bandung, Metro

Mulai hari ini, warga Bandung yang akan melewati kawasan Jalan Kiaracondong diimbau untuk memilih jalur alternatif. Himbauan ini dikeluarkan pihak Lantas Polwiltabes Bandung, Dishub Kota Bandung, serta instansi terkait lainnya, menyusul pembangunan jalan layang (*fly over*) di kawasan rawan macet itu.

"Kami berharap para pengendara mobil, khususnya kendaraan pribadi, dapat menggunakan jalan alternatif lain, dan tidak melewati Jalan Kiaracondong. Pertimbangannya, kendaraan pribadi jumlahnya tidak terbatas," ujar Kasatlantas Polwiltabes AKBP M Ikhsan yang dihubungi *Metro*, kemarin (25/8), usai menghadiri pertemuan antara pihaknya dengan Dishub, Organda, dan beberapa instansi lain.

Jalur alternatif itu adalah Jalan Buah Batu, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Jakarta. Kendaraan yang datang dari arah Selatan (Jalan Sukarno-Hatta), dianjurkan mengambil alternatif ke Jalan Buah Batu, atau Jalan Gatot Subroto. Sedangkan para pengemudi yang datang dari arah Utara (Jalan Ahmad Yani), dianjurkan untuk mengalihkan kendaraan mereka ke Jalan Jakarta.

Meski begitu, tambah Ikhsan, angkot pun dianjurkan untuk mengambil jalur alternatif jika keadaannya memungkinkan. Namun prioritasnya, kata Ikhsan, tetap untuk melayani kepentingan publik.

"Karena itu kami minta kesadaran dan pengertian dari para pengelola angkot untuk saling mengerti satu sama lain. Pilihan ini bukan untuk mementingkan pihak-pihak tertentu, tapi untuk kepentingan masyarakat," tegasnya.

Untuk menegaskan himbauan ini, kata Ikhsan, pihaknya akan memasang papan pengumuman berisi himbauan itu, di beberapa titik sepanjang jalur itu. Selain itu, ujar Ikhsan, sejumlah personil juga akan diturunkan, khususnya di perempatan Jalan Buah Batu-Jalan Sukarno Hatta, perempatan Jalan Kiaracondong-Jalan Gatot Subroto, dan perempatan Jalan Kiaracondong-Jalan Jakarta.

Ikhsan juga mengatakan, pelaksanaan pengalihan jalur ini akan terus dipantau dalam seminggu ke depan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Ikhsan, maka pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan instansi lain, dan mencari pemecahannya. (bb)

## Hindari Macet di Kiaracondong:

- Jalur alternatif: Jalan Buah Batu, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Jakarta
- Kendaraan yang datang dari arah Selatan (Jalan Sukarno-Hatta), dianjurkan mengambil alternatif ke Jalan Buah Batu, atau Jalan Gatot Subroto.
- Kendaraan dari arah Utara (Jalan Ahmad Yani), dianjurkan untuk mengalihkan kendaraan mereka ke Jalan Jakarta.



POLISIAK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

MBER : *Pikiran Rakyat*  
NGGAL : *26 Agustus 2003, Hal 2, Kol. 7*  
JANG : *Kompas*

## Empat Pelaku Pencurian Ditembak

BANDUNG, (PR).-

Empat tersangka pelaku pencurian spesialis kendaraan bermotor dan elektronik terpaksa ditembak petugas dari Bagian Reserse Kriminal (Reskrim) Polwiltabes Bandung dan Polresta Bandung Tengah. Keempat tersangka itu adalah Furkon (30) warga Kp. Dungus Lambu Kec. Margasasih Kab. Bandung, Haris Ahmad (38) warga Jalan Jambu Kel. Kopolorejo Kec. Magetan Indramayu, Yuldin (23) warga Jalan Lampung Timur Ds. Wana Kec. Malinting Lampung, dan Agus Alim (25) warga Cicalengka. Keempat tersangka dilarikan ke RS Polri Sartika Asih guna menjalani perawatan medis.

Sementara itu, petugas reskrim itu berhasil membekuk 4 tersangka yang sekaligus teman satu komplotan. Mereka adalah Am alias Udin, Ir. alias Tuwe, Asep warga Salahuni Cianjur, dan Yudi (23) warga Dandeur Rancacek.

Kepala Bagian Reskrim Polwiltabes Bandung, AKBP Drs. Masguntur Laope, S.H., mengungkapkan bahwa perburuan terhadap keempat tersangka itu berawal dari penyidikan sebuah mobil merek Suzuki Carry warna biru nopol D 2965 UH yang disita dari tersangka ES. "Penyitaan mobil

tersebut dilakukan pada Jumat (15/8) lalu. Kemudian, hasil penyidikan mengarah kepada tersangka Am alias Udin," ujarnya yang saat itu didampingi Wakabag Reskrim, Kompol Agus Nugroho.

Setelah beberapa waktu melakukan pengintaian, tambah Agus, pihaknya membekuk tersangka Am di kediamannya, Jalan Situ Gunting Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, Jumat (22/8) pukul 2.00 WIB. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit televisi merek Detron dan 1 unit VCD player merek Pioneer. "Ia mengaku, setiap melakukan aksi, dirinya bersama tiga teman lainnya, yaitu Ek, Ir alias Tuwe, dan As. Oleh karena itu, dini hari itu juga kita bawa tersangka Am alias Udin untuk menunjukkan tempat persembunyian ketiga tersangka," katanya.

Sekira pukul 5.00 WIB, petugas pun membekuk tersangka Ir alias Tuwe di kediamannya, Jalan Madesa Kel. Bojongloa Kaler. Di sana, petugas menyita 1 unit televisi merek Panasonic 29 inci, 1 unit VCD player, 1 buah kulkas, dan 2 buah speaker aktif.

Polresta Bandung Tengah  
Ihwal penangkapan yang dilaksanakan Polresta Bandung Tengah,

pejabat sementara (Pjs.) Kabag Reskrim Polresta Bandung Tengah Iptu Irfan Nugraha menjelaskan bahwa tiga tersangka merupakan satu komplotan. Mereka adalah Yuldin, Yudi, dan Agus. Yuldin dan Agus ditembak petugas tepat di betisnya karena berusaha melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Ketiganya ditangkap di rumah temannya, Jln. Kiaracondong Kota Bandung, Sabtu (23/8).

Menurut Irfan, dalam melakukan aksinya ketiga tersangka berjalan bersamaan. Sasarannya sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan yang sepi. Saat situasi sepi, tiga tersangka yang selalu beraksi di malam hari, memakai 1 unit kendaraan bermotor. Ketika ada motor yang disamping di tempat sepi, salah seorang turun kemudian membongkar motor dengan astag. Setelah berhasil, ia kabur dan bareng bersama motor yang dipakai sebelumnya.

"Dari pengakuan mereka, mereka sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 10 kali. Ke-10 motor pun telah berhasil kita amankan. Oleh karena itu, bagi mereka yang merasa kehilangan motor di kawasan Kiaracondong, diharapkan datang melihatnya ke Mapolresta Bandung Tengah," jelas Irfan. (A-125)\*\*\*



MBER : *Pikiran Rakyat*  
NGGAL : *27 Agustus 2003, Hal. 3, Kol. 1.*  
JANG : *Keterbacaan*

# Pengerahan Massa tak Perlu Dilakukan

## 3.600 Personel Siap Amankan Pilwalkot

**BANDUNG, (PR).-**

Wakil Ketua Panitia Wali Kota Bandung periode 2003-2008, H.E. Warso menegaskan kembali kepada seluruh partai politik (parpol) untuk tidak melakukan pengerahan massa pada saat rapat paripurna khusus I Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung Periode 2003-2008 yang akan dilaksanakan tanggal 9 September 2003 mendatang. Sementara itu, keseluruhan mekanisme pengamanan untuk pilwalkot tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Polwiltabes Bandung.

Penegasan Warso tersebut disampaikan kepada wartawan usai rapat panitia pemilihan (panlih), Selasa (26/8). Menurutnya, pada Kamis (28/8) besok akan diadakan ekspose tentang aturan main pengamanan jalannya pilwalkot kepada seluruh pegawai dan wartawan yang meliput. Selain itu, tentang mekanisme pengamanan untuk rapat paripurna khusus I yang melibatkan 1.047 personel dari kepolisian dan Satpol PP akan dipimpin langsung oleh Kapuskodalops AKBP Supratman.

Demi kelancaran jalannya rapat paripurna khusus I, lanjut Warso, pihaknya mengimbau kepada partai-partai politik untuk tidak mengiklustrasikan satgasnya. Pada hari "H", kepolisian akan memblokir sebagian jalan di kawasan balai kota dengan membuat ring-ring pengamanan. Kalaupun ada parpol yang mengirimkan satgasnya, dipastikan mereka harus berada di luar ring.

"Meskipun rapat paripurna khusus I ini dilakukan secara terbuka, saya secara pribadi mengimbau kepada massa untuk tidak berbondong-bondong mengikuti acara pemilihan secara langsung karena jalannya pemilihan akan



disiarkan oleh TVRI dan RRI," ujarnya.

Menyinggung tentang anggota dewan yang akan menghadiri rapat paripurna khusus I, panitia akan melakukan karantina selama sehari sebelum hari pelaksanaan. Pertimbangan itu diambil sebagai kebijakan panitia untuk memperlancar jalannya rapat paripurna. Seluruh anggota dewan ditempatkan di hotel terdekat dari tempat pelaksanaan. "Karantina ini dinilai perlu demi tercapainya quorum dan kelancaran pemilihan," ungkapnya.

Sementara itu, untuk mekanisme pemilihan wali kota, menurut Warso, pada H-1 akan diadakan gladi bersih. Pada saat itu, ia kembali menegaskan pada seluruh fraksi untuk melindungi para anggotanya dari praktik *money politics* agar pilwalkot Bandung 2003-2008 dapat dijadikan contoh bagi kota lain.

**3.600 personel** Sementara itu, Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops.) Mapolwiltabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs. Supratman saat ditemui wartawan, kemarin, di ruang kerjanya, menjelaskan untuk mengamankan

pemilihan Wali Kota Bandung yang sebentar lagi akan digelar. Polwiltabes Bandung bekerja sama dengan Polresta Bandung Tengah akan menerjunkan sedikitnya 3.600 personel gabungan dari berbagai kesatuan.

"Selain itu, kita juga kemungkinan akan menerjunkan beberapa anjing pelacak, *water canon*, dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan disiapkan pula kendaraan tertutup, khusus berlapis baja untuk para anggota dewan bila telah selesai pemilihan karena dalam pemilihan ini yang akan bertarung itu adalah antara 'gajah dengan gajah'," katanya.

Mengenai pelaksanaan pengamanannya di lapangan nanti, yaitu dengan menggunakan sistem ring seperti waktu pengamanan pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu di Gedung Sate Bandung. Ring satu sekitar tempat gedung lokasi pemilihan yang ditempati selain oleh para kandidat calon wali kota, juga oleh anggota legislatif yang akan memilih. Ring dua di halaman sekitar gedung dan ring terakhir, yaitu ring tiga di luar halaman gedung.

Saat disinggung masalah keberadaan satgas atau ormas bila ada yang ikut mengamankan dalam pelaksanaan pemilihan wali kota tersebut, Supratman menyimpulkan sebaiknya satgas tidak usah ikut serta dan memercayakannya ke petugas.

Ia juga mengimbau khususnya kepada para *bobotoh*, masing-masing jagoannya supaya bisa menjaga ketertiban umum. "Pokoknya semua warga kota Bandung harus bisa menjaga keadaan Kota Bandung yang selama ini sudah kondusif," ujar Supratman. (A-72/A-89/din-nin-joh)\*\*\*



BER : Metro  
JGAL : 27 Agustus 2003 Hal. 4, Kol. 2.  
ANG : So. Sidi

# Polisi Akan Segera Mengusut Kasus Yanto

## Garut, Metro

Kasus Haryanto alias Yanto, siswa kelas enam SD Sinding 4 yang mencoba bunuh diri, akan segera diusut pihak Polres Garut. Tim yang akan mengusut itu kini sedang dipersiapkan oleh Kapolres Garut, AKBP Drs Syamsul Bachri.

Ketika dihubungi Metro, Selasa (26/8), Kapolres Garut membenarkan rencana pengusutan itu. Menurutnya, kendati pihaknya belum secara resmi mendapatkan laporan, kasus tersebut akan diusut. Semua orang yang diduga terlibat dalam kasus yang menyebabkan Yanto mencoba bunuh diri akan diperiksa. Jika kemu-

dian ada unsur pidana, maka akan diproses sampai ke pengadilan.

Menurut Kapolres, pihaknya akan mengkaji dulu penyebabnya. Masalahnya, kenekadan anak tersebut masih terkait dengan persoalan yang terjadi di sekolahnya. "Kita akan melacak dan mengusut penyebabnya, dan jika ada yang terbukti terlibat dan memenuhi unsur pidana, kita akan memprosesnya," janjinya.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Garut, Drs H Tidjani Zakaria, mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa Yanto. Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis itu, kalau saja di sekolah tidak terlalu banyak persoalan yang menyangkut biaya pen-

didikan, kemungkinan kasus Yanto tidak akan terjadi.

Saat ini, paparnya, di dunia pendidikan tidak lepas dari masalah biaya yang dirasakan memberatkan masyarakat. Berbagai produk penunjang belajar mengajar terus menyerbu sekolah, seperti buku-buku pelajaran dan lembar kerja siswa (LKS) dan alat keterampilan. Padahal semua itu tidak terlalu besar pengaruh positifnya dan sekadar membantu meringankan beban para guru.

Mestinya lembar kerja siswa itu dibuat oleh guru sendiri, namun sekarang malah dibuat oleh perusahaan dan produknya masuk ke sekolah lalu harus dibeli oleh murid. "Itulah persoalan dalam pengelolaan pendidikan saat ini,

dan harus menjadi pemikiran kita semua agar biaya pendidikan bisa ditekan serendah-rendahnya," ungkap H Tidjani Zakaria.

Dari rumah keluarga Yanto di Kampung Sinding, Kelurahan Muara Sinding, Kecamatan Garut Kota, dilaporkan sejumlah kalangan yang bersimpati terus berdatangan. Para tokoh asal Garut yang berada di Bandung, seperti pengacara kondang Dindin S Maolani SH, mantan wagub Jabar H Aboeng Kusman, dan tokoh lainnya, menyempatkan datang ke rumah Suryana sekaligus memberikan bantuan untuk Yanto. (stm)



SIARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
DANG HUBUNGAN MASYARAKAT

R : Gatra Media  
AL : 28 Agustus 2003, Hal. 1, Kol. 3  
Referensi

I, (GM).-

Untuk melakukan pengamanan saat pemilihan hingga pelantikan Walikota/Wakil Walikota Bandung masa jabatan tahun 2003-2008, Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Bandung telah meminta anggaran sebesar Rp 500 juta kepada pihak DPRD Kota Bandung. Demikian dikatakan DPRD Kota Bandung, Hj. Siti Masnun Samstati, S.H. di RD Kota Bandung, Rabu (27/8).

Masnun, anggaran sebesar itu tertuang di dalam anggaran dipergunakan untuk memanggarkan 3.600 anggota kepolisian berbagai tugas petugas Polisi Pamong Praja. Untuk pengajuan, pihak Polwiltabes Bandung telah menyerahkan proposal tentang pengamanan pilwalkot kepada DPRD Kota Bandung yang langsung diteruskan ke pihak Pemkot Bandung," katanya.

Dikatakan Masnun, anggaran yang diminta oleh pihak polwiltabes itu akan menjadi prioritas untuk disetujui karena pengamanan terhadap pemilihan dan pelantikan walikota/wakil walikota memang merupakan agenda yang telah diprioritaskan, baik oleh DPRD Kota Bandung maupun Pemerintah Kota Bandung.

Ditambahkannya, dari dana yang tersedia untuk proses Pemilihan Walikota Bandung sebesar Rp 1,5 miliar belum termasuk biaya pengamanan yang diminta oleh pihak polwiltabes. Sedangkan untuk biaya karantina yang akan dilakukan sehari sebelum dan setelah pemilihan belum dibicarakan.

Menurutnya, pihak DPRD Kota Bandung direncanakan hanya akan menginap di hotel terdekat dengan Gedung DPRD Kota Bandung. "Biaya karantina belum dibicarakan,

tapi kemungkinan lokasi karantina akan menggunakan Hotel Santika atau Hotel Holiday Inn," ujar Siti yang juga sekretaris panitia pemilihan (panlih), bukan anggota.

Berkaitan dengan dana yang telah dipergunakan oleh panlih hingga saat ini, Masnun menjelaskan, anggaran Rp 1,5 miliar untuk proses pemilihan hingga saat ini belum diketahui seberapa besar pengeluarannya. Sebab, hingga saat ini belum dilakukan rekapitulasi terhadap segala pengeluaran yang telah dipergunakan oleh panlih.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Enco Warsa kepada "GM" mengakui jika polwiltabes mengajukan dana untuk pengamanan saat pemilihan dan pelantikan Walikota/Wakil Walikota Bandung 2003-2008 (9 September dan 16 Oktober 2003). "Pihak polwiltabes sudah mengajukan dana pengamanan," katanya.

Menurutnya, untuk masalah keuangan ditangani langsung oleh

Ketua DPRD Kota Bandung. Kendati demikian, DPRD Kota Bandung sudah menyetujui jika anggaran untuk pengamanan pemilihan dan pelantikan Walikota/Wakil Walikota Bandung senilai Rp 300 juta. "Kalau pengajuannya saya kurang tahu, tapi yang disetujui Rp 300 juta," paparnya.

Sementara itu, Kepala Polwiltabes Bandung, Kombes Pol. Drs. Hendra Sukmana ketika dihubungi "GM", enggan berkomentar tentang proposal yang telah diajukan ke pihak DPRD Kota Bandung.

Hendra bahkan balik bertanya kepada "GM", "Siapa yang mengatakan hal tersebut. Tanya saja langsung kepada yang ngomong," tegas Hendra.

Meski demikian, Hendra mengungkapkan, pihaknya besok (Kamis, 28/8) akan melakukan ekspose tentang pengamanan pemilihan walikota hingga pelantikannya kepada DPRD Kota Bandung. (B.98/B.43)\*\*



: *Pikiran Rakyat*  
: 28 Agustus 2003, Hal 4, Kol. 3  
: *Sesial*

## Warga Cimahi Mengeluh, Polsek Pharmindo Jauh

BANDUNG, (PR).-

Warga masyarakat di wilayah Kec. Cimahi Selatan merasa kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dari Polsek Cimahi Selatan (Polsek Pharmindo) karena letak dan jaraknya jauh dari jangkauan warga. Apalagi, transportasi angkutan umum ke lokasi tersebut belum ada.

"Banyak keluhan dari warga ke Komisi A DPRD Kota Cimahi berkaitan dengan letak Polsek Cimahi Selatan yang berada di Kompleks Perumahan Pharmindo. Perumahan Pharmindo terletak di sebelah timur hingga cukup sulit bagi warga Cimahi Selatan," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Cimahi, Drs. H.D. Oland Siswantho, kepada "PR", Senin (25/8).

Hal senada juga diakui anggota Komisi A, Nyoman Sukadana, yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Cimahi. "Kalau warga Kec. Cimahi Selatan seperti Kel. Cibeber, Kel. Utama, dan Kel. Leuwigajah mau mengurus surat ke Polsek Pharmindo, harus mengeluarkan biaya transpor sampai Rp 20.000,00 karena sulit angkutan dan terpaksa naik ojek," katanya.

Bukan hanya lokasi yang kurang strategis, Nyoman juga memper-

soalkan ukuran kantor Polsek Pharmindo yang cukup sempit, hingga kurang representatif dalam melayani masyarakat. "Ruang tahanan juga sempit hingga tahanan harus berjejalan. Wilayah Kec. Cimahi Selatan termasuk rawan karena banyaknya pabrik dan permukiman padat hingga masalahnya menjadi kompleks," jelasnya.

Lebih jauh Oland mengatakan bahwa bagi warga Leuwigajah Kel. Utama, dan sekitarnya bila ada urusan pasti akan sulit datang ke Polsek Pharmindo karena tiadanya angkot. "Kalau mau laporan adanya kasus kejahatan, warga mengalami kesulitan sebab harus memutar ke daerah Cibeureum (perbatasan Kota Bandung dan Kota Cimahi dulu-red.) cari angkot ke jurusan Perumahan Pharmindo. Setelah itu baru naik ojek atau becak lagi hingga butuh ongkos banyak," ujarnya.

Sementara itu, Nyoman Sukadana mengusulkan agar lokasi Polsek Pharmindo dialihkan ke Kel. Utama berdekatan dengan kantor Kec. Cimahi karena mudah dijangkau dari semua arah. "Akan memudahkan koordinasi dan komunikasi antara unsur kecamatan dengan Polsek," ungkapnya. (A-71)\*\*\*



JM BER : Gada media  
ANGGAL : 29 Agustus 2003 Hal. 5, Kol. 1  
DANG : Komnas HAM

*Irjen Pol. Dadang, "613 Orang Di-BAP"*

# Polda Jabar Tahan 27 Penjarah Kayu

GEDUNG SATE, (GM).-

Operasi "Wanalaga 2003" yang dilancarkan jajaran Polda Jabar selama Agustus, berhasil menahan 27 orang dan 613 orang lainnya di-BAP (berita acara pemeriksaan) karena terlibat kasus perambahan dan penjarahan kayu di 3 lokasi. Yakni Hutan Talaga Bodas, Papandayan, dan Hutan Sancang, Kab. Garut.

Demikian diungkapkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Drs. H. Dadang Gani saat memberikan paparan dalam rapat koordinasi penanggulangan kekeringan di Gedung Sate DPRD Jawa Barat Jln. Diponegoro Bandung, Kamis (28/8).

Menurut Dadang, para penjarah hutan ditangkap di Hutan Talaga Bodas sebanyak 170 orang dan Hutan Gunung-Papandayan serta Sancang 353 orang.

Dijelaskan kapolda, pihaknya

mengalami hambatan dalam "Operasi Wanalaga" ini, misalnya adanya dukungan terselubung dari sebuah LSM dan tidak adanya kesepakatan yang transparan antara Perhutani dengan petani penggarap. Selain itu, kata Dadang, muncul juga tuntutan dari sebuah kelompok mahasiswa se-Garut agar tersangka perambahan hutan dibebaskan dari tahanan.

Tak hanya itu, kata Dadang, belum lama ini juga muncul surat protes dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Komnas HAM yang menyatakan Operasi Wanalaga Polda Jabar dianggap melanggar asas hak asasi manusia.

Sementara itu, Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Ir. H. Momo Noerdiana dalam pernyataan persnya menyatakan, kerusakan dan perusakan hutan ter-

jadi secara besar-besaran mulai tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat di Indonesia.

Di tahun 1999, kata Momo, tercatat 108.981 pohon hilang akibat pencurian, sementara di tahun-tahun sebelumnya (pra-reformasi) angka tertinggi akibat pencurian pohon hanya 9.402 batang di tahun 1997.

Menurut Momo, maraknya gangguan keamanan hutan mengakibatkan 110.355,47 ha kawasan hutan menjadi tanah kosong. Tanah kosong tersebut direncanakan akan selesai direboisasi secara bertahap hingga tahun 2007. Untuk tahun 2003, reboisasi dilaksanakan pada areal seluas 21.248 ha, 2004 seluas 28.386,43 ha, 2005 seluas 24.612,35 ha, 2006 seluas 20.095,35 ha, dan tahun 2007 pada areal 16.013,58 ha.

Momo menjelaskan, akibat pencurian kayu dan perusakan hutan tersebut negara dirugikan 396.182 pohon atau senilai Rp 83 miliar. Sedangkan akibat perambahan hutan mengalami kerugian 37.471,67 ha atau senilai Rp 7 miliar dan akibat kebakaran hutan 28.365,79 ha atau Rp 2 miliar.

Momo menjelaskan, dalam menangani gangguan keamanan hutan, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, katanya, setiap pencurian atau perusakan hutan akan ditindaklanjuti dengan peningkatan upaya preventif dan preventif melalui penyuluhan kayu ilegal dan lingkungan hidup, gelar perkara, meningkatkan pengawasan peredaran hasil hutan yang antara lain melalui koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan instansi terkait. (B.83)\*\*



R : *Pikiran Rakyat*  
AI : *Siaran Resmi J/ur : J/ur I*  
J : *Sekeloa*

## Polwil Mengantisipasi Kemungkinan Teror Bom

*Biaya Pengamanan Pihwalkot Rp 596 Juta*

BANDUNG, (PR).-

Polwiltabes Bandung menekankan perlunya tindakan antisipasi terhadap kemungkinan teror bom saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2003-2008 sebab ancaman teror bom telah menjadi isu nasional.

Kapolwiltabes Bandung Kombes Pol. Drs. Hendra Sukmana menegaskan hal itu dalam presentasinya yang disampaikan Koordinator Pengamanan Kabag Ops. AKBP Supratman, dalam "Ekspose Pengamanan" di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (28/8).

Menurutnya, dengan adanya kasus peledakan bom di beberapa tempat, Polwiltabes mengingatkan semua pihak untuk segera memberikan informasi tentang isu-isu yang beredar di masyarakat sehingga ancaman teror bom bisa diantisipasi secara cepat. "Teror bom ini jangan kita anggap sebagai teror rutin, kalau dianggap seperti itu akan masuk ke tempat kita," tegasnya.

Selain itu, pengamanan perlu dilakukan untuk antisipasi unjuk rasa, bentrok fisik antar pendukung calon wali kota, teror terhadap calon wali kota atau anggota DPRD, penculikan atau penyanjeraan, sabotase, perusakan, kemacetan atau kecelakaan lalu lintas, *money politics*, dsb.



Untuk pengamanan pemilihan Wali Kota Bandung, tenaga pengamanan akan mencapai sekira 2.187 personel, terdiri dari anggota Polri sebanyak 1.987 personel ditambah anggota TNI sebanyak 2 satuan setingkat kompi.

Pembagian pengamanan akan dibagi menjadi tiga ring, yang dikonsentrasikan pada tiga lokasi utama. Ring I meliputi Gedung DPRD dan Pemkot Bandung. Petugas pengamanan dalam Ring I di antaranya 4 SSK dalmas, tim jil-handak, tim satwa wiltabes, 1 unit kendaraan taktis, satu unit *water canon*, dll.

Ring II meliputi seluruh sentra ekonomi seperti perkantoran, objek vital dan pusat perdagangan di

wilayah Kota Bandung. Pengamanan Ring 2 akan melibatkan 2 SSK Resto Bandung Barat, 2 SSK Resto Bandung Tengah, dan 2 SSK Resto Bandung Timur.

Sementara itu, Ring III dipusatkan pada batas-batas wilayah kota Bandung seperti Tol Buah Batu, Tol Moh. Toha, Tol Pasir Koja, Tol Pasteur, Setiabudi-Lembang, Cibiru-Cileunyi, Kopo-Soreang, Leuwipanjang-Cibaduyut, dan Cimindi.

Supratman mengimbau seluruh karyawan di jajaran Pemkot Bandung untuk tidak membawa kendaraan karena ruang parkir dipergunakan para undangan. Nantinya, tamu dan undangan yang menghadiri proses pemilihan, harus melalui pemeriksaan di pintu masuk dengan alat detektor.

Dana

Mengenai rencana kebutuhan anggaran proses pemilihan Wali Kota Bandung, jumlah total yang dianggarkan sebesar Rp 596.036.000,00 dengan alokasi dana untuk pra kegiatan pengamanan pemilihan wali kota, pemilihan dan pelantikan serta perlengkapan yang dibutuhkan.

Supratman juga menambahkan angka-angka yang diajukan sebagai anggaran dana ini belum mencapai jumlah yang mutlak. (A-56/din/ina-job)\*\*\*



OLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
SIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

ER : *Pikiran Rakyat*  
GAL : *1 September 2003 Hal. 18. Kol 1*  
JG : *Sesuai*

### Harapan untuk Bapak Kapolda Jabar

MEMBACA HU "PR", Senin (18/8) hlm. 5 kolom 5-6, "Polda Jabar proses pabrik tekstil PT PI di Rancaekek dilaksanakan setelah memproses 2 (dua) pabrik di Batujajar Cimahi karena mencemari lingkungan Saguling". Saya teringat kepada pencemaran lingkungan di sekitar Rancaekek di Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh sebuah/beberapa pabrik, mungkin sudah ada setahun lalu.

Di masa Kapolda Jabar terdahulu, saya tidak atau belum pernah mendengar bahwa pihak Polda Jabar memproses mengenai hal tersebut. Timbul pertanyaan, ada apa gerangan? atau bisa saja *suudon*, apakah karena adanya bekas pejabat kepolisian *nongkrong*/bertugas di sana yang tidak memikirkan *ngaruhnya* para petani. Mungkin seperti peribahasa "Lain koki lain masakan lain, ladang lain belalang".

Sekarang yang menjadi Kapolda Jawa Barat Bapak Drs. Dadang Garnida *terahing* Sumedang, semoga saja dengan gebrakan ini Bapak Drs. Dadang Garnida akan memihak kepada penderitaan masyarakat (petani). Saya selaku masyarakat bawah -- dengan diiringi keikhlasan dan ketulusan hati yang mendalam -- mendoakan *mugiya* Bapak Drs. Dadang Garnida *sakulawargi salamina kening Magfirah ti Alloh SWT salami nyepeng tugas-ngemban nagara di mana bae. Amin.*

Saya mengharapkan yang terhormat Bapak Drs. Dadang Garnida jangan dahulu meninggalkan Jabar sebelum daerah Jawa Barat *kaleber Gemah Ripah Lohjinawi Genah Merenah Tur Tumanjali.*

H.A. Soetisna, B.A.  
Jln. PSM No. 8 Bandung



UMBER : Melre  
ANGGAL : 1 September 2007  
IDANG : SS/07

# Operasi Wanalaga Menuai Badai

Peliput:  
Mostafa Fatah  
Ima Fibi Herawati  
Dian Hendrayana

PENGGARAP ladang di  
hutan kawasan Kecamatan  
Pasirwangi, Sukaresmi, Cisur-  
upan, Wanalaga dan Cibalong  
Laget. Tiba-tiba saja, rumah  
mereka dibakar petugas dari

Kepolisian yang melaksanakan Operasi Terpadu  
Wanalaga Lodaya.

Tak tanggung-tanggung, dalam satu kali kebakaran 40  
orang petani dan bunda-sayur mayur ditangkap.  
Mereka terpolisi berdesak-desakan di sel tahanan  
Polres Garut.

Wanalaga Lodaya adalah operasi yang dipela-  
harikan bersama kepolisian, yang dimulai 11 Agustus  
lalu. Operasi ini dilaksanakan, karena hutan-hutan di  
Garut kemusakannya sudah semakam parah.

"Operasi ini untuk penyelamatan dari tindakan  
pencurian kayu yang dilakukan oleh oknum-oknum tak  
bertanggung jawab," kata Kapolda Jabar, Ijen Dis-  
dadang Garmida, kepada *Metro*, Jumat (22/8).

Hasilnya, operasi tersebut ternyata menimbulkan pro-  
kontra. Pasalnya, sedikitnya 12 ribu petani dan buruh  
tani kehilangan sumber nafkah. Bahkan 130 orang  
warga yang tinggal di kawasan hutan lindung Sancang  
Kecamatan Cibalong terpaksa harus menumpang di  
rumah leluarganya. Rumah mereka hancur setelah  
dibakar aparat dalam operasi tersebut.

"Saya benar-benar takut dan tidak tahu lagi harus  
bagaimana. Rumah sudah tidak ada, suami di tahanan,  
pekerjaan tidak punya. Pokoknya dunia ini rasanya mau  
kiamat saja. Ke mana saya harus meminta perlindungan,"  
kata Ny Kokom (40) warga kompleks hutan lindung  
Sancang.

Bahkan diantara istri-istri mereka ada yang mendatangi  
DPRD Jabar di Bandung, Rabu (20/8). Setidaknya 100  
orang istri petani Garut didampingi oleh aktivis Serikat  
Petani Pasundan (SPP) untuk meminta keadilan.

"Satu orang lain merayakan kemerdekaan dengan  
pembantaian, kami malah berduka karena suami diambil  
aparat dengan alasan merambah hutan, rumah kami di-  
bakar, padahal mereka tulang punggung keluarga," keluh  
Ny Susi (50), istri dari Uch Saetulloh (56) salah satu  
petani yang ditangkap.

Operasi menertibkan penggarap tanah di hutan,  
sebetulnya bukan yang pertama di Garut. Sebelumnya,  
ratusan orang sempat dijatuhi hukuman di pengadilan,  
mereka ditangkap aparat dengan tuduhan pencurian kayu,  
merambah dan menjarah kawasan hutan dan tuduhan  
lainnya terkait soal hutan. Namun hukuman itu ternyata  
tidak membuat mereka jera. Mereka tetap menjarah hutan.

"Bagaimana bisa jera, para pemilik modal tetap  
menjadi pemain ulung. Rakyat kecil memang selalu  
menjadi korban dan akan terus seperti itu," ungkap  
Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat (Yape-  
mas) Garut Ny Nissa Wargadipura.

Benarkah? Yang pasti Polda Jabar tetap bakal me-  
lancarkan operasi tersebut. Kapolda Dadang pun  
sudah mengambil sikap, takkan menghiraukan protes,  
protes dari masyarakat.



IMBER : Gita Media  
NGGAL : 2 September 2005 HarL  
DANG : Se Siar

## Kapolri, Polwan Punya Keterbatasan Kodrati"

CICENDO, (GM).-

Meski telah berusia 55 tahun, namun keberadaan polisi wanita (polwan) masih dirasakan belum sejalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan anggota polwan adalah perempuan, yang secara kodrati mempunyai keterbatasan.

Demikian disampaikan Kapolri Jenderal Polisi, Da'i Bachtiar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. H. Dadang Garnida, S.H., M.B.A. pada syukuran HUT ke-55 Polwan di Gedung Bhayangkara, Jln. Cicendo Bandung, Senin (1/9).

Di samping mempunyai keterbatasan, kata Kapolri, polwan mampu menyaingi polisi laki-laki. Disebutkannya, saat ini telah ada polwan yang menjabat sebagai kapolres, wapolres, kapolsek, waka-polsek, dan kapospol. Keterbatasan itu sebenarnya dapat diatasi dengan senantiasa mengobarkan semangat untuk terus meningkatkan kemampuannya masing-masing.

Visi dan misi polwan, lanjut Kapolri, sama dengan anggota Polri lainnya, yaitu selaku pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Polwan juga harus mampu menampilkan pada setiap langkah, baik selaku pemelihara kamtibmas maupun selaku penegak hukum. Yang diikuti dengan rasa ketulusan dan keikhlasan bagi totalitas pengabdianya kepada masyarakat secara keseluruhan.

Dengan itulah, profesionalisme yang dimiliki polwan akan memberikan makna serta akan diterima sebagai wujud dari pemenuhan tuntutan masyarakat atas keberadaan polwan.

Selanjutnya, diungkapkan Kapolri, dalam waktu dekat ini Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi, yaitu pemilu yang dalam pelaksanaan pengamanannya nanti akan melibatkan polwan. Polwan diharapkan dapat menjadi penyejuk dalam segala suasana yang berkembang. Sehingga, mampu memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Kapolri berharap polwan lebih berperan aktif dan mengambil bagian dalam pesta demokrasi tahun 2004 nanti.

Sementara itu, usai acara kapolda yang ditanya tentang Pemilu 2004 menjelaskan, dalam pengamanannya nanti Polda Jabar akan menurunkan 2/3 dari 695 orang anggota polwan. (B.96)\*\*



SUMBER  
TANGGAL  
BIDANG

Pikiran Rakyat  
September 2002, Hal. 2, Kolom 1

## Keberadaannya Mampu Perbaiki Citra Polisi Peran Polisi Wanita Harus Terus Dioptimalkan

BERDASARKAN ajaran teori yang menyatakan bahwa polisi wanita (polwan) merupakan bagian integral dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka polwan mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsi sebagai alat penegak hukum, sipat-sipat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, membina dan mewujudkan kemitrahan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sepatutnya kini, peran polwan haruslah sudah teroptimalkan dengan pemisahan fungsi dan peran yang optimal pula. Lain halnya dengan anggapan bahwa polwan tidak mampu berperan di bidang penegakan hukum, operasi dan penyelidikan, serta lalu lintas dan lain-lain.

Jak dunyana, semua itu hanyalah kembali menjadi kesejatan bali dan kemudian menggelayut menjadi asa. Betapa tidak, sampai kini, penghormatan terhadap pender di lingkungan Polri tampak belum optimal, meski terdapat "diskriminasi" tampak mulai berkurang. Sebagai aset Polri yang potensial untuk ditugaskan dalam segala bidang garapan, polwan masih dikecualikan.

Peran polwan masih cenderung umum dan terbatas pada bidang-bidang tertentu. Paling-paling, yang diunggulkan ke pondak mereka adalah tugas yang identik dengan dunia kewanitaan, seperti bidang pembinaan masyarakat, pendidikan dan latihan, serta tata usaha atau administrasi.

Realitas serupa itulah yang menjadikan bahwa jika peran polwan masih sebatas sebagai pendamping atau pelengkap saja. Meskipun saat ini telah ada beberapa polwan yang menjadi kapolda dan kapolda, hal itu belum mampu menjadi penanda optimalnya penghormatan terhadap gender di Polri. Demikian pula halnya dengan adanya polwan yang mengungsi tugas kepala satuan (Kasat) atau mulai diikutsertakan dalam jalur pembinaan di Akademi Kepolisian melalui pendidikan 2001 silam.

Ternyata, masih banyak unit kerja atau lembaga yang ada di lingkungan Polri yang dianggap tabu dan belum layak dipegang oleh sosok polwan. Padahal, banyak polwan yang berprestasi dan profesional serta layak menjadi pimpinan di lingkungan Polri. Meski telah menunjukkan usaha menghormati gender sesuai tuntutan zaman, kebijakan pimpinan Polri selama ini masih terkesan belum percaya betul terhadap kemampuan para polwan, dengan memandakannya alasan keterbatasan jumlah polwan.

Adalah sebuah keharusan untuk memenuhi ketidutuhan tersebut seiring dengan makin kompleksnya tuntutan dan pengannya situasi negatif terhadap Polri. Ternyata, keberadaan polwan mampu menjadi buntut dalam memperbaiki citra Polri. Diakui atau tidak, jika banyak polwan di lapangan sedikit, itu banyak mampu meredakan emosi masyarakat terhadap Polri. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan "tempat jalan raya". Kesabaran, kecermatan, dan ketidakkerasannya (meski bisa tetap bersikap tegas terhadap para pelanggar hukum), setidaknya telah memberi warna tersendiri dalam kehidupan Polri.

Karena fakta itulah, sekarang ini tidak ada pilihan kecuali harus mengoptimalkan peran polwan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri. Polwan jangan hanya sekadar pendamping atau pendukung, tetapi harus tampil sebagai garda terdepan dalam berbagai bidang tugas atau fungsi Polri, seperti dalam tugas kerekesam, sabhara, lalu lintas, serta intelijen.

Ternyata, menjadi seorang polwan bukanlah tanpa masalah. Malah, mereka terpaksa dihadapkan kepada dunia yang sangat penuh tantangan. Keberhasilan sebagai polisi dan kesuksesan membina rumah tangga. Biasanya, kodrat polwan sebagai seorang wanita adalah menjadi pendamping bagi suami serta ibu bagi anak-anaknya. Semangat untuk berprestasi dan kesuksesan untuk mencapai karier di Kepolisian harus pula diikuti keberhasilan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Sebagai bagian integral Polri, mereka harus tetap mampu meningkatkan profesionalisme. Halikan, diharapkan mampu menjadi idola masyarakat di mana pun berada, baik di rumah dengan tetangga maupun saat berada di lapangan tugas. Apalagi saat ini polwan mendapat kesempatan yang luas untuk menduduki jabatan strategis, semacam kapolda, kapolda, bahkan Gubernur. Tentunya ketika jabatan

strategis ini diisngkan, in ke pondak semakin beratlah masalah yang kemudihan harus mereka pecahkan.

KINI 55 tahun sudah polwan melangkah dan dalam tugas. Kepolisian negara ini. Perlahan-lahan, mereka diberikan tugas-tugas yang selama ini ditakutkan bagi mereka, reserse. Ya, kini setiap markas kepolisian telah memiliki satu unit kerja dalam satuan reserse yang khusus menangani polwan. Unit kerja itu bernama Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Memang, jika dilihat dari jumlah tugasnya, RPK hanya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sepertinya, untuk masalah polwan, secara operasional dalam tugas-tugas kerekesam, pimpinan Polri masih dipromosikan oleh satu masalah kriminal. Tetapi wanita Pasahya, salah satu polwan di RPK, akan dipersalahkan karena dianggap mengeksploitasi. Sebagaimana mereka akan dianggap melakukan diskriminasi jika mereka tidak melibatkan wanita dalam suatu tugas.

Seiring perjalanan waktu, ternyata ketika bertugas di lapangan, polwan mendapat tempat di hati masyarakat Pasahya, sebagai institusi, polisi tidak hanya diharapkan bertugas sebagai "matahari" dalam mengakkan hukum. Terkadang, polisi juga diharapkan menjadi semilir angin bahkan menjadi gemerik air dalam bertugas. Akhirnya, semilir angin dan gemerik air ini hanya bisa terembus dan terali dari sosok polwan.

Dengan begitu, masyarakat akan merasakan sebuah suasana yang nyaman. Selama ini, karena institusi kepolisian hanya memiliki "matahari", penduduk buana monah perah kepantasan. Mereka tak tahan menerima "sinai" terus menerus. Mereka membutuhkan semilir angin dan gemerik air.

Meminjam istilah Y. Herman Ibrahim suatu saat, polisi RI adalah "polisi negara", bukan "polisi rakyat". Maka, tak heran jika suatu saat seorang pendidik bertemu polisi, mereka akan sedapat mungkin bersikap ramah, bukannya berdegang sapa dan sedikit beramahi-lamahi. Setidaknya momentum ulang tahun ke-55 Polri akan ini dapat dijadikan sarana refleksi guna memberikan kesempatan bagi polwan bertugas di lapangan di segala bidang. "Rambate rahay", kata Rhoma Irama dan Elly Sukaesih (Hamiyullah) "PR"\*\*\*



Pikiran Rakyat  
3 September 2003, Hal 2, Kol 7  
Kriminalitas

## Polda Ciduk Pengedar Putaw

BANDUNG, (PR).-

Jajaran Reserse Narkotika Direktorat Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Dit Narkoba) Polda Jabar menciduk seorang pengedar heroin. Din (25), warga Sukasari Bandung, Senin (1/9). Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sedikitnya sembilan paket putaw siap jual.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Komisaris Drs. H.M. Faizal Saladin didampingi Kasat I Dit Narkoba Komisaris Polisi Drs. Yasirman kepada wartawan, Selasa (2/9), Din yang diduga cukup lama menjadi pengedar heroin itu, saat ini diperiksa intensif. "Siapa tahu kami bisa mengungkap jaringan terputusnya," ungkapnya.

Menjelaskan kronologis penangkapan terhadap Din, Faizal mengatakan segalanya berawal dari penyelidikan yang dilakukan

reserse dit narkoba dalam rangka "Operasi Antik Lodaya 2003" yang diselenggarakan polda sejak 19 Agustus hingga 19 September 2003 mendatang. Penyelidikan dan operasi dilakukan kepolisian untuk meminimalkan peredaran narkotika di Jawa Barat.

Hasil penyelidikan itu, reserse mendeteksi adanya peredaran narkotika khususnya putaw di daerah Sukamiskin. Lebih spesifik lagi, kepolisian mengendus bahwa pelaku pengedarannya adalah Din, warga Sukasari Bandung. Ia diduga merupakan "pemain" yang sudah lama mengedarkan narkotika.

"Mendapat informasi seperti itu, kami segera mendatangi rumah Din dan melakukan pengeledahan. Ternyata benar, Din seorang pengedar. Saat kami menggeledah rumahnya, kami menemukan

barang bukti sembilan paket putaw siap edar," kata Yasirman.

Seketika itu juga Din digiring ke polda untuk dimintai tanggung jawabnya. Din, kata penyidik, akan dijerat Pasal 78 UU No. 22 Tahun 1992 tentang Narkotika. Jika di pengadilan nanti terbukti bersalah, Din akan dituntut hukuman maksimal 12 tahun.

Menurut penyelidikan petugas, dalam operasinya tersangka Din dibantu rekannya yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO), Ed Tang. Ed Tang saat ini dalam pengejaran petugas dan diduga berada di Jakarta. Menurut Kepala Bidang Humas Kombes Faizal, petugas tengah mengembangkan kasus itu lebih lanjut. "Mudah-mudahan ada hasilnya supaya yang diungkap lebih besar lagi. Hasilnya nanti kami informasikan lagi," katanya. (A-112)\*\*\*



R : Gata Meelia  
AL : 3 September 2003, Hal. 3, Kol. 1  
G : So Srida

## "Jabar Benar" Belum Terealisasi

MAPOLDA, (GM).-

Program "Jabar Benar" (Jawa Barat Antinarkoba), sampai saat ini belum juga terealisasi. Padahal, planning program tersebut diperkirakan akan dilaksanakan dua minggu setelah malam penggalangan dana dan pencanangan "Jabar Benar" pada 27 Juli lalu.

"Kendala yang dihadapi, di antaranya karena dana yang terkumpul belum mencapai 100%, meskipun pihak panitia telah berusaha 'menagih' janji donatur yang bersangkutan saat malam penggalangan dana," ungkap Karo Bina Mitra Polda Jabar sekaligus ketua panitia harian "Jabar Benar", Kombes Pol. R. Kusman saat dikonfirmasi "GM", Selasa (2/9). Menurut dia, untuk melaksanakan program tersebut, harus selaras dengan persiapan dananya juga. Sampai saat ini, lanjutnya, penggalangan dana belum tuntas semuanya sehingga pihaknya belum bisa melaksanakan apa yang telah dicanangkan dalam program Jabar Benar.

"Sebenarnya bukan kendala besar karena kami pun tidak tinggal diam. Justru dengan keadaan seperti ini persiapannya akan lebih matang," kilahnya sambil menambahkan, sesuai dengan komitmen kapolda bahwa program ini akan disinkronkan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan pihaknya hanya sebagai pelaksana program.

Senada dengan itu, pembantu umum kepanititan Jabar Benar, Catur P. Sulistyawan mengungkapkan, pihaknya hanya melakukan tugas yang menyangkut bidang operasional, sedangkan untuk administrasi dan kebijakan dilakukan oleh pemprov. Belum dipastikan kapan waktunya, namun yang jelas pada waktunya nanti akan dilaksanakan serah terima dari polda ke pemprov atau ke gubernur langsung.

"Program ini meleset dari perkiraan, namun dijamin pertengahan September ini program-program Jabar Benar akan mulai dilaksanakan. Seperti akan menyelenggarakan reli wisata keluarga yang tujuannya untuk kampanye anti narkoba, lokakarya, dan semiloka, dll.," ujar Catur.

Mudah-mudahan, lanjutnya, dana akan segera terkumpul dan dapat menyukseskan semua program yang telah direncanakan. Namun, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membangun laboratorium untuk pengujian terhadap penyalahgunaan narkoba.

"Untuk tempat rehabilitasi dan sel tahanan penyalahgunaan narkoba, sudah pasti akan dibangun tapi harus dengan dana yang besar. Rencana ini mungkin untuk jangka panjang jika dananya sudah memungkinkan," jelasnya.

Sementara itu, menurut salah seorang anggota panitia Jabar Benar kepada "GM", ia sangat konsen terhadap program Jabar Benar, namun kenyataannya program ini belum terealisasi sampai saat ini. "Padahal, penggalangan dana dan pencanangan program sudah lebih dari sebulan," ujarnya.

Ia memberi contoh adanya kepedulian dari salah satu warga Bojongsong. Mereka menuangkannya dalam bentuk spanduk bahwa warga Bojongsong sangat mendukung program Jabar Benar. Hal ini menandakan masyarakat juga sangat memperhatikan betul terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. "Makanya saya minta kepada pihak terkait untuk segera mengimplementasikan program tersebut," ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya hanya mengingatkan bahwa kasus narkoba dan obat-obat terlarang lainnya sudah termasuk kejahatan transnasional. Bukan hanya orang yang berduit yang bisa menggunakan barang haram tersebut, tapi mereka yang tidak berduit pun bisa. bahkan pelajar.

"Jika mereka sudah kecanduan, untuk mengembalikannya kepada kondisi semula sangat susah. Karena itu, jangan sampai diabaikan. Jika ada warga yang kedapatan menyalahgunakan narkoba, harus segera ditangani oleh orang-orang profesional. Mudah-mudahan saja program 'Jabar Benar' dapat segera diimplementasikan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkoba. Di antaranya dengan melakukan kampanye, penyuluhan, penyuluhan, seminar, reli wisata, dll. (B.96)\*\*



SER *Pikiran Rakyat*  
GAL *1 September 2003, Hal. 2, Kol. 1*  
NG *Saslat*

### Kapolri Resmikan Lapangan Tembak



KAPOLRI Jenderal Drs. H. Da'i Bachtiar direncanakan meresmikan lapangan tembak di Mapolda Jabar, Sabtu (6/9). Bersamaan dengan itu, akan diselenggarakan pula lomba menembak dan memancing dengan hadiah sebuah sepeda motor. Menurut Kepala Bidang Humas Kombes Drs. H.M. Faizal Saladin, kedua jenis perlombaan diperuntukkan bagi umum, tidak untuk anggota Polri saja. "Bagi yang berminat mengikuti silakan datang ke polda. Khusus untuk lomba memancing dipungut uang pendaftaran Rp 150 ribu," ujarnya seraya mengatakan bahwa khusus lomba menembak, dimaksudkan sebagai sarana uji coba menembak sekaligus pembinaan bagi pemilik senjata api karet atau tajam. (A-112)\*\*\*



IBER  
GGAL  
ANG

*Pikiran Rakyat*  
4 September 2003, Hal. 4, Kol. 7  
Kriminologi

Hotel-hotel Diduga Banyak Menunggak Pajak?

## Polda Jabar Harus Tangani Kasus Pajak

BANDUNG, (PR).-

Kepolisian Daerah (Polda) Jabar hingga saat ini belum menangani kasus yang menyangkut penunggak pajak kendati sudah ada kerja sama antara polda dengan Kanwil Pajak di Jawa Barat. Polda baru menangani dan memproses kasus pencurian listrik setelah bekerja sama dengan PT PLN Jabar.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Humas Kombes Drs. H.M. Faizal Saladin saat ditanya "PR", Rabu (3/9). "Soal perpajakan belum ada hasilnya," ujarnya sesaat sebelum mengikuti rapat para pejabat utama polda di Mapolda Jabar, kemarin.

Fakta itu dinilai cukup mengundang pertanyaan banyak orang. Pasalnya, di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung masih banyak institusi penunggak pajak yang masih bebas berkeliaran. Menurut sumber "PR" salah satu institusi yang diduga banyak menunggak itu adalah hotel-hotel di Bandung.

Diperoleh keterangan, mencuatnya kasus "komputer on-line" pun pada awalnya karena soal pajak itu. Seperti diketahui, komputer on-line dicanangkan Pemkot Ban-

dung adalah untuk memantau pemasukan hotel dari tamu yang datang dan untuk lebih meningkatkan pemasukan pemkot dari pajak.

Usaha itu banyak ditentang kalangan hotel karena khawatir pemasukannya diketahui oleh pemkot. Akhirnya, kalangan hotel dengan meminta bantuan sebuah pihak melaporkan komputer on line sebagai sebuah proyek fiktif dan bernuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Padahal, proyeknya sendiri tidak fiktif dan tidak bernuansa KKN.

Anehnya, kendati demikian, polda terus mengusut kasus komputer on line itu. Sementara itu, hotel-hotel yang jelas-jelas tidak mau "belangnya" ketahuan dibiarkan bebas. Padahal, Kapolda Irjen Pol. Drs. Dadang Garnida saat menandatangani kerja sama dengan Kanwil Pajak Jabar telah berjanji akan menangani soal penunggak pajak bersama-sama dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak.

### Listrik

Mengenai hasil penanganan kasus pencurian listrik, Faizal mengatakan selama dua kali operasi,

yakni dari tanggal 18 Juni hingga 30 Juni dan 6 Agustus hingga 22 Agustus, Polda Jabar setidaknya menemukan 30 kasus di 30 lokasi. Dari 30 kasus itu, sebagian diproses oleh kepolisian, sebagian lagi hanya diberikan tindakan administratif oleh PT PLN Jabar.

"Sebagian di antaranya juga ada yang diwajibkan menambah daya karena daya listrik yang dimiliki pemilik rumah atau perusahaannya kurang, padahal memerlukan daya listrik besar," kata Faizal. Termasuk yang diberikan tindakan administratif adalah yang saluran listriknya tidak seperti yang di haruskan PLN, atau segel alat pengukur daya listriknya rusak atau berpindah tempat.

Menurut Faizal, dari seluruh Jawa Barat, perusahaan yang paling banyak menerima tindakan administratif terdapat di Kabupaten Bandung, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten Karawang. Seperti diketahui, di tiga kabupaten atau kota itu cukup banyak terdapat pabrik atau perusahaan. Diduga untuk menekan biaya operasional, mereka lalu mencuri listrik. (A-112)\*\*\*



SUMBER  
TANGGAL  
BIDANG

Gatra Media  
7 September 2003 Hal. 1 Kol. 7  
So. Siat.

## Mendukung Rancangan "Jabar Benar 2003" Polisi Giatkan "Sweeping" Narkoba

MAPOLRES, (GM).-

Guna mendukung pelaksanaan rancangan "Jabar Benar 2003" (Jawa Barat Bebas Narkoba), Polres Bandung terus menggiatkan *sweeping* ke berbagai tempat yang dicurigai rawan peredaran narkoba. Bahkan, lembaga pendidikan pun tidak terlepas dari sasaran operasi tersebut. Demikian dikatakan Kapolres Bandung, AKBP Drs. Edward Syah Pernong, S.H. kepada "GM", Rabu (3/9).

Kapolres yang didampingi Kasat Narkoba, AKP Judie Khaerul Qomar, S.H. dan Kaur Binops Satnarkoba, Iptu Hotben Gultom menegaskan, Jabar Benar 2003 bukan hanya slogan, tapi harus diimplementasikan. Antara lain, dengan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan narkoba.

"Upaya pencegahan dan penanggulangan salah satu penyakit masyarakat ini tidak hanya pada masyarakat umum, tapi juga bagi anak-anak sekolah. Karena, bisa dilihat sekarang peredaran narkoba sudah marak di lingkungan sekolah," ujar kapolres, seraya menambahkan, dengan dilakukan kegiatan semacam ini, selain manfaatnya dapat dirasakan, juga bisa memberi kontribusi langsung.

Sempat kaget Sementara itu, guna melanjutkan *sweeping* yang dilakukan satuan narkoba, hari ini (Rabu, red) akan melakukan *sweeping* di SLTP Negeri 2 Cimahi. Walaupun dengan

sikap bersahabat, kedatangan para anggota tersebut ternyata tetap mengagetkan para guru dan siswa yang saat itu kebetulan sedang melakukan proses belajar mengajar.

"Saya sempat kaget ketika dipanggil teman yang mengatakan ada para petugas dari Polres datang ke sekolah ini," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SLTP Negeri 2 Cimahi, Hasan Busori, S.Pd.

Menurut Hasan, setelah mengetahui bahwa para petugas kepolisian itu hanya akan melakukan razia narkoba, ia kembali tenang. "Saya berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di sini," ujarnya.


Hal senada dikatakan Wakil Kepala Sekolah SLTP Negeri 2 Cimahi, Drs. Ena Laksana. "Biasanya, kami setiap bulan melakukan razia. Namun, sampai sekarang kami belum menemukan barang-barang seperti narkoba dan senjata tajam," lanjutnya.

Sementara itu Kasat Narkoba AKP, Judie Khaerul Umar kepada "GM" mengatakan, sampai saat ini beberapa sekolah yang sudah dilakukan *sweeping*, antara lain SMK Taruna Mandiri, SMK Pariwisata SMU Pasundan 2 Cimahi, SMU Pasundan 3 Cimahi, SLTP Cibeurum, dan SLTP Negeri 2 Cimahi. Sedangkan untuk perguruan tinggi baru Universitas Ahmad Yani (Unjani). (B.97)\*\*



melic  
4 September 2003. Hal. 5, Kot. 4  
Sosiad

## Terima Kasih pada Polwiltabes Bandung



28 Agustus 2003, kami dari Tumble Tots Playgroup mengunjungi Kantor Polwiltabes Bandung dalam rangka program *outing*. Kegiatan ditujukan untuk mengenalkan figur polisi kepada anak sejak usia dini, di mana polisi sebagai salah satu unsur pelindung masyarakat.

Kegiatan kami tersebut ditanggapi dengan sangat positif pihak kepolisian, dalam hal ini oleh bagian Satuan Lalu Lintas. Anak-anak disambut dengan baik dan diberi pengarahan serta penjelasan tentang tugas polisi, termasuk mengenai rambu-rambu lalu lintas dan cara menyeberang jalan yang baik.

Anak-anak pun diajak berkeliling kompleks kantor Polwiltabes Bandung. Mereka dengan leluasa dapat melihat aktivitas sehari-hari aparat kepolisian.

Kami segenap staf pengajar dan orangtua siswa/i Tumble Tots Playgroup mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada staf kantor Polwiltabes Bandung atas kesediaannya untuk menerima kunjungan kami.

Salut kepada polisi, semoga kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan bibit-bibit generasi muda yang sadar berlalu-lintas dan dapat menciptakan Bandung yang tertib dan aman.

**Fedya Kertatama**  
Sub License Tumble Tots  
Bandung



BER : *Kelembahan*  
GGAL : *5 September 2003. Hal 1, Kol 3.*  
ANG : *trukum*

#### BANDUNG, (GM).-

Sebanyak 422 anggota polisi di Jawa Barat terkena sanksi dan 41 di antaranya dikenakan pemecatan dengan tidak hormat (PTDH), terhitung selama sembilan bulan terakhir, mulai 1 Januari-1 September 2003. Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Drs. Muryan Faizal Saladin, didampingi Kasubnit Provos, AKBP Adang Rukmana kepada wartawan di Mapolda Jabar, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (4/9).

Dari 442 anggota tersebut, sekitar 60% melakukan tindakan desersi (mangkir dari tugas). Sementara 41 anggota Polri yang di-PTDH terdiri dari 25 bintara dan 15 tamtama.

Mereka sudah diputuskan dalam sidang anggota bermasalah (SAB). Sementara 30 anggota di antaranya sudah menerima surat keputusan dari Kapolda Jabar. Menurutny, dari 422 anggota itu, 217 orang di antaranya dikenai sanksi administratif pada triwulan pertama, Januari-Maret. Sedangkan pada triwulan kedua (April-Juni) 205 orang.

Secara rinci ia menjelaskan, sanksi administratif tersebut antara lain diberikan kepada 4 perwira menengah, 29 perwira pertama, 336 bintara, 52 tamtama serta seorang pegawai negeri sipil.

"Selain melakukan tindakan mangkir dari pekerjaan, mereka yang juga dipersalahkan melakukan pelanggaran penyalahgunaan wewenang sebanyak 20%.

narkotika 10% serta penganiayaan 10%.

Bagi anggota yang terlibat narkoba tidak ada maaf lagi, langsung diberhentikan secara tidak hormat," terangnya.

Ia menambahkan, selain di-PTDH, dilakukan peradilan di tingkat angkum (peradilan di kepolisian) dan peradilan umum (pengadilan).

Ditambahkan, Kapolda Jabar sudah memiliki komitmen untuk membersihkan jajarannya dari pengaruh narkoba. Bukti komitmen ini menimpa Aipda Dah, anggota salah seorang anggota Restik Polresta Bandung Timur yang terlibat narkoba dan psikotropika. Ia langsung diberhentikan secara tidak hormat dan akan diadili di pengadilan umum. (B.96)\*\*



ER : *Pikiran Rakyat*  
JAL : *5 September 2003, Hal. 2, Kol. 1*  
IG : *Kriminalitas*

## Polisi Ringkus Penjual Senpi

**BANDUNG, (PR).-**

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar meringkus Hen, tersangka penjualan senjata api (senpi) (25) warga Pasir Tukul RT 2 RW 4 Desa/Kecamatan Ciluncuyi Kabupaten Bandung. Hen diringkus petugas saat melakukan transaksi senpi di Jalan Raya Cipacing Kab. Bandung, Selasa (2/9) pukul 12.00 WIB.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Drs. Murvan Faizal Saladin didampingi Kanit III Bulik Kompol Suhirman, Kamis (4/9) di Mapolda Jabar Jln. Sukarno Hatta Bandung mengungkapkan bahwa tertangkapnya Hen berdasarkan hasil penyelidikan petugas. Selain itu, juga dari informasi warga setempat yang merasa risi dengan perilaku tersangka.

"Berdasarkan informasi itu, petugas langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan di daerah tersebut. Saat melakukan transaksi, Hen diringkus petugas. Bersamaan dengan tertangkapnya tersangka, petugas menyita barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis FN kaliber 9 mm berwarna hitam *walther*," kata Murvan.

Lebih rinci ia menjelaskan

menurut pengakuan tersangka, ia menjual senjata tersebut dengan harga Rp 3 juta. Menurutnya, jual beli senpi pernah dilakukan berkali-kali, bahkan ia sempat memasoknya ke daerah Aceh belum lama ini.

"Namun, petugas belum bisa memastikan apakah ia pernah memasok senpi ke Aceh atau hanya sekadar omongan belaka. Tidak menutup kemungkinan ia pernah memasoknya. Namun, pihak kami tetap akan menyelidikinya dulu dan persoalan seperti ini harus terus digali," jelas Murvan.

Pasalnya, lanjutnya, petugas juga belum bisa memastikan ke mana dan kepada siapa ia menjualnya. Untuk lebih lanjut mengungkapkan hal ini, petugas terus melakukan penyelidikan dan pengembangan. Diduga tersangka melakukan jual beli tersebut tidak sendirian, tetapi ada salah seorang temannya. Apalagi jika tersangka benar-benar pernah melakukan transaksi dan memasok ke Aceh, hal ini pasti bekerja sama dengan orang lain ataupun ada salah seorang atau lebih yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dijelaskan, tersangka telah melanggar pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Jika tersangka benar-benar

melanggar pasal tersebut, akan diancam penjara seumur hidup. "Dengan tertangkapnya Hen, mudah-mudahan petugas bisa mengungkap lebih lanjut, diduga ada beberapa kawannya lagi. Dalam waktu dekat ini, sekitar Senin pekan depan petugas akan melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bandung," ujarnya. (A-120/B-96)\*\*\*



Pikiran Rakyat

9 September 2003, Hal. 2, Kol. 3  
Hukum

## 41 Perwira di Polda Jabar Dimutasi

**BANDUNG, (PR).-**

Sebanyak 241 perwira pertama di lingkungan Polda Jabar mengalami penyesuaian terhitung sejak 7 September 2003. Mereka yang selama ini menduduki jabatan "basah" harus pindah ke jabatan lain. Termasuk yang harus pindah karena mutasi itu adalah Kasat Reskrim Polres Bandung Timur AKP Jogi Nainggolan, S.H.

Soal adanya mutasi besar-besaran perwira pertama di lingkungan Polda Jabar itu diungkapkan Kepala Bidang Humas Komisaris Besar Drs. H.M. Faizal Saladin kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (8/9). "Terhitung sejak diumumkan surat keputusan Kapolda Irjen Drs. Dadang Garnida, S.H., M.B.A., yang terkena mutasi harus segera menduduki *job* barunya," katanya.

Sementara perwira pertama mengalami proses mutasi, perwira menengah (setingkat komisaris dan ajun komisaris polisi) di lingkungan Polda Jabar belum kena mutasi. Padahal, mereka sudah menunggu terkena penyesuaian, termasuk mendapat *job* kepala polisi resor (kapolres) karena sudah terlalu lama menduduki jabatan yang tetap.

Menurut Faizal, mutasi yang dilaksanakan Polda Jabar itu merupakan mutasi biasa untuk memberikan penyesuaian kepada perwira pertama yang bersangkutan. Mutasi itu, katanya, tidak ada kaitannya dengan kelakuan atau kesalahan perwira pertama bersangkutan dalam menjalankan tugas. "Tidak ada itu," katanya, singkat.

Menurut keterangan, selain Jogi Nainggolan, perwira yang terkena mutasi itu antara lain Kabag Ops Polres Bandung Kumpul Kuswendi (ditarik ke Direktorat Samapta Polda Jabar), Kanit Intel Bandung Timur AKP Agus Mulyana (ditarik menjadi Kasubbag Intelkam Polwil Banten), dan Kapolsek Regol AKP Irvan P. Selain itu, Kapolsek Sukasari AKP Drs. Baharudin K.S., S.H., Kapolsek Cileunyi AKP Mahdar (menjadi Kasat Lantas Polres Cianjur) serta Kasat Reskrim Polres Bandung AKP Umar Suryapana (menjadi panit di Sat Ops I Direktorat Reserse Kriminal Polda).

**Belum mutasi**  
Mengetahui para perwira pertama terkena mutasi besar-besaran, sumber "PR" di kalangan pamen yang sudah lama menduduki *job* yang tetap, mengaku "sedikit iri".

Mereka iri karena mereka juga sangat berharap segera dimutasi atau mendapat penyesuaian ke *job* lain. "Kapan kita kebagian, ya?" tanya sejumlah pamen kepada "PR".

Menurut catatan "PR", para pamen di lingkungan Polda Jabar sebenarnya cukup terhibur dengan munculnya telegram intern dari pimpinan polda soal mutasi beberapa waktu lalu. Dalam mutasi itu antara lain disebutkan soal mutasi sejumlah perwira, seperti Kasat Reserse Kriminal Polwiltabes AKBP Drs. Masguntur Laope, S.H., menjadi Kapolres Bandung Tengah atau Kasat Ops II AKBP Drs. A. Kamil Razak menjadi Kasat Reskrim Polwiltabes Bandung.

Entah kenapa, mutasi intern itu tidak sempat terlaksana karena Mabes Polri ternyata "membatalkan" keputusan mutasi itu. Hal itu berlangsung sampai sekarang sehingga para pamen itu menduduki jabatan sama nyaris sampai dua tahun lamanya. Saat "PR" menanyakan apakah mutasi itu akan disusul oleh mutasi lain untuk pamen, Kombes Faizal menolak memberikan jawaban. Yang bersangkutan hanya tersenyum, tetapi tidak diketahui maknanya. (A-112)\*\*\*



ER : Pikiran Rakyat  
GAL : 4 September 2003, Hal. 2, Ed. 1  
JG : Kriminalitas

## Polda Sita 941 Bungkus Rokok tanpa Pita Cukai

BANDUNG, (PR).-

Polda Jabar c.q. Direktorat Reserse Kriminal dan Direktorat IPP bekerja sama dengan Bea Cukai Jawa Barat menyita 941 bungkus rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu dari 10 toko di wilayah Kota Bandung. Sepuluh pemilik tokonya saat ini dalam penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Komisaris Besar Drs. H.M. Faizal Saladin mendampingi Direktur Reserse Kriminal Komisaris Besar Drs. Dikdik M. Arief Mansoer dan Kasat Ops II AKBP Drs. A. Kamil Razak, kesepuluh orang itu tidak diproses kepolisian. Hal itu terjadi karena belum diketahui adanya pelanggaran pidana yang dilakukan mereka.

"Mereka baru dijerat oleh UU No. 11 Tahun 1995 Pasal 54 tentang Cukai yang diancam oleh hukuman denda saja," kata Faizal kepada wartawan, Senin (8/9). Namun, kalau di kemudian hari diketahui ada pasal pidana yang dilanggar, mereka bisa saja diproses oleh kepolisian khususnya oleh Satuan Ops II Polda Jabar.

Menjelaskan awal penyelidikan yang dilakukan polda bersama bea cukai, menurut Faizal, bermula dari adanya telegram Kapolri, surat dari Dirjen Bea Cukai Depku, dan adanya surat perintah tugas Kapolda tertanggal 28 Agustus 2003 kepada intel dan reserse. Telegram dan surat itu berisi soal permohonan penyelidikan dalam rangka pelaksanaan operasi pemberantasan rokok polos tanpa pita cukai.

Dijelaskan, setelah ada telegram dan surat perintah, Direktorat Reserse Kriminal dan Direktorat IPP bekerja sama dengan Bea Cukai segera melakukan operasi bersama. Tim yang berjumlah 25



Drs. H.M. Faizal Saladin

orang itu bergerak dengan sasaran pita cukai rokok yang diduga palsu atau rokok yang tidak dilengkapi pita cukai di wilayah hukum Bandung dan sekitarnya. "Hasilnya, tim bisa menyita barang bukti 941 rokok," katanya.

Rinciannya, katanya, 153 bungkus dari dua toko di Antapani, 92 bungkus dari sebuah supermarket di Bandung, 133 bungkus dari Toko Internasional, 4 bungkus dari Toko Dago Baru, dan 214 bungkus dari Toko Kharisma Dutta Wasera. Selain itu, 27 bungkus dari Toko Circle Braga, 106 bungkus dari toko di Jln. Braga, 27 bungkus dari toko di Jln. Setiabudi, dan 185 bungkus di Toko Jln. Peta.

Menurut Faizal, melalui operasi itu diharapkan selanjutnya pemilik toko di Bandung atau di Jawa Barat umumnya tidak sembarangan lagi menjual rokok impor. Mereka diharapkan tidak asal jual. "Jika rokoknya tanpa pita cukai, ya jangan dijual karena nantinya akan berurusan dengan pihak berwenang, kepolisian, dan bea cukai," katanya. (A-112)\*\*\*



JM BER : *Siaran Pak-ral*  
NGGAL : *9 September 2003, Hal 5, Kol. 1*  
DANG : *Kriminalitas*

## Tubuh Korban Mutilasi Sudah Lengkap

# Organ Tubuh Tercecer di Bogor & Karawang

BOGOR, (PR).-

Potongan tubuh manusia berupa bagian paha kanan dan dua potongan tangan kanan dan kiri ditemukan warga Kampung Bunder RT 3 RW 3 Desa Tamansari Kec. Pangkalan Kah, Karawang di Kali Cibect, Senin (8/9). Setelah organ tubuh itu dibawa ke RSU PMI Bogor, ternyata cocok dengan bagian tubuh mayat mutilasi, yang ditemukan di Kali Cileungsi wilayah Kec. Gunung Putri dan Klapa Nunggal Kab. Bogor, beberapa waktu lalu.

Menurut keterangan, potongan mayat itu pertama kali ditemukan oleh Pardi (30), warga Kp. Bunder. Pardi sedang asyik mencari burung di sekitar Sungai Cibect. Tiba-tiba di aliran air, dia melihat seekor biawak tengah menggigit sebuah karung plastik yang setengah mengambang di permukaan air. Pardi penasaran, seketika itu juga dia mengarahkan ketepelnya ke arah biawak. Setelah biawak menyelam, Pardi memberanikan diri mendekati karung terselut.

Dengan tak memedulikan bau menyengat, Pardi berusaha meminggirkan karung itu dengan sebilah kayu. Pardi semakin penasaran ketika dia melihat scongkok daging menyembul dari lubang karung yang terkoyak oleh biawak. Setelah diteliti ternyata onggokan daging itu menyerupai tangan manusia. Melihat kenyataan tersebut, ia langsung kabur dan berteriak-teriak minta tolong.

Temuan Pardi segera dilaporkan kepada Mapolsek Pangkalan Karawang. Mapolsek meneruskan laporan itu ke Mapolres. Sejumlah polisi dan tim identifikasi Polres Karawang segera mendatangi Kali Cibect. Setibanya, di lokasi penemuan itu, karung plastik putih yang berisi potongan tubuh manusia segera dievakuasi dan dibawa ke RSUD Adiarsa Karawang.

"Pada pukul 21.00 WIB, Minggu

manusia. Lalu, kami mengevakuasinya dan membawa ke RSUD Adiarsa pukul 5.00 WIB, Senin (8/9). Akan tetapi, setelah kami membaca koran tentang penemuan mayat mutilasi di Bogor maka potongan tubuh itu langsung kami bawa ke RSU PMI Bogor dan sebelumnya, kami koordinasi dengan polres setempat," ungkap Kanit Identifikasi Polres Karawang Aipda Rahmat Sanjaya, saat ditemui SK Pakuan di Ruang forensik RSU PMI Bogor.

Menurut Rahmat, setiba di RSU PMI Bogor pukul 11.00 WIB, Senin (8/9), potongan organ tubuh itu langsung dicocokkan petugas forensik dengan tubuh mayat korban mutilasi, yang ditemukan di Kali Cileungsi Kampung Parungdengdek Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Kamis (4/9).

"Ternyata bagian tubuh yang ditemukan di Karawang cocok dengan bagian tubuh mayat mutilasi. Akan tetapi, potongan tangan kiri itu sebagian dagingnya sudah habis dimakan Biawak sehingga bagian yang bekas dimakan Biawak itu tinggal tulang saja. Kalau dilihat dari potongan-potongannya, pelaku pembunuhan itu sudah ahli. Alasannya, bagian tubuh korban yang dipotong-potong, bekasnya terlihat rapi," jelas Rahmat.

Saat ditanyakan apakah pihak Polres Karawang akan menindak lanjuti penemuan potongan tubuh manusia itu, Kanit Identifikasi Polres Karawang itu menyebutkan, karena *locus delicty* terbanyak ada di wilayah Bogor, kemungkinan pihak Polres Karawang akan koordinasi dengan Polres Bogor, untuk melimpahkan penanganan penemuan mayat mutilasi itu.

"Masalah itu, kapolres yang berwenang mengungkapkannya. Saya tidak bisa menjelaskan," kata Rahmat.

Ia menjelaskan bahwa pengiri-

atas perintah Kapolres Karawang AKBP Bambang Yulianto.

Sementara itu, beberapa anggota Polres Bogor yang sempat datang dan melihat kondisi potongan tubuh mayat mutilasi, yang ditemukan di wilayah Karawang, menyebutkan, potongan bagian kedua tangan mayat mutilasi itu kondisinya sudah membusuk. Selain itu, ujung jarinya pun tidak ada, diduga dipotong pelaku untuk menghilangkan jejak identitas korban.

"Kemungkinan, supaya identitas korban tidak diketahui maka ujung jarinya dipotong sebab dari ujung jari itu kita bisa dapatkan sidik jari, untuk mengidentifikasi identitas korban. Oleh karena itu, sampai sekarang identitas korban dan pelakunya juga masih 'gelap'," ungkap seorang perwira polisi Polres Bogor, yang enggan disebutkan identitasnya, saat ditemui sejumlah wartawan di ruang forensik RSU PMI Bogor, Senin (8/9) kemarin.

Kendati begitu, dikatakannya, hingga kini Polres Bogor telah membentuk tim khusus untuk mengungkap identitas korban dan pelaku pembunuhan mutilasi tersebut. Selain itu, bila memang dalam penyelidikan secara logika dan riil, yang dilakukan pihak polisi mengalami kendala yang sangat sulit untuk mengungkap kasus itu. Oleh karena itu, kemungkinan meminta bantuan "orang pintar" juga akan dilakukan.

"Bisa saja itu dilakukan kalau memang sudah *mentok*," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Bina Mitra Polres Bogor AKP Sugiono Tharrin, menyebutkan bahwa penemuan organ tubuh manusia di Karawang itu memang cocok dengan tubuh mayat mutilasi tersebut. Namun, 10 jari tangannya sudah tak ada sehingga menjadi salah satu kendala untuk pengusutan identitas korban. "Pelakunya sepertinya memang sudah paham cara menghi-



SUMBER : *Pikiran Rakyat*  
TANGGAL : *10 September 2003, Hal. 1, Kol. 7*  
BIDANG : *Kriminalitas*

Kecemasan Salah Satu Orang Tua Siswa

## Praja Madya Buka Mulut Tersangka Jadi 16 Orang

SUMEDANG, (PR).-

Para Praja Madya STPDN Jatinangor Kab. Sumedang akhirnya tak mampu lagi menutupi kejadian sebenarnya yang menewaskan salah seorang rekannya, Wahyu Hidayat (21). Tidak sedikit dari mereka memberikan koreksi atau tambahan kesaksian atas keterangan sebelumnya yang masih mengandung rekayasa sehingga penyidik pun harus mengubah isi berita acara pemeriksaan (BAP).

Menyusul perubahan BAP itu, 49 praja nindya dipanggil dan diperiksa kembali oleh penyidik Polres Sumedang, Selasa (9/9). Meski yang datang hanya 47 praja dan sebelumnya telah diminta keterangan, mereka kembali diperiksa untuk mencari tersangka lain. Sesuai keterangan terbaru para saksi, tim penyidik akan memfokuskan pemeriksaan terhadap 10 tersangka lainnya. Dengan demikian, jumlah tersangka akan bertambah menjadi 16 orang, setelah sebelumnya enam orang lebih dulu dinyatakan sebagai tersangka. "Semua saksi dari praja madya, akhirnya mau memberikan keterangan yang sebenarnya. Mereka semua mengaku pada saat kejadian itu bersama Wahyu Hidayat, mendapat hukuman dan penganiayaan dari para seniornya," jelas Kapolres Sumedang, AKBP Drs. Yoyok Subagiono, S.H., M.Si.

Menurut informasi yang diperoleh "PR", para praja madya kontingen Jawa Barat ini telah meyakinkan penyidik bahwa Wahyu Hidayat memang mendapat penyiksaan berupa pukulan dan tendangan. Tindakan itu dilakukan secara beramai-ramai oleh praja nindya yang berjumlah 49 orang, meski dengan bobot pukulan yang berbeda. "Mereka menyatakan keterangan sebelumnya masih banyak rekayasa. Akan tetapi, akhirnya mereka mau bicara apa adanya sehingga kami terpaksa banyak mengubah isi materi BAP," tutur sumber penyidik.

Sementara itu, berkaitan adanya pemanggilan ulang, para praja nindya yang tiba di mapolres menggunakan bus STPDN sekira pukul 12.30 WIB, terkesan gugup dan ketakutan. Mereka juga sempat beradu argumen dengan Kapolres Yoyok Subagiono serta sempat menolak diperiksa ulang dengan dalih belum mendapat surat panggilan. Padahal, menurut kapolres, dia telah melayangkan surat panggilan secara kolektif dan kedatangan mereka justru atas koordinasi dengan pihak STPDN.

Selain soal surat panggilan, para Praja Nindya STPDN ini menyatakan ingin menggunakan pengacara secara sendiri-sendiri. Tiga orang di antaranya menyebut sudah resmi menunjuk pengacara Singap Panjaitan, S.H., dari Bandung. Padahal, sejauh ini atau sejak pemeriksaan pertama, telah didampingi pengacara dari LBH Intania yang disiapkan oleh polres setempat.

Salah seorang pengacara sekaligus koordinator LBH Intania, Yovi Megananda, S.H. pun tampak keheranan. Terlebih, dia telah menyiapkan materi gugatan PTUN terhadap Ketua STPDN sehubungan sanksi pemecatan yang diberikan kepada tiga tersangka kliennya itu. Ia menilai pemberian sanksi yang mengacu kepada kode etik STPDN itu menyalahi ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. "Akan tetapi, itu hak mereka. Tidak masalah kalau memang ingin menggunakan pengacara yang lain," ujarnya.

Pemeriksaan ulang terhadap praja nindya, hingga tadi malam masih dilakukan secara intensif oleh penyidik Polres Sumedang. Sejauh ini, dari enam orang yang dinyatakan sebagai tersangka, tiga di antaranya sudah dilakukan penahanan. Jumlah tersangka ini dipastikan akan bertambah, setidaknya 10 orang sesuai keterangan tambahan para saksi kunci.

Dihantui rasa cemas

Meski bangga salah seorang putranya bisa bersekolah di STPDN Jatinangor, selama ini Umar (60), bukan nama sebenarnya, mengaku selalu dihantui rasa cemas. Perasaan itu kian menjadi, manakala ayah beranak tujuh ini mendengar kabar ada korban perpeloncoan atau sanksi terhadap praja junior oleh para seniornya. Begitu pula saat ia mendengar kabar kematian Wahyu Hidayat (21), praja madya (tingkat II) yang diduga akibat penganiayaan dari para seniornya.

Rasa cemas Umar itu, belakangan kembali mengusik hatinya ketika anaknya menelepon yang membabarkan bahwa dia menjadi korban kekerasan dan menjadi salah seorang saksi kunci atas kematian rekannya asal Bogor itu. "Oleh karena itu, saya datang ke sini (Mapolres Sumedang - red.) untuk mengetahui jelas kondisinya. Tetapi sayang, ia sudah telanjur kembali ke kampus," ucap pensiunan guru asal Bandung yang enggan disebutkan identitasnya saat ditemui "PR" di halaman mapolres, Selasa (9/9).

Rasa cemas Umar bukan tanpa alasan karena anak bungusnya yang tergolong pandai dan kini masih tingkat II (madya), juga pernah menjadi korban kekerasan berkedok pembinaan itu. Peristiwa itu pertama kali dialami pada saat anaknya baru masuk STPDN tahun 2002 lalu.

"Saat itu, menurut keterangan anak saya, ada salah seorang praja muda yang dianggap bersalah. Akan tetapi, beberapa teman yang lain ikut terkena hukuman, termasuk anak saya yang tidak bersalah," ucapnya.

Diceritakan Umar, pada saat menerima hukuman itu, ada lima praja

ja junior termasuk anaknya yang mendapat perlakuan keras berupa pukulan dan tendangan yang dilakukan sekira 30 kakak kelasnya.

Di antara mereka bahkan ada yang jatuh pingsan, begitu pula anaknya langsung jatuh sakit. Tak hanya itu, karena tendangan seniornya mengenai bagian rusuk, menyebabkan dua tulang rusuk anaknya mengalami retak sehingga jika bagian rusuk anaknya terkena pukulan lagi, tidak mustahil akan memperparah kondisi tulang yang retak itu.

"Saat itu, saya membawa anak saya ke puskesmas, tetapi kemudian dirujuk ke RSHS Rancabada. Ternyata dari hasil rontgen dokter saat itu, tulang rusuk anak saya retak meski tidak sampai menjalani operasi. Untuk biaya pengobatan, saya keluarkan biaya Rp 1 juta lebih, sedangkan pihak STPDN tidak mau tahu dengan hal itu," ujarnya. Dia tak berani mengungkapkan kejadian yang menimpa anaknya tersebut.

Dijelaskan, selama anaknya mengikuti pendidikan di STPDN, dia selalu merasa cemas karena sering mendengar kejadian yang aneh seperti itu. Menurutnya, kejadian seperti itu akan terus terulang karena pihak pembina dan kampus STPDN terkesan membolehkan atau tidak melarang para senior menghukum juniornya dengan cara kekerasan. Atas kematian Wahyu Hidayat, sekaligus kejadian yang ketiga kalinya selama ini, Umar berharap sistem pendidikan di STPDN akan segera berubah.

Sementara itu, tadi malam diperoleh kabar Ketua STPDN menyatakan mengundurkan diri. Namun informasi ini belum dapat dikonfirmasi pada yang bersangkutan. (A-98/E-39)\*\*\*



KI POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

SUMBER : *Pikiran Rakyat*  
TANGGAL : *11 September 2003 Hal 4, Kol 1*  
BIDANG : *Sebelum*

**Soal Pemeriksaan Anggota DPRD Kab. Bogor**

## **Polda Kirim Surat Ketiga ke Gubernur**

**BANDUNG, (PR).-**

Polda Jabar c.q. Satuan Operasional IV Direktorat Reserse Kriminal, Selasa (9/9), mengirimkan kembali surat permohonan pemeriksaan 42 anggota DPRD Kab. Bogor kepada Gubernur Jabar Drs. H. Danny Setiawan. Dengan demikian, polda mengirimkan surat untuk tujuan sama ke gubernur sudah sebanyak tiga kali.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Humas Kombes Drs. H.M. Faizal S. mendampingi Direktur

Reserse Kriminal Kombes Drs. Dikdik M. Arief Mansoer, S.H., serta Kasat Ops. IV AKBP Drs. Ahmad Nurdin dan penyidik AKP Setyo Widodo. "Mudah-mudahan setelah surat ketiga, gubernur segera mengeluarkan izin," katanya.

Menurut keterangan, langkah itu diambil polda, selain karena keinginan penyidik sendiri, juga karena ada permintaan dari kuasa hukum pelapor kasus itu Drs. Ibrahim Sulaiman yang sengaja datang ke polda, Senin

(8/9). Kuasa hukum Ibrahim itu, yakni Alfons Bersandy, S.H. dan Hery Ridwan, S.H.

Kepada penyidik, antara lain mereka berharap agar gubernur didesak segera mengeluarkan izin dimaksud. Desakan itu diharapkan bisa "meluluhkan" hati gubernur untuk segera mengeluarkan izin memeriksa sebanyak 42 anggota DPRD Kab. Bogor agar proses hukum yang dilakukan penyidik polda tidak tertunda. "Pada akhirnya, kami harapkan gubernur segera memberikan izin," kata mereka kepada wartawan di Polda Jabar, Senin (8/9).

Mereka datang ke polda, setelah mengetahui bahwa Gubernur Danny Setiawan belum juga mengeluarkan izin kepada Polda Jabar untuk memeriksa 42 anggota DPRD Kab. Bogor. Padahal, Polda Jabar sudah melayangkan surat permohonan ke

gubernur sebanyak dua kali.

Kepala Bidang Humas Polda Kombes Drs. Muryan Faizal S. ketika dikonfirmasi memang membenarkan bahwa surat izin itu belum juga turun. "Sampai sekarang izin itu memang belum keluar," ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Belum diketahui, bagaimana Polda bersikap jika setelah tiga kali mengirimkan surat izin gubernur tidak juga mengeluarkan izin.

Kedua penasihat hukum yang ditunjuk Ibrahim, menurut keterangan, adalah anggota Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH HPP Peta) Perwakilan Jawa Barat beralamat di Bogor. Keduanya diminta oleh Ibrahim untuk mendampingi atau mewakilinya dalam perkara itu. (A-112)\*\*\*



SUMBER *Media Indonesia*  
TANGGAL *11 September 2003, Hal 16, Kol 1*  
BIDANG *Krimeditas*

## Sembilan Mahasiswa STPDN Jadi Tersangka

ANDUNG (Media): Enam tersangka baru kasus tewasnya mahasiswa Sekolah Tinggi Pemerintah (Dalam Negeri) STPDN Wahyu Hidayat, kemarin, resmi ditahan di Polres Sumedang, Jawa Barat. Dengan bertambahnya enam tersangka baru tersebut, kini seluruhnya sembilan tersangka dalam kasus itu. Tiga tersangka sebelumnya yang telah ditahan, yaitu Yayan Hidayat, Dadang Hadi-surya, dan Endi Setiyadi, semuanya mahasiswa (praja) STPDN tingkat III. Kapolres Sumedang AKB Yoyok Budiana menyebutkan enam tersangka baru itu semuanya praja tingkat III STPDN. Mereka adalah Ataviani Minang Santoso, Gama Ramadhan, Bangun Robinson, Iki Suwandi Irmansyah, Dena Akha Suprianto, dan Yopi Maula-

na Abdillah.

Sedangkan praja Hendri Mayor dan dua praja lainnya yang sempat ditetapkan sebagai tersangka kini hanya berkapasitas sebagai saksi karena belum ada bukti kuat berkaitan dengan keterlibatannya.

"Para praja STPDN yang telah ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan di Polres. Mereka kini masih dalam pemeriksaan intensif," kata Kapolres.

Sementara itu, rencana rekonstruksi terhadap kasus ini yang semula dijadwalkan kemarin, tidak jadi dilaksanakan.

Karena, saksi dari pihak korban maupun saksi dari pihak tersangka tidak bisa hadir dengan alasan belum mendapat izin dari pihak STPDN. Padahal, Polres Sumedang telah mengirim surat panggilan ke-

pada saksi praja untuk melakukan rekonstruksi.

Sementara itu, kemarin pagi, ratusan praja tingkat IV STPDN yang tinggal di luar kampus, batal berunjuk rasa ke kampus mereka di Jatinangor, Sumedang, setelah mereka mendapat pengarahan dari para pengasuh serta dosen STPDN.

Sumber di STPDN menyebutkan, sebanyak 11 orang pengasuh STPDN dimutasikan ke lembaga lain berkaitan dengan kasus meninggalnya praja tingkat II Wahyu Hidayat akibat dihukum fisik oleh sejumlah mahasiswa seniornya pada Rabu (3/9) dini hari lalu.

### Penangguhan tahanan

Pengacara praja STPDN yang telah berstatus tahanan resmi Polres Sumedang ini berupaya meminta adanya penangguhan masa pena-

hanan terhadap sembilan praja tersebut.

Koordinator tim pengacara praja STPDN Singa Panjaitan, di Sumedang, kemarin, mengatakan upaya penangguhan penahanan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres Sumedang. Jaminan penangguhan penahanan akan datang dari pihak keluarga tersangka dan STPDN.

Sementara itu, Kapolres Sumedang AKB Yoyok Budiana mengatakan permohonan pengacara tersangka untuk penangguhan penahanan tidak akan diberikan, mengingat sembilan tersangka masih menjalani proses penyidikan.

"Kesembilan tersangka itu tidak dapat diberikan penangguhan masa penahanan karena mereka masih dibutuhkan dalam proses penyidikan," ujarnya. (SG/EM/Ant/B-2)



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

IBER : Gada M...  
GGAL : 11 September 2001 H. 1.1, 10.1  
ANG : Krim... 10.1

## Pengacara Tersangka Minta Penangguhan

SUMEDANG, (GM).-

Tim pengacara para tersangka yang terlibat kasus penganiayaan Wahyu Hidayat akan meminta penangguhan penahanan kepada Kapolres Sumedang. Alasannya, para tersangka masih berstatus mahasiswa dan menyatakan tidak akan melarikan diri. Sebagai jaminannya adalah orangtua para tersangka.

"Secara resmi surat permohonan penangguhan itu akan diserahkan hari ini (Kamis, 11/9). Mudah-mudahan saja Bapak Kapolres menanggapinya," ujar koordinator pengacara para tersangka, Singap Panjaitan, S.H., kepada "GM", Rabu (10/9).

Singap mengharapkan pihak STPDN juga bisa memberikan jaminan. Sebab, bagaimanapun para tersangka masih berstatus mahasiswa STPDN. Untuk itu, pihak pengacara akan melobi pihak STPDN untuk peduli terhadap masalah ini, terlepas mereka telah dikenakan sanksi atau tidak.

Untuk mendampingi para tersangka, pihaknya telah menyiapkan 18 pengacara dari Kantor Pengacara Singap Panjaitan dan Kantor LBH Intania yang ditunjuk Polres Sumedang untuk mendampingi para tersangka tersebut. "Tim ini baru dibentuk. Jadi, akan melakukan koordinasi dulu agar lebih efektif," ujarnya.

Selain meminta penangguhan, tim pengacara juga akan memPTUN-kan Ketua STPDN sehubungan dengan pemecatan tiga mahasiswanya, yaitu Yayan Sofyan (21), Dadang Hadi Surya (20), dan Nendi Setiadi (21).

"Mereka tidak menerima pemecatan tersebut karena proses hukumnya masih berjalan. Sehingga pihak STPDN menunda dulu pemecatan tersebut," ujarnya sembari menambahkan, dasar hukum pemecatan tersebut harus jelas.

Singap menilai pemberian sanksi yang mengacu kepada kode etik STPDN menyalahi ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan azas praduga tak bersalah. "Kalau pengadilan sudah menyatakan mereka bersalah, ya silakan diberikan sanksi. Ini kan terlalu cepat bertindak," tambahnya.

Meski demikian, Singap meminta pihak STPDN untuk berpikir positif terhadap rencana PTUN itu. "Ya, jangan diartikan merupakan ancaman," tambahnya.

Tidak berencana

Sementara itu, Kapolres Sumedang AKBP Drs. Yoyok Subagiono, S.H., M.Si. mengatakan, pihaknya belum dan tidak berencana melakukan penangguhan penahanan terhadap sembilan tersangka.

"Mungkin kami sulit mengabulkannya. Sekali lagi, tidak ada penangguhan penahanan dulu untuk mempermudah pemeriksaan," ujarnya. (B.79)\*\*



Gedung Sate

11 September 2007 Hari Selasa

Kantor

## Tolak Pengoperasian Bus Patas AC

### GEDUNG SATE, (GM).-

Puluhan awak mobil angkutan umum (angkum) jurusan Majalaya-Gedehag via Sayang dan Majalaya-Cileunyi mendatangi Gedung DPRD Jabar, Rabu (10/9). Kedatangan para awak angkum beserta kendaraannya itu untuk meminta agar DPRD Jabar tidak menyetujui rencana pengoperasian bus kota patas AC jurusan Rancaekek-Bandung.

Saat mereka melakukan aksi di halaman Gedung DPRD Jabar, di ruang pansus diselenggarakan dialog pendapat antara Komisi A dan DPRD Jabar dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Dishub Kota Bandung, Perum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota (UABK) Bandung, unsur Muspida Rancaekek serta masyarakat yang pro dan kontra terhadap rencana peluncuran bus kota trayek tersebut.

Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Hermansyah dan Ketua Komisi A, Sutardi. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Subdin Angkutan Dishub Jabar Sri Haryono, Kepala Dishub Kota Bandung Yan Sudjana, Kabag Operasi Perum DAMRI UABK Bandung Samin Prasetyo, Camat Rancaekek Soenarso serta petugas dari kepolisian.

Dalam pertemuan tersebut, antara pihak yang pro terhadap pengoperasian bus kota jurusan Rancaekek-Bandung maupun yang kontra, tampak saling adu argumentasi sehingga tidak ditemui jalan keluar

untuk menangani persoalan itu.

Setelah menampung semua pendapat, pimpinan Komisi D DPRD Jabar memandang perlu untuk menunda terlebih dahulu rencana pengoperasian bus kota trayek ini. "Kita hanya sebagai fasilitator dalam pertemuan ini," tegas Hermansyah.

Selanjutnya, Komisi D DPRD akan memanggil semua pihak terkait dengan rencana pengoperasian bus kota trayek ini. Seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam rangka pengumpulan data lanjutan terhadap pertemuan yang sudah dilakukan.

Menurut Hermansyah, untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya akan melakukan pengkajian lebih lanjut. Sebab itu, pihak Perum DAMRI UABK Bandung diminta untuk tidak melakukan uji coba terhadap bus di trayek ini.

Sementara itu, Kabag Operasi Perum DAMRI UABK Bandung, Samin Prasetyo mengemukakan, pihaknya bisa menerima keputusan tersebut. Sebab, sejak awal Perum DAMRI UABK Bandung tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap trayek tersebut.

"Akan dilakukannya uji coba terhadap trayek ini pun sebenarnya didasarkan pada adanya permintaan dari masyarakat Rancaekek yang merasa selama ini mereka kesulitan sarana transportasi ke Bandung karena hanya mengandalkan KRDL," jelasnya. (B.34)\*\*

*laudas*  
*antisipasi*  
*bangunnya*

*mu 12/9*



ABER : *Pikiran Rakyat*  
JGGAL : *12 September 2002 Had G. J. J. 2*  
ANG : *Jambangkab*

## Baru 9 Orang Jadi Tersangka

### Polres Garut Tangkap Pembantai Sadri dan Ocih

UT, (PR).-

Enam tersangka dan enam pembunuh berlatar belakang isu santet di Kec. Bungbulang, dengan korban sumbu Sadri (60) dan Ocih (50), diamankan aparat Polres Garut. Para tersangka ditangkap di rumah masing-masing dan langsung dibawa ke Mapolres Garut, Kamis (11/9). Bukti yang dikumpulkan lain tali, golok, dan bambu. Penangkapan berlangsung pada Kamis (11/9) sekira 1.00 WIB hingga siang dengan mengerahkan aparat dari Polrut dan Polsek Bungbulang. Penghapusan dipimpin Dantim Polres Garut Ipda Fauzan. Yang pertama adalah rumah terduga As, namun yang bersangkutan melarikan diri. Menurut istrinya, As sudah satu bulan berada di Bandung. Akan tetapi menurut keterangan para saksi, As terlihat ikut dalam pembunuhan Sadri dan Ocih. Petunjuk bahwa pelaku lain keluar dari rumah seorang pelaku utama ditangkap di rumahnya. Ia menyebutkan beberapa nama lain yang kemudian segera diamankan oleh aparat di rumah masing-masing.

Pukul 4.00 WIB telah ditangkap sembilan orang. Penangkapan dilanjutkan sekira 5.00 WIB hingga 10.00 WIB dengan menangkap 14 orang. Jumlah yang diduga terlibat pembantaian itu dikumpulkan di Mapolsek Bungbulang

untuk diperiksa. Beberapa dilepas lagi karena tidak terbukti terlibat.

Setelah pemeriksaan, tercatat 9 orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Sal (41), Bur (24), Ded (44), Jam (33), Nan (39), Al (25), Uj (25), Ay (33), dan Ag (18). Seluruh tersangka langsung dibawa ke Mapolres Garut disertai enam saksi yang kemungkinan juga akan ada yang dijadikan tersangka. Tindakan itu diambil dengan pertimbangan untuk menghindari aksi massa dan mempermudah pemeriksaan dan pengembangan kasus.

Kapolres Garut AKBP Drs. Syamsul Bachrie membenarkan telah dilakukan penangkapan terhadap para tersangka pembunuhan Sadri dan Ocih. Kapolres juga telah memerintahkan agar orang yang pertama melapor ke Polsek Bungbulang diperiksa. Hingga saat ini, kata Syamsul, otak dan provokator pembunuhan tersebut belum dapat teridentifikasi. Namun, tidak menutup kemungkinan, otak dan provokatornya berasal dari keluarga orang yang dikabarkan tewas akibat disantet atau buhkan dari pihak keluarga korban sendiri.

Kasus itu akan terus dikembangkan untuk menjerat para tersangka lainnya. Menurut keterangan, para pelaku berjumlah sekira 30 orang. "Jumlah tersangka mungkin akan bertambah setelah kita cukup mengumpulkan bukti awal untuk melakukan penahanan," tegas kapolres.

Motif sebenarnya dari pembunuhan sadis itu, kata kapolres, belum dapat diketahui. Walaupun para saksi dan tersangka mengaku pembunuhan terjadi dengan latar belakang santet, bukan tidak mungkin ada motif lain seperti dendam. Untuk mengantisipasi situasi yang berkembang di Bungbulang, kapolres telah menurunkan tim khusus antibandit (tekab), penyidik, intel, dan pasukan dalam dari Polres Garut ditambah aparat Polsek. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan aparat koramil setempat, para tokoh, dan ulama.

Sedangkan untuk penjagaan keamanan yang melibatkan unsur selain polisi, kapolres telah meminta bantuan Dandim 0611 dan Bupati Garut agar aparatnya proaktif dalam mengantisipasi keadaan. Tindakan antisipasi ini dilakukan karena kasus pembunuhan tersebut melibatkan banyak orang. "Kita tidak ingin terjadi peristiwa Banyuwangi kedua di Garut ini," ujar kapolres. Untuk melancarkan proses pemeriksaan dan penyidikan, kasus ini sepenuhnya ditangani Polres Garut, sementara aparat Polsek sifatnya hanya membantu.

#### Gerakan tutup mulut

Diperoleh keterangan, dalam mengungkap kasus pembunuhan itu, pihak kepolisian banyak menemui kendala karena warga di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) atau tetangga-tetangga korban, melakukan gerakan tutup

mulut. Hampir seluruh warga di Ds. Cihikeu maupun Mekarbakti mengaku tidak mengetahui pembunuhan tersebut. Menurut prediksi polisi, kemungkinan mereka takut dianggap terlibat atau mencoba melindungi diri dan keluarganya yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Hasil penyidikan sementara menunjukkan para pelaku merupakan orang yang mengenal dan dekat dengan korban.

Sadri bin Juid dan Ocih bin Sukardja, korban pembunuhan tersebut, diduga merupakan korban fitnah segelintir orang. Menurut kapolres, Amar yang diduga korban santet, kemungkinan menderita penyakit dalam seperti leverfistitis sehingga menyebabkan kematiannya. Akan tetapi, diduga, kematian Amar dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyebarkan isu santet.

Agar peristiwa seperti itu tidak terulang, kapolres mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar memberikan penyuluhan kepada warga untuk menghindari isu, herban tabayul. Terutama sekali kepada instansi kesehatan dan ulama agar mau memberi penjelasan secara ilmiah dan berbasis keagamaan sehingga masyarakat mengerti dan menghindari isu yang menyesatkan. "Dengan peristiwa ini, saya merasa prihatin. Katanya masyarakat Garut agamis, tetapi kenapa masih terjadi kasus seperti ini," ujarnya. (A-132/E-36)\*\*\*



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

ABLEP : *Andi J. J. J.*  
JGGAL : *12 September 2002 Had 1.1 ed 1*  
ANG : *11 September 2002*

### 7 Mobil Disita Polisi

## Penipuan Rental Mobil

#### AHMAD YANI, (GM).-

Tiga tersangka pelaku jaringan sindikat penipuan dan penggelapan mobil sewaan dari Rental Mobil Cipaganti, Jln. Gatot Subroto Bandung, kini meringkuk dalam tahanan Polresta Bandung Tengah. Berkaitan dengan itu, tujuh unit kendaraan roda empat yang telah digadaikan para tersangka di beberapa tempat disita.

Ketiga tersangka adalah SN (56), warga Komplek Taman Kopo Indah Blok C Bandung, Tin (40), warga Cipaganti Bandung, dan Lis (40), warga Jln. Gedebage Bandung. Sedangkan Serma SP, oknum TNI yang disebut-sebut sebagai otak pelaku, kini masuk daftar pencarian orang (DPO) pihak kepolisian.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka, petugas melakukan pengembangan ke beberapa tempat menggadaikan mobil tersebut, di antaranya daerah Tasikmalaya, Indramayu, Subang, Karawang, Jakarta, dan Kota Bandung.

Hasilnya, petugas menyita tujuh unit kendaraan roda empat berbagai merk. Antara lain 1 unit Nissan Terrano nopol D 1517 DN, 1 unit Isuzu Panther nopol D 1469 TI warna abu-abu metalik, 1 unit Toyota Kijang nopol D 1799 FW 2002 warna biru, 1 unit Toyota Kijang nopol D 1381 FU 2002 warna merah, 1 unit Toyota Kijang nopol D 1519 GC 2002 warna silver, 1 unit Suzuki Baleno 2000 warna hijau, dan 1 unit Mitsubishi Kuda nopol D 1623 FB.

Kasat Reskrim Polresta Bandung Tengah, Iptu Irvan Nugraha, didampingi Kabag Bina Mitra Polresta Bandung Tengah, AKP Muhammad Julian, S.H. mengatakan, terungkapnya kasus penipuan dan penggelapan itu merupakan keberhasilan bagi anggota Polresta Bandung Tengah baru-baru ini.

"Para tersangka merupakan sindikat penipuan rental mobil yang selama ini beroperasi di sekitar Kota Bandung. Dalam menjalankan aksinya, mereka terlebih dahulu menyewa mobil rental tersebut. Kemudian menggadaikannya ke pihak lain," terang Irvan.

Diungkapkan Irvan, terbongkarnya kasus penipuan ini berawal dari laporan staf Rental Mobil Cipaganti, Alton (30) kepada Polresta Bandung Tengah, senin (1/9). Dalam laporan disebutkan, pelaku adalah tersangka Tin dan EP.

"Ia melaporkan telah terjadi tindak penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka EP (DPO) dan Tin sejak Selasa (5/8) sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya, para tersangka menyewa mobil-mobil tersebut dengan lancar. Kemudian, mereka memperpanjang sewa mobil beberapa hari. Namun setelah jatuh tempo yang ditentukan, mereka tidak juga mengembalikan, malah menggadaikannya kepada tersangka Lis di Gedebage Bandung," katanya.

Saat petugas meminta keterangan dari Alton, Rabu (3/9), lanjut Irvan, tersangka SN lewat di sekitar Polresta Bandung Tengah. Melihatnya, Alton langsung menunjuk SN yang bersama EP pernah meminjam mobil ke tempatnya. Mendingar keterangan Alton itu, petugas mengamankan SN dan memeriksanya.

"Dari hasil pemeriksaan SN, kami mengembangkannya ke tersangka EP dan Tin yang ditangkap di sekitar Cimahi. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatlah Lis yang menerima gadaian mobil rental tersebut, baik dari EP maupun Tin," ujar Irvan.

Saat dilakukan pengejaran pada tersangka EP di Jln. Nilem IV Bandung, petugas tidak menemukannya. Namun dari keterangan ketiga tersangka, petugas yang memperoleh keterangan mengenai keberadaan mobil yang telah digadaikan EP dan Tin berhasil menyita tujuh unit mobil.

Sementara menurut tersangka SN, sebelumnya ia tidak menyangka akan terlibat dalam kasus penipuan itu. Namun, setelah mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu dari Tin dan Lis, akhirnya ia pun mengetahuinya.

"Saya kan orang wiraswasta, tadinya saya diajak teman untuk berbisnis bahan kimia tekstil dengan EP. Selain itu, ia pun mengajak saya untuk ikut membangun Soreang Mall," kilah SN, yang mengaku menggadaikan mobil itu sekitar Rp 15-20 juta pada tersangka Lis (B.99)\*\*



#### 2.1.2.4 Mengikuti Penataran

Pada kesempatan itu penulis diikut sertakan dalam kegiatan Penataran Terpadu Fungsi Humas yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2003. Penataran tersebut diikuti oleh seluruh anggota Polri se Jawa Barat yang diadakan di Mapolda Jabar.





KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT  
SAMBUTAN  
PADA PEMBUKAAN PENATARAN TERPADU  
FUNGSI HUMAS BAGI PARA KABAG BINAMITRA  
POLRES/TA, WARTAWAN CETAK DAN ELEKTRONIK  
DI JAJARAN POLDA JABAR  
TANGGAL 20 AGUSTUS 2003

Yth. Para Pejabat Utama Polda Jabar,  
Para Penceramah dari Ketua PWI Jabar,  
Kepala TVRI Bandung, Pemred Pikiran  
Rakyat dan Direktur STIKOM Bandung,  
Para hadirin dan khususnya para peserta  
Penataran Terpadu Fungsi Humas yang  
berbahagia,

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Salam sejahtera bagi kita sekalian.*

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur  
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan  
rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat  
bersama-sama menghadiri **Pembukaan Penataran  
Terpadu Fungsi Humas bagi para Kabag**

***Binamitra Polres/Ta, Wartawan Cetak dan  
Elektronik di jajaran Polda Jabar tahun 2003,***  
dalam keadaan tertib dan lancar.

Penataran Terpadu Fungsi Humas yang akan  
diselenggarakan ini merupakan tindak lanjut dari  
Rakernis Humas Polri, dengan tujuan untuk memberikan  
gambaran dan wawasan Fungsi Humas kepada Perwira  
Humas, Wartawan Cetak dan Elektronik, mengenai  
Kebijakan Kapolri tentang peran Humas.

Hadirin dan peserta Penataran Terpadu  
yang berbahagia,

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa dalam  
era globalisasi dan demokrasi seperti yang kita hadapi  
saat ini, masyarakat selalu menuntut transparansi  
terhadap setiap proses dan hasil kinerja Polri.

Dalam kaitannya dengan transparansi tersebut,  
maka para pengembang Fungsi Humas Polri,  
diantaranya: Divisi Humas Polri di Tingkat Mabes Polri,  
Bidang Humas di Tingkat Polda dan Fungsi Binamitra di  
Tingkat Polwil/Polres, memegang peranan penting  
dalam mengumpulkan, mengelola serta  
mendistribusikan informasi, agar bermanfaat bagi  
masyarakat dan Pimpinan Polri, sebab tanpa  
managemen informasi yang baik, kadangkala dampak  
yang ditimbulkan dari informasi tersebut akan sangat  
merugikan Polri, seperti berkembangnya opini yang  
menjadi bias dan menjadi sumber polemik.



Kemampuan mengelola informasi dengan baik harus didukung oleh kemampuan SDM dan dukungan sarana yang memadai, serta kerjasama yang baik di lingkungan kehumasan Polri maupun dengan pihak lain khususnya mass media. Kita menyadari, bahwa SDM Polri bidang kehumasan masih jauh dari harapan, demikian juga dengan peralatan pendukung yang masih sangat memperhatikan. Hal ini terjadi karena sejak awal, personel Polri tidak dibekali ilmu dan pengetahuan tentang kehumasan, khususnya bidang *Public Relation* dan pembentukan opini, disamping juga peralatan kehumasan belum tercukupi dengan baik, mengingat keterbatasan dana serta adanya kepentingan operasional yang diprioritaskan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menekankan agar pelaksanaan Penataran Terpadu Fungsi Humas ini, dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja Fungsi Humas Polri, serta dapat menjabarkan hasil Rakernis Humas Polri 2003, guna menetapkan langkah-langkah strategik kedepan, dalam upaya meningkatkan peran Humas Polri dalam mensosialisasikan Paradigma Baru Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta mendorong setiap upaya menjadikan Polri sebagai instansi yang dipercaya masyarakat melalui pengelolaan dan diseminasi informasi.

Para peserta Penataran Terpadu yang berbahagia,

Dalam bidang kehumasan ini, Kapolri telah mengeluarkan kebijakan, yang tertuang dalam Surat

Telegram Kapolri No. Pol. : ST/256/III/2003, tanggal 19 Maret 2003, tentang Larangan Penayangan Kegiatan Polri secara Vulgar. Dalam mensikapi Surat Telegram Kapolri tersebut, ada kesan Pimpinan Polri membatasi pers dalam mencari berita. Hal tersebut terjadi karena terjadinya pemahaman yang kurang proporsional dari kesatuan wilayah dalam menjabarkan Telegram Kapolri dimaksud.

Surat Telegram Kapolri tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi wartawan dalam mencari berita, tetapi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat Rakernis Humas Polri tanggal 30 Juli 2003, bahwa Surat Telegram tersebut untuk mengingatkan kepada anggota di lapangan, agar dalam melaksanakan tugas tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM, melanggar prosedur dan hukum, melanggar etika kepolisian maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika dalam melakukan tindak kepolisian di lapangan yang diliput oleh mass media, agar ditunjukkan prosedur yang benar, tidak direayasa dan ingin populer secara pribadi, serta dapat membatasi untuk tidak dipublikasikan antara lain adegan yang vulgar dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyidikan.

Oleh karena itu, para pengemban Fungsi Humas Polri dituntut untuk memahami mekanisme tugas Humas dalam memberikan keterangan pers, melaksanakan konferensi pers, membuat press release serta mengetahui tentang seluk beluk pers dan pemberitaan.



Pengetahuan mengenai hal-hal yang saya sampaikan di atas, akan disampaikan para pakar di bidangnya selama penataran ini berlangsung dan saya harapkan agar dapat dipedomani dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk itu kepada para peserta penataran agar menyimak dengan seksama materi yang disampaikan, mengingat pengetahuan tersebut pada umumnya belum diperoleh selama menjadi polisi.

Sementara itu, peran Humas ke depan akan semakin berat, karena kita akan dihadapkan dengan diberlakukannya perdagangan bebas yang tentunya kemajuan teknologi informasi akan membuat dunia tanpa batas, sehingga menuntut Fungsi Humas untuk lebih aktif dalam mempelajari dan menguasai teknologi informasi dan media publikasi yang berkembang, mengingat hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempublikasikan kinerja Polri guna membentuk opini yang positif, serta menganalisis opini yang berkembang dari waktu ke waktu secara konsisten untuk dapat segera diantisipasi.

Hadirin dan peserta Penataran Terpadu yang saya banggakan,

Sebelum saya akhiri sambutan pada pembukaan penataran ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penceramah dan panitia penyelenggara, yang telah berupaya untuk terselenggaranya Penataran Terpadu Fungsi Humas ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada peserta penataran sekalian, khususnya dari kalangan

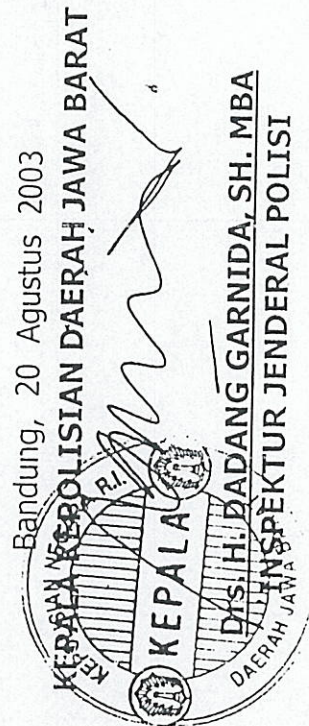
media massa baik cetak maupun elektronik, yang telah berpartisipasi dalam penataran terpadu ini. Diharapkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Polri dengan Pers selama ini, dapat terus ditingkatkan, karena Pers merupakan partner kerja Polri dan media yang paling ampuh dan memiliki jaringan yang luas, dalam mempublikasikan kinerja Polri kepada masyarakat.

Demikian sambutan saya dan dengan mengucapkan **"Bismillahir rokhmanir rokhim"** pada hari ini, Rabu tanggal 20 Agustus 2003, **Penataran Terpadu Fungsi Humas bagi para Kabag Binamitra Polres/Ta, Wartawan Cetak dan Elektronik di jajaran Polda Jabar Th. 2003, secara resmi saya nyatakan dibuka.**

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian, dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

*Sekian dan terima kasih.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*





#### 2.1.2.5 Wawancara

Wawancara yaitu menanyakan beberapa permasalahan/ pertanyaan kepada pihak yang mengetahui permasalahan tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala Karo Bina Mitra di ruangan Karo Bina mitra Polda Jabar. Adapun contoh wawancara yang dilakukan mengenai :

1. Kegiatan yang dilakukan Karo Bina Mitra mengenai hubungan kepolisian dengan pihak masyarakat diantaranya tentang pos pelayanan masyarakat dan keamanan.



## 2.2 Analisis Kegiatan

Dalam sebuah perusahaan baik Pemerintahan maupun swasta PR merupakan tulang punggung/ jantung dari perusahaan tersebut. Dimana PR memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk citra dari perusahaan tersebut. Baik tidaknya suatu perusahaan tergantung dari kerja PR itu sendiri dalam memberikan citra yang positif kepada publik.

Publik Relations adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, penentuan pelayanan-pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan *goodwill* dari mereka. Pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. ( W. Emerson Reck, 1996)

Pendapat yang dikemukakan oleh W. Emerson Reck sudah dilaksanakan oleh humas Polda Jabar dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh publik baik publik yang berasal dari dalam organisasi ataupun yang berada diluar organisasi (masyarakat umum). Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diperoleh lewat humas Polda Jabar yang akan diteruskan kepada bagian/sub yang masyarakat butuhkan sehingga adanya kebijaksanaan, pelayanan, ada pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya baik dari pihak organisasi maupun dari masyarakat umum.

Besar kecilnya departemen humas Internal (Internal PR Departement) dari suatu organisasi/perusahaan tergantung pada 3 hal utama yaitu :

1. Ukuran organisasi/perusahaan itu sendiri
2. Nilai atau arti penting fungsi humas itu bagi pihak manajemen/penelolanya



### 3. Karakteristik khas kehumasan yang berbeda-beda bagi masing-masing organisasi/perusahaan.

Usaha untuk menciptakan hubungan yang menyenangkan/keharmonisan antara para karyawan dengan berbagai publik merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Publik Relation. Komunikasi yang bersifat *"Two Way Communication"* penting sekali dan mutlak harus ada, yaitu komunikasi antara pimpinan dan bawahan dan antara bawahan dengan pimpinan yang merupakan *"feed back"* yang berdasarkan pada *"good human relations"* sesuai dengan prinsip semua publik relations.

Definisi yang dikemukakan Prof Drs. Onong Uchjana Effendy, MA PR adalah komunikasi dua arah secara timbal balik antara suatu organisasi dengan publiknya/khalayaknya, baik publik intern maupun publik ekstern, dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan management dari organisasi tersebut dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama, yang dilandasi asas saling pengertian dan saling mempercayai.

Pengertian PR yang disampaikan oleh Prof Drs Onong Uchjana Effendy, MA sudah dilaksanakan oleh Humas Polda Jabar antara lain adanya hubungan yang harmonis dan akrab antara atasan dan bawahan sehingga terbina ruang lingkup kerja yang menyenangkan. Disamping itu Humas Polda Jabar juga menjalin hubungan dengan para wartawan baik dari media massa maupun media elektronik sebagai landasan dalam menciptakan hubungan yang baik antara publik eksternal.

Kegiatan yang dilakukan oleh Publik Relation yang ditujukan didalam perusahaan disebut Internal Publik Relation dan kegiatan yang ditujukan diluar perusahaan disebut External Publik Relations.



Salah satu usaha Internal Publik Relations yang dapat menunjukkan perhatian terhadap kemajuan atau kepentingan karyawan diantaranya mengadakan upgrading atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti kegiatan lainnya yang secara psikologis dapat menaikkan martabat mereka.

Mengeratkan hubungan dengan orang-orang diluar instansi/badan hingga terbentuklah opini publik yang favorable terhadap badan itu merupakan salah satu tujuan External Publik Relations. Disamping perhatian yang besar terhadap kepentingan publik dan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka akan membangkitkan simpati dan kepercayaan publik terhadap badan/instansi yang bersangkutan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Humas Polda Jabar banyak sekali, baik itu kegiatan yang bersifat Internal maupun External. Diantaranya pembuatan kliping koran yang diambil dari berbagai media cetak, meliput kegiatan yang ada di Polda Jabar, mewawancarai para kepala bagian, membuat berbagai dokumentasi kegiatan yang diabadikan lewat foto, membuat majalah bulanan yang disebut majalah GAWISA, mengundang para wartawan dari berbagai media untuk menghadiri acara/kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Jabar serta membentuk Kelompok Kerja (Kopja) yang terdiri dari para wartawan dari berbagai media masa.

Pekerjaan yang penulis lakukan selama PKL cukup memenuhi standar kegiatan yang dilakukan oleh seorang Humas. Dan disini penulis cukup puas dengan kegiatan serta segala perlakuan Humas Polda Jabar selama penulis melaksanakan PKL.



